

Hendraswati & Zulfa Jamalie

**PEDAGANG DAN
GERAKAN PERLAWANAN
TERHADAP KOLONIAL BELANDA
PADA MASA PERANG BANJAR
(1859-1905)**

PEDAGANG DAN GERAKAN PERLAWANAN TERHADAP
KOLONIAL BELANDA PADA MASA PERANG BANJAR (1859-1905)

Hendraswati & Zulfa Jamalie

KEPEL

Sebagai salah satu periode penting dari sejarah kehidupan masyarakat Banjar, Perang Banjar telah menyisakan tinggalan-tinggalan berharga, berupa makam para pejuang, benteng pertahanan, markas gerakan, situs bekas daerah peperangan, termasuk cerita kepahlawanan dan perjuangan, dan lain-lain. Agar tinggalan-tinggalan tersebut tidak hilang dan terlupakan, serta dapat diwariskan nilai sejarah dan perjuangan yang tercakup di dalamnya, maka diperlukan restorasi dan pemeliharaan, sekaligus penelitian dan penulisan.

Sejarah yang terkait dengan Perang Banjar adalah materi penting yang harus diketahui oleh generasi sekarang, karena itu perlu upaya yang terus-menerus dalam rangka mewariskannya perlu dilakukan, baik melalui mata pelajaran muatan lokal di sekolah, museum perjuangan, pembinaan wawasan kebangsaan, maupun hal-hal lain yang dipandang relevan.

KEPEL
PRESS

Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com

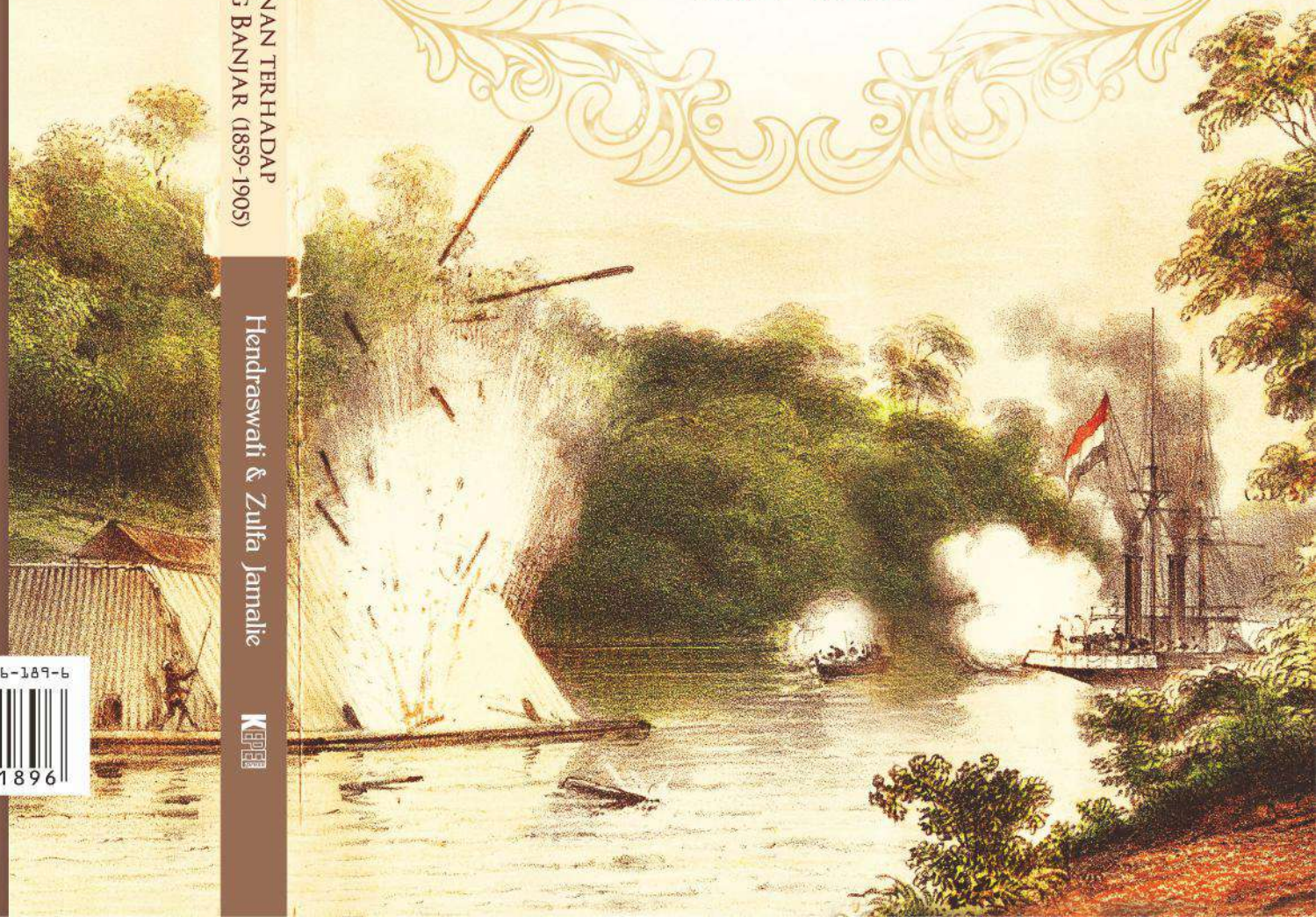


BPNB Pontianak

ISBN 978-602-356-189-6



9 786023 561896



**PEDAGANG DAN GERAKAN
PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL
BELANDA PADA MASA PERANG
BANJAR (1859-1905)**

**Penulis:
Hendraswati
Zulfa Jamalie**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN BALAI PELESTARIAN
NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT karena berkat bimbingan dan petunjukNya, penelitian dengan judul **“Pedagang dan Gerakan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda Pada Masa Perang Banjar (1859-1905)”**. ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka realisasi kegiatan rutin pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat tahun anggaran 2017.

Penelitian tentang “Pedagang dan Gerakan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda Pada Masa Perang Banjar (1859-1905)” merupakan salah satu usaha dalam rangka mengungkapkan dan memperkenalkan peristiwa sejarah pada masa Perang Banjar yang pada awalnya diprakarsai oleh para pedagang Banjar. Termasuk di dalamnya terdapat tokoh-tokoh lokal (yang juga para saudagar atau pedagang) yang memiliki peranan besar dalam peristiwa Perang Banjar tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam penelitian hingga penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Para pejabat dan staf dari instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu kami dalam melaksanakan penelitian di lapangan.

2. Para narasumber di dari berbagai lokasi yang telah memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait data yang kami perlukan.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu kami baik pada waktu penelitian di lapangan maupun pada saat penulisan.

Semoga apa yang telah bapak/ibu berikan mendapat imbalan yang sesuai dari Allah SWT. Aamiin.

Apa yang telah kami lakukan dalam penelitian, kemudian kami tuangkan dalam bentuk tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kepada semua pihak, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi lebih sempurnanya tulisan ini.

Mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini ada manfaatnya dan dapat menjadi data sekunder untuk penelitian selanjutnya.

Pontianak, Desember 2017

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR FOTO	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan	9
E. Manfaat	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode	12
BAB II DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN	
 DAGANG DI TANAH BANJAR	21
A. Pedagang Banjar	21
B. Perdagangan Banjarmasin Pra Kolonialisme	27
C. Konflik dan Persaingan Dagang	48
D. Jaringan Perdagangan	62

BAB III PERLAWANAN TERHADAP MONOPOLI DAGANG BELANDA	83
BAB IV PEDAGANG DAN PERDAGANGAN PEMICU PERLAWANAN	97
BAB V PERANG BANJAR DAN GERAKAN PERLAWANAN	131
A. Latar Belakang	131
B. Konstelasi Politik	141
C. Gerak Perlawanan	145
BAB VI PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Rekomendasi	166
DAFTAR PUSTAKA	167

DAFTAR FOTO

Foto 1.	Kawasan yang diduga bekas area Pelabuhan Muara Rampiau Margasari, sekarang menjadi permukiman padat penduduk	30
Foto 2.	Kawasan Pelabuhan Pasar Baru Margasari di tepi Sungai Negara yang menjadi pengganti pelabuhan lama	30
Foto 3	Rute Jaringan Perdagangan Kesultanan Banjarmasin	66
Foto 4.	Makam Datu Aling di Lawahan Rantau yang dianggap keramat	123
Foto 5.	Salah satu dari tujuh sumur tua peninggalan Datu Aling di Lawahan Rantau	123
Foto 6.	Komplek Makam Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan	125
Foto 7.	Cungkup Makam Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan	125

Foto 8.	Kawasan Kuburan Tokoh Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan	126
Foto 9.	Pintu masuk bekas bangunan benteng batubara Orangje Nessau di Pengaron	140
Foto 10.	Dinding bekas bangunan benteng batubara Orangje Nessau di Pengaron	140
Foto 11.	Makam H. Bujasin di Banjarmasin	151
Foto 12.	Makam Panglima Wangkang di Marabahan	153
Foto 13.	Komplek Bangunan-Cungkup makam Panglima Wangkang di Marabahan	153
Foto 14.	Pintu masuk bagian depan Benteng Gunung Madang di Kandangan	155
Foto 15.	Anak tangga menuju Benteng Gunung Madang di Kandangan	155
Foto 16.	Makam Tumpang Talu di Parincahan Kandangan	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Banjar atau *De Bandjermasinche Krijg* merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pergerakan masyarakat Banjar melawan kolonialisme Belanda. Tidak hanya karena besarnya pengorbanan dalam perang ini, tetapi juga karena rentang waktu dan dampak yang ditimbulkan dari perang ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pun bagi pemerintah Hindia Belanda, Perang Banjar dianggap salah satu perang yang sangat berat, tidak hanya karena wilayah perang yang sangat luas atau medan tempur yang sulit, tetapi juga karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan banyaknya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan. Tercatat, lebih dari 3.000 orang tentara Belanda yang tewas, mereka terdiri dari perwira dan prajurit.¹

Perang Banjar adalah rentetan dari perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dari berbagai kawasan dan wilayah, dalam rangkaian perlawanan bersenjata bangsa Indonesia menolak penjajahan. Ia menjadi satu mata rantai sejarah perang kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-19, semisal Perang di Palembang (1819-1822), Perang Paderi di Minangkabau (1821) Perang Diponegoro di Jawa (1825-1830), Perang Bali (1846-1849),

¹ Gusti Mayur, *Perang Banjar*, (Banjarmasin: CV. Rapi, 1979), h.5.

Pertempuran di Montrado (1854), Perang Aceh (1873-1899), dan lain-lain.²

Menurut Gazali Usman, Perang Banjar yang mula meletus pada 1859 dipimpin oleh P. Antasari, adalah perang yang dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan wilayah dari campur tangan penjajah Belanda yang telah menodai tradisi, merusak norma-norma agama, dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Perang Banjar bukanlah perang feodalis, tetapi perang yang dilakukan untuk membela kepentingan rakyat dan melepaskan mereka dari sikap kesewenang-wenangan Belanda yang ingin menguasai mereka, perang untuk membela keutuhan bernegara dan berbangsa, serta perang dalam rangka membela agama dari para penjajah yang telah menginjak-injak dan melecehkan.³ Dengan kata lain, ditegaskan Mayur bahwa Perang Banjar adalah perang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menjunjung agama dari penjajahan.⁴

Sebutan “Perang Banjar” walaupun mula terjadinya di daerah Banjar, namun tidak merujuk pada satu wilayah atau kelompok masyarakat sebagai pelaku sejarah dalam peperangan tersebut yang sekarang disebut masyarakat Banjar. Perang Banjar adalah peperangan bagi seluruh rakyat Kalimantan dan sebutan untuk peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Banjar dan Dayak seperti Ngaju, Maanyan, Siang, Sihong, Murung, Bakumpai serta beberapa suku Dayak lainnya yang berdiam di kawasan dan perdalaman atau sepanjang Daerah Aliran Sungai Barito untuk merebut kembali dan mempertahankan kemerdekaan hidup, agama, nilai, budaya, kekayaan alam, dan bumi Kalimantan dari serbuan dan penguasaan paksa Belanda.

Ada perbedaan rentang waktu dari terjadinya Perang Banjar menurut berbagai sumber. Berbagai tulisan yang mengutip atau

2 *Ibid.*, h.6.

3 A. Gazali Usman, “Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional P. Antasari”, *Makalah*, Forum Informasi Ilmiah Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin Memperingati Wafatnya P. Antasari pada tanggal 11 Oktober 1995, h.4.

4 Gusti Mayur, *Perang Banjar*, h.5.

mengikut kepada sumber-sumber tulisan Belanda, terutama tulisan dari W.A. van Rees (1867) yang berjudul *De Bandjermasinche Krijg*, umumnya menuliskan 1859-1863 sebagai rentang waktu terjadinya Perang Banjar. Bahkan van Rees yang pada waktu peristiwa Perang Banjar bertugas sebagai tentara Belanda dengan pangkat letnan, memandang remeh perang tersebut dan menganggapnya sebagai perang yang dilakukan oleh Belanda untuk menumpas para berandal dan pemberontak. Tulisan van Rees ini kemudian menuai banyak kritik seiring dengan munculnya studi baru dan tulisan-tulisan sejarah dari sejarawan Indonesia yang menyatakan bahwa Perang Banjar adalah perang untuk merebut kemerdekaan berbangsa dan bernegara, dan perang ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama.

Menurut Saleh (1982:1), perlawanan rakyat Banjar terhadap kolonialisme Belanda berlangsung sejak 1859 hingga berakhir pada 1905 setelah kekuasaan Pegustian di Menawing dapat dikalahkan Belanda dan Sultan Muhammad Seman tewas dalam pertempuran di Benteng Beras Kuning Sungai Menawing tersebut, yakni pada 25 Januari 1905.⁵ Pendapat Saleh juga diikuti oleh beberapa penulis dan sejarawan yang lain. Seorang penulis dari Belanda, Steenbrink (1989:46) menyatakan bahwa Perang Banjar yang terjadi pada 1857-1905 merupakan awal perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda.

Menurut Seman, walaupun tercatat dalam dokumen Pemerintahan Hindia Belanda, 1859 sebagai permulaan terjadinya Perang Banjar sehingga 1863, kurang lebih empat tahun, namun sesungguhnya Perang Banjar telah berlangsung selama 46 tahun, yakni sampai tahun 1905 seiring dengan gugurnya Muhammad Seman sebagai Sultan Banjar terakhir dalam pertempuran di daerah Barito. Karena itu, walaupun Belanda menyatakan bahwa Perang Banjar berakhir pada tahun 1865, namun sesungguhnya Perang Banjar berakhir pada tahun 1905, karena perlawanan

5 M. Idwar Saleh, *Lukisan Perang Banjar 1859-1865*, (Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, 1982), h.1.

rakyat tetap diteruskan oleh pengikut dan anak cucu P. Antasari, seperti Muhammad Seman, Muhammad Said, dan Ratu Zaleha, dan lain-lain.⁶

Bahkan, menurut Sjamsuddin gerakan perlawanan masyarakat Kalimantan dalam Perang Banjar dimaksud berlangsung dari tahun 1859-1906. Dimulai sejak pertempuran dan serangan rakyat Banjar terhadap benteng Belanda *Oranje Nassau* di Pengaron pada 28 April 1859 hingga menyerahnya Gusti Berakit (Anak dari Sultan Muhammad Seman) kepada Belanda pada 1906. Karena itu, Sjamsuddin menyimpulkan bahwa perlawanan masyarakat Kalimantan yang berkepanjangan antara tahun-tahun 1859 sehingga 1906 terhadap Belanda merupakan perlawanan yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Perlawanan ini menurutnya lebih lama daripada perlawanan yang terjadi di Jambi (1858-1904) dan perlawanan yang terjadi di Aceh (1873-1912).⁷

Penguasaan Tanah Banjar, monopoli perdagangan, politik pecah belah, penghapusan Kesultanan Banjar dan menjadikan wilayah Banjarmasin sebagai bagian dari daerah jajahan Hindia Belanda, memicu munculnya perlawanan rakyat Banjar. Akhirnya, berbagai elemen masyarakat bangkit dan berjuang untuk melakukan perlawanan dan menentang kebijakan, penguasaan, kekuasaan, dan berbagai kepentingan Belanda (episode ini kemudian dikenal dengan sebutan "Perang Banjar"). Dalam konteks perlawanan ini, salah satu kelompok yang sangat berkepentingan dan banyak memberikan kontribusi dalam gerakan perlawanan masyarakat Banjar terhadap Belanda adalah kelompok pedagang. Di mana, secara ekonomis, mereka merupakan kelompok garda depan yang sangat dirugikan oleh penguasaan maupun monopoli dagang dan jalur perdagangan Belanda. Di samping itu, mereka juga merupakan kelompok yang telah terbuka wawasan dan memahami

6 M. Syamsiar Semar, *Pangeran Antasari dan Meletusnya Perang Banjar*, (Banjarmasin: Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Kalimantan Selatan, 2003), h.3, 17.

7 Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.472.

perkembangan dunia luar melalui jalur-jalur perdagangan yang mereka jalankan.

Menurut Steenbrink (1989:46), kelompok haji dan pedagang yang merasa dirugikan, karena pengaruh kekuasaan, dan monopoli perdagangan Belanda yang semakin lama semakin luas, merupakan satu dari kelompok yang sangat keras melakukan perlawanan terhadap Belanda dan P. Tamjid (yang dianggap sebagai sultan boneka dari Belanda). Secara terintegrasi kelompok pedagang ini meleburkan kesatuan dan kesamaan gerak penentangan mereka terhadap Belanda dengan kelompok-kelompok yang lain, yakni pendukung P. Hidayatullah yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Banjar dan mendapat dukungan yang kuat dari rakyat; P. Antasari yang prihatin terhadap nasib dan penderitaan rakyatnya akibat kesewenang-wenangan, campurtangan, dan tradisi-tradisi Belanda yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai tradisi orang Banjar; serta masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang tidak memperoleh kebebasan dalam berusaha, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sangat mahal karena monopoli dan permainan dagang Belanda.⁸

Monopoli dan kekuasaan Belanda telah merugikan dunia perdagangan dan para pedagang (saudagar) Banjar, bahkan telah merusak hubungan dan jalur perdagangan yang telah terbangun sebelumnya. Batasan-batasan dan peraturan yang ditentukan oleh Belanda telah mengekang dan membuat perdagangan menjadi tidak sehat. Belanda mengatur harga beli dan kewajiban pedagang untuk menjual komoditas tertentu hanya kepada Belanda; sebaliknya para pedagang Banjar juga harus membeli komoditi tertentu kepada Belanda dengan harga yang telah ditetapkan oleh Belanda. Aktivitas dan interaksi pedagang Banjar dengan pedagang dari luar juga dibatasi. Padahal, para pedagang Banjar biasa bebas untuk berdagang sampai ke berbagai daerah, terutama Pulau Jawa, Selat Malaka, dan Singapura.

8 Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), h.46.

Perseteruan dan persaingan dagang antar pedagang Banjar dengan Belanda sendiri sebenarnya sudah lama terjadi. Apabila pedagang Banjar tidak suka karena monopoli dagang Belanda dan terbiasa bebas dalam berjualbeli serta berinteraksi dengan pedagang dari mana pun, sehingga merasa sangat dirugikan oleh berbagai pembatasan dan monopoli Belanda, maka sebaliknya Belanda juga tidak suka dengan pedagang Banjar, karena dianggap licik, suka menipu, dan tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat berkenaan dengan penjualan barang.

Berkenaan dengan sifat dagang orang Banjar yang tidak disukai oleh Belanda adalah berkaitan dengan prinsip “pemesan pertama” yang terkadang tidak diindahkan oleh pedagang Banjar. Di mana, sejak awal Banjarmasin menjadi pelabuhan dagang internasional, para pedagang atau saudagar Banjar biasa berdagang secara bebas. Para pedagang berdaulat penuh dan akan melepaskan barang dagangannya kepada pembeli tertinggi dan membayar secara kontan. Namun, dalam pandangan para saudagar Eropa (Belanda dan Inggris), pedagang Banjar sering abai pada semangat atau etika dagang yang biasa berlaku di kalangan perdagangan dunia masa itu, misalnya dalam hal prinsip *first come first served* (siapa yang pertama datang maka dia yang harus dilayani terlebih) atau prinsip bahwa barang dagangan yang telah disepakati penjualannya dan telah dipesan, maka dialah yang berhak memiliki barang tersebut. Taktik dagang ini, seringkali membuat kesal pedagang Eropa yang bertransaksi dengan pedagang Banjar, karena seringkali mereka tidak bisa membayar secara kontan atau ada pedagang lain yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga transaksi kemudian dibatalkan oleh pedagang Banjar.⁹

Perseteruan dan potensi konflik dagang antara pedagang Banjar dengan Belanda semakin meruncing ketika Belanda dengan berbagai strategi liciknya berhasil menguasai perdagangan dan bahkan wilayah Tanah Banjar. Karenanya, momentum Perang

9 Bambang Subiyakto, “Perdagangan Borneo Tenggara Tempo Doeloe”, *Kandil*, Edisi 15 Tahun V, November-Desember 2007, LK3 Banjarmasin, h.67.

Banjar menjadi periode yang sangat penting bagi kelompok pedagang Banjar dengan berbagai latar belakang (dan di antaranya juga ada dari kalangan bangsawan bahkan Sultan Banjar sendiri) untuk menunjukkan kekuatan dan perlawanan mereka terhadap kolonialisme Belanda.

Berdasarkan kenyataan di atas, penting untuk dilakukan penelitian kesejarahan dalam rangka mengeksplorasi gerakan para pedagang dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di masa Perang Banjar.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan sejarah perdagangan di Banjarmasin menyangkut banyak hal. Tidak hanya masalah berkait dengan terbentuknya jaringan perdagangan antar pedagang, perdagangan antar pulau-wilayah, atau antar negara, serta perkembangan dan komoditi yang diperdagangkan, akan tetapi juga menyangkut relasi atau hubungan dagang, strategi dagang, serta usaha dan kontribusi para pedagang Banjar dalam melakukan perlawanan terhadap monopoli dagang, kolonial, dan kekuasaan Belanda. Karenanya, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pedagang Banjar dan gerak perlawanan terhadap Belanda di masa Perang Banjar.

Secara khusus, permasalahan penelitian dimaksud, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gerak perlawanan pedagang Banjar terhadap kolonial Belanda di masa Perang Banjar?
2. Bagaimana strategi dagang pedagang Banjar melawan monopoli dagang Belanda di masa Perang Banjar?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur, maka harus diberi batasan-batasan yang menjadikan suatu permasalahan dapat diteliti secara focus. Batasan-batasan itu dikenal dengan sebutan ruang lingkup. Dalam pembahasan penelitian ini terdapat tiga batasan ruang lingkup, yakni lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup keilmuan, sebagai pedoman dalam pengumpulan data, sumber data, dan penyusunan pembahasan.

Lingkup temporal penelitian ini mengambil dimensi waktu pada masa Perang Banjar yang terjadi dari tahun 1859-1905. Penentuan awal penelitian 1859 dipilih karena sesuai pendapat para ahli sejarah yang menyatakan bahwa pada tahun itulah secara serentak masyarakat Banjar di bawah pimpinan P. Antasari melakukan penyerangan terhadap benteng batubara Belanda, *Oranje Nassau* di Pengaron. Serangan ini memulai pertempuran secara fisik melawan kolonial Belanda dan melibatkan seluruh unsur serta lapisan masyarakat Banjar. Serangan ini kemudian juga diikuti oleh serang-serangan berikutnya diberbagai daerah Tanah Banjar, baik di Banua Lima, Tanah Laut, maupun di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Perang Banjar dalam kajian ahli sejarah Indonesia kemudian dianggap berakhir seiring dengan tertembaknya Sultan Muhammad Seman pada tahun 1905 sebagai generasi terakhir pimpinan masyarakat Banjar dalam melawan kolonial Belanda.

Lingkup spasial penelitian ini meliputi wilayah atau tempat-tempat yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa Perang Banjar yang dulu disebut dengan Tanah Banjar. Karena itu, tempat dimaksud meliputi Kalimantan Selatan dan beberapa daerah di Kalimantan Tengah (terutama di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas dan Sungai Barito).

Lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah ilmu sejarah, terutama sejarah sosial-politik dan sejarah ekonomi, dengan fokus penelitian pada permasalahan gerakan perlawanan pedagang

Banjar terhadap kolonial Belanda dan strategi atau taktik (dagang) pedagang banjar dalam melawan dominasi-monopoli dagang Belanda di masa Perang Banjar. Lebih khusus lagi adalah sejarah gerakan perlawanan pedagang Banjar terhadap kolonial Belanda pada masa Perang Banjar dengan segala dinamika yang terjadi di masanya.

D. Tujuan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menemukan, mengetahui, dan menjelaskan hal-hal terkait dengan pedagang Banjar dan gerak perlawanan yang mereka lakukan terhadap Belanda di masa Perang Banjar. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yakni:

1. Segala aspek dan dinamika yang terkait dengan gerakan perlawanan pedagang Banjar terhadap kolonial Belanda di masa Perang Banjar.
2. Taktik atau strategi dagang pedagang Banjar dalam rangka melawan monopoli dagang Belanda di masa Perang Banjar.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangsih secara keilmuan maupun secara praktis. Secara keilmuan diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kajian-kajian penting berkenaan dengan sejarah ekonomi perdagangan masyarakat Banjar pada masa atau periode tertentu, terutama pada masa Perang Banjar. Kemudian secara prkatis, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi terhadap pokok-pokok dan gagasan pemikiran sejarah perjuangan dan gerakan perlawanan masyarakat Banjar, terutama berkenaan pedagang

dan gerak perlawanan mereka terhadap penjajahan Belanda di Masa Perang Banjar.

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang secara terpisah menyoroti tentang sejarah dan perkembangan perdagangan serta Perang Banjar. Beberapa tulisan yang secara langsung menyoroti tentang sejarah perdagangan di Banjarmasin, antara lain:

1. Tesis berjudul “Politik dan Perdagangan Lada di Kesultanan Banjarmasin 1747-1781” (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Depok, 1991), oleh Sulandjari. Tesis ini berisikan pembahasan tentang perdagangan lada yang meningkat pada abad XVIII di Banjarmasin dan ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Kesultanan Banjarmasin. Lada yang sempat menjadi primadona dunia perdagangan telah menarik perhatian pedagang asing untuk mencarinya secara langsung dan datang ke Banjarmasin yang di masanya telah berkembang menjadi kota dan pelabuhan dagang internasional. Sebagai bahan perbandingan, karya Sulandjari ini sangat relevan digunakan untuk mendeksripsikan sejarah dan perkembangan perdagangan di Banjarmasin.
2. Disertasi berjudul: “Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin 1880-1990” (Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Depok, 2004) oleh Endang Susilowati. Fokus kajian disertasi ini menyoroti tentang perkembangan pelayaran dengan perahu masyarakat Banjar serta berisikan pembahasan tentang Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat pelayaran. Bagian terpenting dari disertasi ini adalah deskripsi keluar masuk kapal-kapal kecil dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ketika memasarkan barang-barang dagangan mereka di Banjarmasin.

3. Skripsi berjudul: “Kesultanan Banjarmasin dalam Lintas Perdagangan Nusantara Abad XVIII” (Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) oleh Ibnu Wicaksono. Skripsi ini mengetengahkan beberapa hal terkait dengan sejarah perkembangan perdagangan di Banjarmasin pada abad XVIII serta peranan Kesultanan Banjar dalam memajukan perdagangan tersebut. Dalam skripsi ini juga dijelaskan aktivitas perdagangan yang berlangsung di masa itu, barang-barang yang diperdagangkan, dan jaringan perdagangan Banjar dengan bangsa asing, serta pengaruh perdagangan terhadap kondisi politik di Kesultanan Banjar.
4. Artikel berjudul: “Perdagangan Borneo Tenggara Tempo Doeloe”, oleh Bambang Subiyakto, dimuat pada *Jurnal Kandil*, edisi 15 Tahun V, Nopember-Desember 2007, LK3 Banjarmasin, (59-76). Dalam tulisannya ini, Bambang menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal menyangkut jenis komoditas, aktivitas perdagangan, dan proses perdagangan yang berlangsung di wilayah Borneo Tenggara pada abad ke-19

Sedangkan tulisan yang menyoroti sejarah Perang Banjar dalam berbagai konteksnya, antara lain:

1. Skripsi berjudul: “Kesultanan Banjar dan Perang Banjar 1859-1905 M” (Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), oleh Nisa Ushulha. Skripsi ini menyoroti dan membahas tentang sejarah berdirinya Kesultanan Banjar, kondisi sosial politik yang terjadi di Kesultanan Banjar masa terjadinya Perang Banjar, dan dampak yang ditimbulkan dari Perang Banjar terhadap Kesultanan Banjar.

Beberapa penelitian dan tulisan di atas menyoroti secara terpisah dua hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yakni pedagang atau perdagangan dan Perang Banjar. Adapun tulisan yang secara khusus menyoroti tentang dua aspek dimaksud adalah “Oportunitas Saudagar Banjar: Peranan Haji Isa dan Pangeran Syarif Hasan dalam Perang Banjar”, oleh Muhammad Iqbal, dimuat pada *Jurnal Kandil*, edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin (24-38). Dalam tulisannya ini, Iqbal (2008:25) menyatakan bahwa tidak semua golongan haji dan pedagang Banjar dengan penuh kesadaran melakukan perlawanan (jihad) terhadap kolonial Belanda, sebaliknya ada juga di antara mereka yang berafiliasi (bekerjasama) pada Belanda dan bersikap mendua, seperti halnya dengan Haji Isa dan Pangeran Syarif Hasan.

Berbagai penelitian dan tulisan di atas tidak ada yang secara khusus membahas tentang gerakan perlawanan kelompok pedagang terhadap kolonial Belanda, padahal pada bagian awal dari tulisan ini, ditegaskan bahwa pedagang Banjar merupakan kelompok yang sangat penting dan berkontribusi besar dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang pertama kali datang telah melakukan penjajahan secara ekonomi dengan menerapkan pembatasan serta monopoli dagang, sehingga membuat instabilitas perkembangan usaha dagang para pedagang Banjar.

G. Metode

1. Metode dan Pendekatan

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah pendekatan sejarah (*history*) yang dipadukan dengan studi kepustakaan untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap dokumen, surat perjanjian, buku-buku, laporan penelitian, dan sejumlah tulisan lainnya yang mengetengahkan tentang perkembangan perdagangan, aktivitas

pedagang, dan muncul gerakan perlawanan para pedagang Banjar terhadap kolonial Belanda pada masa Perang Banjar. Pelacakan terhadap sumber-sumber lisan yang dimiliki oleh para akademisi, sejarawan, maupun tokoh-tokoh masyarakat tertentu juga akan dikaji guna mendapatkan dan memperkaya data-data penelitian tertulis.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah pada prinsipnya merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis sumber, rekaman, dan peninggalan masa lalu dengan merekonstruksinya berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses historiografi (Gottschalk, 1985:32). Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan Aminuddin Kasdi (2000:10), pendekatan sejarah merupakan alat, piranti atau prosedur yang digunakan sejarawan dalam tugas meneliti sejarah. Karena itu, pendekatan sejarah setidaknya mempunyai empat unsur utama dalam penerapannya, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1985:32).

a. Heuristik

Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber sejarah dapat berupa bukti yang ditinggalkan manusia yang menunjukkan segala aktivitasnya di masa lampau baik berupa peninggalan-peninggalan benda maupun catatan-catatan tertulis. Sumber ini dapat ditemukan di perpustakaan-perpustakaan, dari internet, dan untuk arsip dapat diperoleh di kantor-kantor atau instansi-instansi tertentu, di mana dalam penelitian ini tim peneliti menggunakan sumber berupa buku-buku dan internet.

b. Verifikasi

Penulisan sejarah dikenal dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain atau dengan alat mekanisme. Sumber kedua adalah sumber skunder, sumber skunder adalah merupakan kesaksian

dari siapapun yang bukan saksi mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.

Verifikasi atau kritik sumber merupakan verifikasi terhadap sumber darimana suatu data didapat, yaitu pengujian kebenaran atau ketetapan dari sumber sejarah. Kritik sumber ada dua yaitu kritik eksteren dan kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber. Menurut Abdurrahman (1999:58) uji keabsahan dan keaslian sumber (otentik) melalui kritik ekstern serta uji kredibilitas sumber dengan kritik intern. Karenanya, dalam penelitian ini nantinya, penekanan juga akan lebih banyak diberikan pada studi literatur yang mengutamakan isi sumber berdasarkan kredibilitasnya. Antara sumber primer dan sekunder diadakan perbandingan sehingga dapat saling melengkapi.

Kritik eksternal, hal ini berguna untuk menetapkan keaslian atau aotentitas data, dilakukan kritik eksternal. Apakah fakta peninggalan ata dokumen itu merupakan yang sebenarnya, bukan palsu. Berbagai tes dapat dipergunakan untuk menguji keaslian tersebut. Misalnya untuk menetapkan umum dokumen melibatkan tanda tangan, tulisan tangan, kertas, cat, bentuk huruf, penggunaan bahasa, dan lain-lain.

Kritik Internal, setelah dilakukan suatu dokumen diuji melalui kritik eksternal, berikutnya dilakukan kritik internal. Walaupun dokumen itu asli, tetapi apakah mengungkapkan gambaran yang benar, bagaimana mengenai penulis dan penciptanya, Apakah ia jujur, adil dan benar-benar memahami faktanya, dan banyak lagi pertanyaan yang bisa muncul seperti di atas. Sejarahwan harus benar-benar yakin bahwa datanya otentik dan akurat. Hanya jika datanya otentik dan akuratlah sejarawan bisa memandang data tersebut sebagai bukti sejarah yang sangat berharga untuk ditelaah secara serius.

c. Interpretasi

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi yang sering disebut juga dengan istilah penafsiran sejarah atau analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta

yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Interpretasi dapat dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh guna menyingkap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama. Setelah data terkumpul lalu data disimpulkan untuk kemudian dibuat penafsiran keterkaitan antara sumber yang diperoleh.

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Berdasarkan berbagai fakta yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Bagi sejarawan akademis, interpretasi yang bersifat deskriptif saja belum cukup, karena dalam perkembangan terakhir, sejarawan masih dituntut pula untuk mencari landasan penafsiran yang digunakan.

Dalam tahap ini analisis sejarah dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh yang akhirnya dihasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penulisan lengkap yang disebut dengan historiografi.

d. Historiografi

Setelah melakukan proses analisis dan sintesis, proses kerja mencapai tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan narasi sejarah. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi satu perpaduan yang logis dan sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, tim peneliti juga membuat laporan dengan mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisan yang mudah untuk dipahami oleh orang lain.

Di samping menggunakan pendekatan sejarah sebagai pendekatan utama dalam penelitian, sesuai dengan perkembangan

metodologi sejarah, maka ketika akan menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lampau, peneliti juga menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan pokok kajian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan politik dan pendekatan sosial. Pendekatan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosial adalah hubungan antara sesama serta manusia dengan lingkungannya yang ada pada suatu wilayah tertentu dengan berbagai bentuk hubungan yang harmonis dan baik. Pendekatan politik dan sosial dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui penguasaan dan kontribusi Kesultanan Banjarmasin terhadap sejarah perdagangan dengan segala dinamika perkembangannya.

Dalam konteks sejarah, pendekatan ini oleh Sartono Kartodirdjo (2003:6) disebut dengan pendekatan sejarah multidimensional, yakni pendekatan penelitian yang melihat sebuah proses kejadian dalam berbagai sudut pandang (dimensi) khususnya ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini dipakai karena gerakan perlawanan masyarakat Banjar terhadap kolonial Belanda menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti di bidang politik pemerintahan, ekonomi perdagangan, dan sosial budaya . Karenanya, tim peneliti menggunakan ilmu-ilmu sosial (seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan sebagainya) untuk memahami sebuah proses, dinamika, dan perkembangan peristiwa gerakan perlawanan tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Pedagang dan Gerakan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda Pada Masa Perang (1859-1905), maka data yang dikumpulkan terdiri data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil review dan analisis kritis terhadap sumber utama penelitian, yakni dokumen perjanjian dagang ataupun perjanjian politik Kesultanan Banjar dan buku tentang Perang Banjar. Sedangkan data sekunder yang melengkapi

dan sebagai hasil cek silang didapat dari wawancara dengan sejumlah sejarawan, akademisi, maupun keturunan dari pelaku sejarah dalam peristiwa Perang Banjar. Termasuk pula bekas lokasi peristiwa sebagai situs bersejarah, bangunan bersejarah (benteng), cagar budaya-sejarah, dan lain-lain.

Adapun sumber data terdiri dari sumber tertulis dan sumber lisan dalam bentuk transkrip hasil wawancara atau dokumentasi.

Sumber data tertulis terdiri dari dokumen atau surat perjanjian, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang mengungkapkan tentang sejarah perdagangan dan gerakan perlawanan pedagang terhadap kolonialis Belanda pada masa Perang Banjar. Dalam penelitian ini, sumber tertulis yang menjadi referensi utama untuk dikaji adalah:

- a. Dokumen atau Surat-surat Perjanjian (Dagang dan Politik) Kesultanan Banjar dengan Belanda;
- b. *De Bandjermasinsche Krijg*, oleh W.A. van Rees (1867);
- c. Perang Banjar, oleh Gusti Mayur (1979);
- d. Lukisan Perang Banjar 1859-1865, oleh M. Idwar Saleh (1982);
- e. Sejarah Banjar, oleh M. Suriansyah Ideham dkk (2003)

Pelacakan terhadap sumber data tertulis oleh tim peneliti dilakukan pada:

- a. Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Kalimantan Selatan
- b. Museum Negeri Lambung Mangkurat Banjarbaru
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), khususnya arsip Kesultanan Banjarmasin dalam hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda.
- d. Perpustakaan Nasional di Jakarta yang juga memiliki koleksi surat-surat perjanjian dagang dan atau perjanjian politik, antara Kesultanan Banjar dengan Belanda.
- e. KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde, Royal Netherlands, Institute of Southeast Asian and Caribbean*

Studies) Leiden Belanda melalui perwakilan (Kedutaan Besar Belanda) di Jakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan dan menelaah sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan utama penelitian, yakni gerakan perlawanan pedagang terhadap kolonial Belanda di masa Perang Banjar. Juga deskripsi berkenaan dengan situasi, latar belakang, dan hal-hal terkait dengan perkembangan dunia perdagangan dalam konteks sejarah di Banjarmasin.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh dan menggunakan sumber benda ke tempat-tempat terjadinya peristiwa, misalnya bekas bangunan Benteng *Oranje Nassau* di Pengaron (Kabupaten Banjar), Kampung Kumbayau Muning (Kabupaten Tapin), Sungai Montallat, Pulau Petak, Pulau Telo (Kabupaten Kapuas) tempat pertempuran dan tenggelamnya kapal perang Belanda *Onrust* dan Benteng Beras Kuning Sungai Menawing di Muara Teweh-Puruk Cahu (Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah), dan lain-lain. Selain itu, observasi lapangan juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk membandingkan dan mengkritik sumber tertulis maupun sumber lisan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui proses tanya-jawab dengan tujuan untuk memperoleh data dari sumber-sumber lisan. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah sejarawan, peneliti sejarah, akademisi sejarah, dan keturunan dari para pelaku

sejarah dalam peristiwa Perang Banjar. Wawancara dilakukan secara bebas (*free interview*) untuk mendapatkan sebanyak-banyak data atau informasi, namun tetap mengacu kepada permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data atau sumber-sumber sejarah yang telah dilakukan kritik intern maupun ekstern akan menghasilkan fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan hasil yang diperoleh setelah dilakukan kritik terhadap data (sumber sejarah). Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis memerlukan fakta-fakta yang telah teruji. Oleh karena itu data-data yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus diuji, dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin. Kritik tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun tentang kredibilitas isinya (kritik intern), dapat dilakukan di saat atau sesudah pengumpulan data berlangsung. Fakta-fakta itu kemudian diinterpretasikan dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Hasil interpretasi fakta itu kemudian disusun dalam bentuk tulisan sejarah yang bersifat deskripsi analisis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN DAGANG DI TANAH BANJAR

A. Pedagang Banjar

Perdagangan yang dijalankan oleh orang Banjar sebenarnya telah berlangsung lama dan mentradisi, meskipun sebelumnya orang Banjar (khususnya mereka yang tinggal di perdalam dan daerah hulu dari Sungai Negara) lebih banyak menggeluti usaha pertanian dan perladangan. Namun, seiring dengan terbentuknya Kesultanan Banjarmasin oleh Raden Samudera yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Suriansyah pada 1526 M dan masuknya para pedagang Muslim ke daerah pesisir Banjarmasin, maka perdagangan di daerah ini menjadi semakin ramai, di mana aktivitas perdagangan tersebut tidak melibatkan para pedagang lokal, tetapi juga para pedagang yang berlatarbelakang bangsawan kerajaan bahkan Sultan Banjar.

Dunia perdagangan di tanah Banjar pernah mengalami masa keemasan, terutama di bidang perdagangan lada (*sahang*) dan karet (*gatah*). Kejayaan ini ditandai dengan meningkatnya ekspor lada dan karet yang kemudian diiringi pula dengan peningkatan kebutuhan dan konsumsi hidup masyarakat. Sehingga, pada abad ke-17 M, lada yang dihasilkan masyarakat Banjar mampu menarik

minat kedatangan orang-orang Eropa ke wilayah ini, terutama Belanda dan Inggris.¹

Para ahli telah mengidentifikasi dan menjadi pandangan umum bahwa masyarakat Banjar (terutama mereka yang berasal dari Negara dan Alabio) adalah masyarakat pedagang. Dalam konteks ini, Lesley Potter memilah orang Banjar atas dasar penguasaan pekerjaan-pekerjaan spesifik oleh daerah-daerah tertentu di Kalimantan Selatan. Pekerjaan di bidang pertanian misalnya banyak dilakukan oleh orang Banjar dari daerah barabai, sedangkan industri, kerajinan tangan, dan nelayan banyak dilakukan oleh orang Banjar dari daerah Negara. Adapun bidang perdagangan banyak digeluti oleh orang Banjar dari daerah Negara, Amuntai, dan Alabio, serta bidang pekerjaan mendulang intan yang banyak dilakukan oleh orang-orang dari daerah Martapura.²

Menurut Bambang, daerah Negara (Kabupaten HSS) merupakan daerah asal banyak pedagang Banjar. Di samping menjual berbagai barang mereka juga menyebarkan sendiri produknya ke seluruh Nusantara. Mereka juga membangun kapal-kapal dagang yang terbuat dari kayu ulin dan menggunakannya sebagai pedagang keliling dengan jumlah komoditas yang besar dan menempuh perjalanan-perjalanan yang jauh. Mereka memperdagangkan barang-barang produk mereka sendiri dan hasil alam dan dengan perahu-perahu milik sendiri pula mereka menyeberang lautan. Dalam hal kepiawaian berdagang, keahlian mereka hanya dapat disaingi oleh pedagang asal Alabio. Dari kedua daerah inilah kebanyakan saudagar-saudagar Banjar berasal dan terkemuka pada masa dulu.³ Mereka adalah pedagang-pedagang yang handal dan menjadi pedagang mancanegara, mereka juga memiliki kedudukan yang penting; merupakan bagian dari kelas

1 Alfisyah, "Etika Dagang Urang Banjar", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.14.

2 Lesley Potter, dalam Bambang Subiyakto, "Dinamika Kehidupan di Tanah Banjar Pada Paroh Kedua Abad XIX", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.3.

3 Bambang Subiyakto, "Dinamika Kehidupan di Tanah Banjar Pada Paroh Kedua Abad XIX", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.8.

sosial yang sangat kuat di Banjarmasin; pelopor perubahan sosial, perkembangan kehidupan beragama, dan tentu saja para pedagang tersebut adalah kelompok utama yang memberikan pengaruh sangat kuat terhadap munculnya beberapa pergolakan dan gerakan sosial di Banjarmasin.⁴

Secara historis orang Banjar memang dikenal dengan usahanya di bidang perdagangan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan kerajaan di Tanah Banjar. Kerajaan Banjar pada masa awal (Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha) tidak hanya didirikan oleh para pendiri yang berlatarbelakang sebagai pedagang,⁵ akan tetapi pendiri Kesultanan Banjar dan mereka yang berjuang untuk menegakkan Kesultanan Banjar juga adalah para pedagang.

*“Maka orang Sarapat, orang Sungai Muhur, orang Balandean sakaliannja itu sama disuruh Patih Masih barkumpul ka-Bandjar, kalau disarang Pangeran Tumanggung itu, sama bargagah di-Bandjarmasih itu. Tatapi orang jang balanglang siang malam tiada mantuk, kalau datang sikap Pangeran Tumanggung itu sigra mambari tahu jang balanglang itu. Maka sikap di-Bandjar itu barpuluh-puluh sudah mustaip sarta sindjatanya. Sagala oarng itu kira-kira anam ribu orang nagri, dan orang jang bardagang itu bartulung ada orang saribu”*⁶

Kemudian, dalam konteks sosio-kultural, orang-orang Dayak dari Pergunungan Meratus pun menyebut orang Banjar dengan sebutan “orang dagang”.⁷

Dalam hal berdagang, keberhasilan para pedagang Banjar, selain ditentukan oleh faktor geografis yang berada di wilayah pesisir juga terkait dengan prinsip, nilai-nilai, dan etika dagang yang berkembang dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perkembangan ekonomi. Menurut Alfisyah, etika dagang dimaksud terkait dengan berbagai pandangan dan sikap yang ada dalam

4 Humaidy, dalam “Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis”, *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.70.

5 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1968), h.228.

6 *Ibid.*, h.408.

7 Noerid Haloei Radam, *Religi Orang Bukit*, (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2001), h.97.

Islam sebagai agama anutan orang Banjar. Etika ini kemudian mendorong terbentuknya *innerworldly ascetism* yang dapat mempengaruhi orang untuk bekerja keras dan merupakan dasar, etos, atau semangat yang mempengaruhi sikap utama seseorang terhadap diri mereka sendiri dan terhadap dunia sekitarnya.⁸ Maksudnya, orang Banjar telah mengadopsi sejumlah nilai atau etos kerja yang diajarkan dalam Islam, seperti harus bekerja keras, semangat, dan memanfaatkan waktu yang ada dan ini kemudian menjadi prinsip mereka dalam berdagang atau berusaha.

Berkenaan dengan karakter dagang orang Banjar, sebagaimana pula digambarkan Ras, bahwa pada masa dulu karakter dagang orang Banjar dikenal sebagai saudagar yang terpuji, jujur, dan memiliki pengaruh usaha ekonomi yang sangat kuat. Saudagar Banjar juga dikenal sangat dermawan dan peduli pada berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya pendidikan, mereka memiliki kepekaan sosial dan gerakan untuk membangun masyarakat secara umum, tidak semata soal ekonomi, tetapi juga bidang pendidikan.⁹

Latarbelakang para saudagar Banjar pada masa dulu pun tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, tetapi juga para bangsawan, bahkan raja atau sultan Banjar. Sebagaimana ditegaskan Ras dalam *Hikajat Bandjar*, Empu Jatmika, pendiri Kerajaan Negara Dipa adalah seorang saudagar besar dan Raden Sari Kaburangan, pendiri dinasti Kerajaan Negara Daha juga seorang pedagang.¹⁰ Tradisi raja sebagai pedagang diteruskan oleh penguasa Banjar yang berikutnya, seperti yang dilakukan oleh sultan dan bangsawan di Kesultanan Banjar; misalnya Sultan Suriansyah, Sultan Musta'inbillah, Sultan Inayatullah, dan seterusnya, mereka adalah para sultan yang juga merupakan pedagang. Dalam menjalankan usaha perdagangannya, para saudagar dari kalangan bangsawan Banjar dimaksud, ada yang secara langsung ikut menjalankan usaha perdagangannya dan ada pula yang dijalankan oleh orang lain

8 Alfisyah, "Etika Dagang Urang Banjar", h.20.

9 Humaidy, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.70.

10 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.228, 230, dan 268.

yang disebut dengan istilah *commenda*,¹¹ yakni mereka berdagang dengan menyerahkan barang dagangan kepada orang lain untuk diperdagangkan atau hanya memberi sejumlah uang sebagai modal usaha. Perdagangan sistem *commenda* biasa dilakukan oleh seorang sultan atau bangsawan yang sibuk mengurus kerajaan, sehingga tidak sempat mengurus sendiri usaha perdagangannya. Karenanya, mereka menyerahkan dagangannya (misalnya berupa rempah-rempah, hasil hutan, emas, intan) atau menyerahkan sejumlah modal kepada saudagar lain untuk diusahakan dengan perjanjian bagi keuntungan menurut ketentuan yang telah disepakati.

Lalu bagaimana konsep tentang pedagang atau saudagar itu sendiri dalam kehidupan masyarakat Banjar?

Menurut Jantera Kawi, skala usaha di bidang perdagangan yang dilakukan oleh orang Banjar terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok pedagang kecil-kecilan, misalnya dengan membuka warung kelontongan (*pancarikinan*). Kedua, kelompok pedagang menengah yang memiliki modal dan usaha perdagangan pada tingkat lokal. Ketiga, kelompok pedagang besar yang terdiri dari *saudagar* dan *panggawa*, mereka memiliki modal dan beberapa jenis usaha perdagangan yang besar, memimpin kelompok usaha, memiliki usaha dibeberapa tempat, dan mereka dikenal sebagai *trader*.¹²

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, para pedagang yang disebut juga dengan istilah *saudagar* dan *panggawa* memiliki posisi dan kedudukan yang sangat dekat dengan masyarakat, karena mereka adalah pelaku penting ekonomi yang dapat memberikan alternatif penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan bagi masyarakat banyak. Kegiatan usaha dan perdagangan yang mereka jalankan juga memberi dampak ekonomi yang luas, tidak hanya masyarakat pada satu tempat di mana mereka

11 Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h.67.

12 Jantera Kawi, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.69.

tinggal, tetapi juga untuk masyarakat di mana usaha mereka dilakukan. Selain berfungsi sebagai penampung dan penjual, biasanya mereka juga memiliki lahan dan mempekerjakan orang lain (buruh) di lahan tersebut. Namun, lahan yang dikerjakan tersebut tidak dengan sistem upah, melainkan dengan cara bagi hasil. Pembagian disepakati secara terbuka dan tanpa tekanan maupun paksaan, karenanya pembagian sangat tergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak; bisa sepertiga, dua pertiga, dan seterusnya. Sistem ini menunjukkan bahwa ada kesetaraan di masyarakat; kesetaraan antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan.¹³ Keberadaan saudagar Banjar memang berperan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan modal serta usaha yang mereka lakukan.¹⁴

Menurut Bambang, dalam masyarakat Banjar, seorang pedagang yang besar, memiliki kapal dan membawa barang dagangannya sampai ke luar daerah disebut sebagai seorang saudagar. Saudagar bukanlah pedagang kecil, bukan pengusaha, dan bukan pula pemborong proyek pemerintah; saudagar adalah pedagang besar yang membawa barang dagangannya hingga ke mancanegara, dan para saudagar Banjar telah dikenal sejak masa dulu hingga masa kolonial. Keberhasilan mereka dalam berdagang tersebut ditunjang oleh kemampuan mereka dalam berhubungan dengan pedagang yang lain dalam membentuk komunitas dan jaringan perdagangan.¹⁵ Arifin Anis menjelaskan bahwa biasa para saudagar Banjar selalu terikat dalam satu perkumpulan dan jaringan dagang yang telah mereka bentuk, karena tanpa jaringan perdagangan, usaha dagang yang dijalankan oleh para saudagar tersebut tidak akan berkembang hingga ke mancanegara. Jaringan dagang yang luas dibangun oleh saudagar Banjar dan sistem

13 Jantera Kawi, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.69.

14 Harun Utuh, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.70.

15 Bambang Subiyakto, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.71.

dagang terbuka menyebabkan hubungan ke mancanegara bisa dilakukan. Karena itu, tempo dulu para saudagar Banjar memiliki hubungan dagang dengan pedagang Cina, Arab, dan Belanda. Sementara, dalam komunitas saudagar, sifat egalitarian menjadi ciri mereka, jadi tidak ada strata dalam sistem dagang Banjar, bahkan para bangsawan dan raja pun ikut berdagang.¹⁶

Implikasi lain, aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Banjar pada gilirannya juga melahirkan proses migrasi, karena pedagang-pedagang Banjar sejak dahulu sudah mendatangi pulau-pulau di luar Kalimantan, untuk berdagang, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan bahkan ke Malaysia atau Singapura. Sambil berdagang, akhirnya mereka menetap di sana dan membentuk komunitas baru serta mengidentifikasi diri sebagai orang Banjar.¹⁷

Di samping beberapa hal penting terkait dengan keberadaan pedagang Banjar di atas, tentu saja, hal yang paling penting lagi adalah bahwa pedagang adalah komunitas pertama yang melakukan perlawanan dan penentangan terhadap kolonialisme Belanda.

B. Perdagangan Banjarmasin Pra Kolonialisme

Perdagangan merupakan bagian penting dari perkembangan masyarakat Banjar dari masa ke masa, setidaknya dimulai sejak zaman Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha yang bercorak Hindu-Budha hingga Kesultanan Banjarmasin. Bahkan, secara historis Kerajaan Negara Dipa sebagai negara awal di Kalimantan Selatan dibangun oleh para imigran saudagar (pedagang besar) dari Keling (daerah Kediri Utara Jawa Timur)

16 MZ. Arifin Anis, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.73.

17 Taufik Arbain, "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.70.

di bawah pimpinan Ampu Djatmika sekitar abad ke-14 M dengan pusat pemerintahan di lembah Sungai Tabalong (Amuntai).¹⁸

Kerajaan Dipa mengembangkan sistem pemerintahan dan adat-istiadat kehidupan istana mengikut kepada model pemerintahan Kerajaan Majapahit. Begitu pun dalam mengembangkan kehidupan ekonomi negara, Kerajaan Dipa menganut pola sebagaimana yang dikembangkan oleh Kerajaan Majapahit, yakni pola kerajaan yang bercorak campuran, antara agraris dan maritim. Menurut Uka Tjandrasasmita, masyarakat kota agraris dalam kehidupan ekonominya lebih menitikberatkan pada usaha di bidang pertanian atau perkebunan (hasil bumi). Sebaliknya, masyarakat kota maritim lebih menitikberatkan perkembangan ekonomi dan kehidupan pada usaha di bidang perdagangan.¹⁹ Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan Indriyanto, perkembangan suatu pelabuhan maupun kota tidak bisa dilepaskan dengan perdagangan, dan sudah barang tentu perkembangan perdagangan juga sangat terkait dengan peran dan fungsi pelabuhan. Karenanya, perdagangan (baik perdagangan jarak jauh atau perdagangan antar pulau maupun antar negara) merupakan variabel yang menentukan perkembangan sebuah kota dan menjadi inti dari pengertian sebuah kota.²⁰

Di masa Kerajaan Dipa dan Kerajaan Daha yang menitikberatkan perkembangan ekonomi pada usaha perdagangan sekaligus pertanian, dunia perdagangan sudah berkembang sedemikian rupa. Pertumbuhan yang pesat dan ramainya perdagangan antar pelabuhan di Nusantara dengan Kalimantan digambarkan dalam buku *Hikajat Bandjar* yang antara lain menyebutkan bahwa pelabuhan utama Kerajaan Banjar, baik pada masa Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga terakhir di masa Kesultanan Banjarmasin, pelabuhan atau bandar selalu ramai dikunjungi oleh

18 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.228 dan 268.

19 Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia: Dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2000), h.46.

20 Indriyanto, "Peran Pelabuhan dalam Menciptakan Peluang Pariwisata: Kajian Historis Ekonomis", *Makalah pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 28 April 2005, h.2.

para pedagang lokal maupun pedagang dari luar, seperti Jawa, Melayu, Cina, Campa, maupun Keling. Bandar Muara Bahan yang terletak di tepi sungai Barito dan dekat dengan laut Jawa ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru.²¹

Menurut Ras, seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh Kerajaan Negara Dipa yang bertumpu kepada usaha di bidang agraris (pertanian) dan bidang perdagangan, maka para pedagang dari berbagai daerah semakin ramai dan banyak pula yang datang untuk berniaga di kawasan ini, bahkan kemudian menetap di Negara Dipa.²²

*“Hatta barapa lamanya kamudian daripada itu nageri Negara Dipa itu bartambah-tambah makmur, suka ramai. Banyak urang barbaniaga, saparti Cina dan Malayu, urang Johor, urang Aceh, urang Malaka, urang Minangkabau, urang Patani, urang Mangkasar, urang Bugis, urang Sumbawa, urang Bali, urang Jawa, urang Bantan, urang Palembang, urang Jambi, urang Tuban, urang Madura itu, urang Walanda, urang Makkau, urang Kaling. Ada nang satangahnya itu bardiam sakali, urang dagang-dagang itu. Banyaklah nang tiada tarsebut”.*²³

Menurut Ras, sewaktu pelabuhan utama kerajaan masih di Muara Rampiau, pelabuhan ini sudah berkembang dengan pesat. Di masanya, pelabuhan Muara Rampiau tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan pertemuan antara pedagang lokal dengan pedagang dari luar, tetapi juga menjadi pusat permukiman para pedagang yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa, seperti orang-orang Keling-Gujarat (India), Cina, Melayu, Makassar, dan Biaju.

Keberadaan Muara Rampiau sebagai pelabuhan dagang internasional dibuktikan dengan berbagai penemuan benda-benda arkeologis sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Museum Lambung Mangkurat dan Balai Arkeologi Banjarmasin di situs Candi Laras (Margasari-Rantau). Di situs Candi Laras ini pernah ditemukan benda-benda arkeologis, seperti berbagai

21 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.370; Amir Hasan Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, h.12.

22 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.527.

23 *Ibid.*, h.527.

jenis batu permata, cincin, keramik, gerabah, mata uang Cina, perhiasan dan ukiran yang terbuat dari dan berbahan emas,²⁴ di mana sebagian dari barang-barang temuan ini telah disimpan dan menjadi koleksi Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru, walaupun ada pula di antaranya yang dimiliki oleh masyarakat. Barangkali, itu sebabnya, mengapa anak sungai yang mengalir dekat dengan atau menuju lokasi bekas bangunan Candi Laras (terletak dalam masuk dalam wilayah Kecamatan Candi Laras Utara) ini oleh masyarakat Margasari dinamakan dengan *Sungai Amas* (emas).

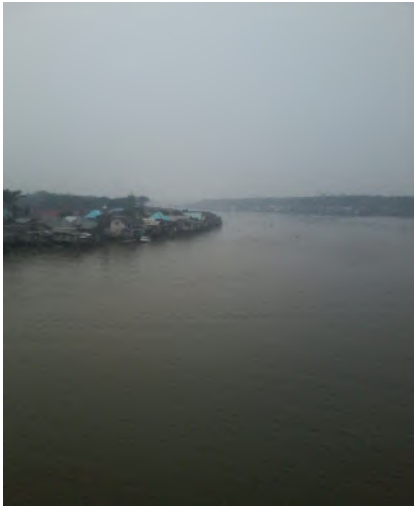


Foto 1. Kawasan yang diduga bekas area Pelabuhan Muara Rampiau Margasari, sekarang menjadi permukiman padat penduduk.

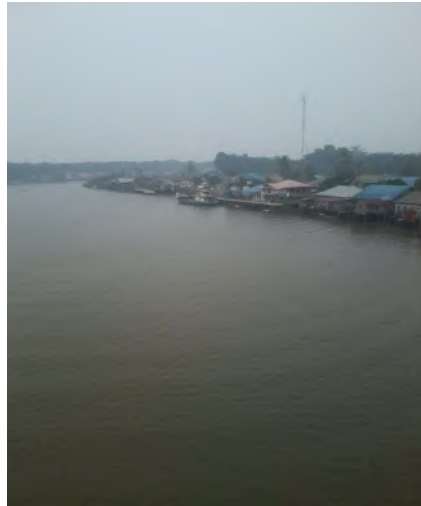


Foto 2. Kawasan Pelabuhan Pasar Baru Margasari di tepi Sungai Negara yang menjadi pengganti pelabuhan lama.

Menurut Andi Nuralang, peranan Muara Rampiau sebagai kota pelabuhan pastilah tidak kecil, karena merupakan sarana terlaksananya kegiatan perdagangan. Hal ini sesuai dengan konsep

²⁴ Andi Nuralang, "Sungai sebagai Jalur Utama Aktivitas Perekonomian Masyarakat di Kalimantan Selatan", dalam Gunadi Kasnowihardjo, Wasita, Andi Nuralang (ed.), *Sungai dan Kehidupan Masyarakat di Kalimantan*, (Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Komda Kalimantan, 2004), h.94.

pelabuhan atau bandar, yakni suatu tempat di mana syahbandar menempatkan kapal dan segenap anak buah kapal untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang. Pelabuhan bukan asal tempat berlabuh, tetapi tempat di mana kapal dapat berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin dan arus yang kuat. Tempat yang paling baik adalah pada sebuah sungai yang agak jauh letaknya ke dalam. Fungsi pelabuhan ialah sebagai penghubung antar jalan maritim (dalam hal ini sungai dan laut) dan jalan darat. Pelabuhan harus mempunyai daya penarik bagi kapal-kapal dari luar, misalnya pasar yang ramai; di mana makanan, air minum, dan hasil hutan dari perdalaman diperdagangkan untuk konsumsi di kapal. Sementara itu, tentu saja ada korelasi yang kuat antara besarnya volume perdagangan (termasuk persediaan bahan makanan) dengan kekerapan kedatangan atau kunjungan serta jumlah kapal yang singgah di suatu pelabuhan.²⁵

Atmojo juga menegaskan hal yang sama, bahwa di masanya, kawasan pelabuhan Muara Rampiau memang telah memenuhi syarat sebagai suatu tempat yang ideal untuk pelabuhan, tidak hanya sebagai pelabuhan lokal tetapi juga pelabuhan internasional, yaitu terletak pada sebuah teluk yang dalam dan berair tenang, atau di muara sungai besar, atau di tepian sungai besar tetapi agak menjorok di perdalaman. Selain kondisi tersebut, masih ditunjang lagi dengan kemampuan daerah perdalaman (*hinterland*) yang menjadi penyangga untuk memenuhi keperluan pelayaran para pedagang menuju pelabuhan berikutnya, yaitu air tawar dan bahan-bahan makanan, serta mampu menghasilkan komoditi perdagangan yang sangat dibutuhkan konsumen.²⁶

Berdasarkan kenyataan di atas, Muara Rampiau secara khusus telah memiliki kesesuaian karakteristik dengan teori tentang

25 Andi Nuralang, "Sungai sebagai Jalur Utama Aktivitas Perekonomian Masyarakat", h.94.

26 Bambang Sakti Wiku Atmojo, "Faktor Pendukung Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan Kerajaan di Daerah Aliran Sungai di Pedalaman Kalimantan Selatan", dalam Gunadi Kasnowihardjo, Wasita dan Andi Nuralang (ed.), *Sungai dan Kehidupan Masyarakat di Kalimantan*, (Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Kalimantan, 2004), h.35.

pelabuhan, yaitu daerah kawasan atau daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai pelabuhan adalah daerah yang berada di muara sungai, aman, dan terlindung. Sehingga sangat tepat apabila kemudian ditetapkan sebagai pelabuhan utama kerajaan.

Di masanya, pelabuhan Muara Rampiau yang berada pada lokasi sangat strategis karena terletak di muara sungai yang merupakan titik pertemuan antar sungai dan antar pelayaran laut, memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Dipa, tidak hanya dari segi ekonomi-perdagangan, tetapi juga politik, agama, dan kebudayaan, karena terbukanya daerah dan hubungan yang intens dengan dunia luar.

Kemajuan dunia perdagangan Kerajaan Negara Dipa kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Negara Daha (Negara) dengan pelabuhan atau bandar dagangnya bernama Muara Rampiau (Margasari) di masa pemerintahan Raden Sari Kaburangan. Raja inilah yang memindahkan pusat Kerajaan Negara Dipa dari Amuntai (Kabupaten HSU) ke Negara (Kabupaten HSS) dekat Muara Hulak, sehingga kerajaan ini kemudian disebut Kerajaan Negara Daha. Sedangkan pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dipindahkan dari Muara Rampiau (Margasari Kabupaten Tapin) yang berada di segitiga atau pertemuan antara Sungai Negara dan Sungai Tapin ke Muara Bahan (Kabupaten Barito Kuala) yang berada dipertemuan antara Sungai Negara dengan Sungai Barito.

Pada periode Kerajaan Daha, perdagangan terus berkembang walaupun kawasan yang menjadi pusat perdagangan, yakni pelabuhan, dipindahkan dari Muara Rampiau (Margasari) ke Muara Bahan (Marabahan). Berdasarkan catatan seorang ekspedisioner berkebangsaan Denmark, Carl Bock menulis dalam catatan perjalanannya di sepanjang Sungai Barito pada tahun 1878, menurutnya Marabahan-Bakumpai telah menjadi bandar perdagangan penting karena letaknya yang strategis di persimpangan tiga sungai besar (Sungai Negara, Sungai Barito, dan Sungai Kahayan) yang menghubungkan tiga daerah bagi ekspor-impor dari Kalimantan dengan dunia. Sehingga, barang-

barang yang diproduksi dari daerah Negara dan Barito maupun dari Kapuas dan Kahayan masuk dalam perdagangan dunia ketika itu.²⁷

Catatan ini telah telah memberikan gambaran, bahwa di masanya Pelabuhan Muara Bahan yang berfungsi sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan Kerajaan Daha, merupakan kawasan perdagangan internasional yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Di pelabuhan ini, pedagang lokal, baik pedagang Banjar ataupun pedagang Dayak (Bakumpai) berinteraksi dengan pedagang luar dan mereka memperjualbelikan beragam komoditas perdagangan, terutama hasil hutan.

Sjamsuddin juga menjelaskan bahwa, di Pelabuhan Muara Bahan ini pada masa lalu telah diperjualbelikan produk-produk dan hasil hutan dari masyarakat Dayak yang mendiami Kampung Tanah Siang, Murung, dan kampung-kampung di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Melalui perdagangan sungai mereka berkumpul di sekitar kawasan pelabuhan, sehingga pelabuhan dipenuhi oleh berjejernya ratusan perahu dan rakit raksasa yang membawa berbagai komoditi perdagangan. Setelah pelabuhan utama dipindahkan ke Banjarmasin, pelabuhan Muara Bahan tetap memerankan fungsinya yang sangat penting terhadap perkembangan pelbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi pintu gerbang masuk atau menuju ke hulu Sungai Barito dan hulu Sungai Negara dari Banjarmasin, hingga masa kolonialisme Belanda. Misalnya, menurut R. Broersma, antara tahun 1916 hingga 1922, Marabahan telah mengeksport belasan juta tikar melalui pelabuhan Banjarmasin. Puncak ekspor pada tahun 1920 yakni lebih dari 13 juta lembar tikar dengan nilai 380 ribu Gulden.²⁸

27 Z.A.Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.137.

28 Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung*,), h.2. untuk penulis yang sama lihat pula, *Islam dan Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah Pada Abad 19 dan Awal Abad 20*, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Borneo, 2002) dan "Kesultanan Banjar dalam Perspektif Sejarah", *Makalah Seminar*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 16 April 2011.

Menurut Idwar Saleh, Pelabuhan Kuta Arya Terenggana atau Muara Bahan yang menjadi pelabuhan utama pada masa Kerajaan Negara Daha, sejak pemerintahan Raden Sari Kaburangan hingga Pangeran Tumenggung, merupakan bandar dagang yang terpenting dan terutama di Kalimantan Selatan. Disebutkan pula bahwa pelabuhan Muara Bahan yang menjadi pusat perdagangan ini telah ramai dikunjungi oleh banyak pedagang dari daerah lain, bahkan para pedagang yang berasal dari luar negara, yakni Keling-Gujarat (India) dan Tionghoa. Orang-orang Keling dan Tionghoa yang berdagang tersebut kemudian tidak hanya sekadar melakukan interaksi dan hubungan dagang, datang atau kembali ke tempat asalnya, namun banyak di antara mereka yang menetap dan berbaur dengan penduduk lokal. Hasil integrasi ini kemudian menjadikan orang-orang Keling-Gujarat dan orang-orang Tionghoa yang pada mulanya merupakan penduduk dari kawasan Pelabuhan Muara Bahan menjadi bagian dari dan cikal-bakal penduduk Banjarmasin di masa Kesultanan Banjar dan seterusnya.²⁹

Secara khusus, aktivitas pelabuhan Negara Daha sebagai pelabuhan internasional dibuktikan dengan kedatangan pedagang-pedagang, Kaling, Dayak, Cina dan Makassar. Sementara, daerah wilayah kerajaan meliputi Berau, Pasir, Sambas, Sukadana, Belitung, Melawi, dan Kotawaringin. Dengan demikian, selama pemerintahan Kerajaan Negara Daha, penduduk yang mendiami daerah aliran Sungai Negara dan Sungai Bahan penduduknya telah mengalami kemakmuran.³⁰

Pada masa Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha, secara khusus pejabat yang berwenang mengurus masalah perdagangan disebut *Wiramartas* atau *Mantri Pardagang* (dagang). *Wiramartas* berwenang untuk mengatur dan mengadakan hubungan dagang dengan para pedagang asing yang datang

29 M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), h.35.

30 Ita Syamtasyah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19*, (Tangerang: Serat Alam Media, 2012), h.43.

dari luar. “mantri pardagang Wiramartas; ia itu pargaduh Prabajaksa malangbang jang dibawa dari Kaling itu, dan pilang dan gali dan galiung dan gurap dan pargata dan galiut. Wiramartas itu kaumnya ampat puluh”.³¹

Wiramartas adalah seorang yang cerdas, luas pengetahuan, cekatan, dan mengerti beberapa bahasa asing yang biasa digunakan oleh para pedagang yang dominan berdagang di Banjarmasin, misalnya Bahasa Cina atau Bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan oleh Ras ketika menggambarkan tentang sosok seorang Wiramartas di masa Kerajaan Dipa.

“Maka Ampu Djatmaka manjuruh mamanggih hulubalang asal daripada kaluwarganja itu, dinamainja Aria Magatsari, itu panganan kardja, saorang dinamainja Tumanggung Tatah Djiwa, itu jang pangtiwa kardja mamarentah, dan jang mahabisi sagala anakoda jang juru pardagang itu dinamainja Wiramartas — itulah jang banjak tahu akan basa, saparti basa Arab, basa Parsi, basa Walanda, basa Malaju, basa Tjina, basa Djawa tahu ia itu — dan sagala anakoda kapal...”³²

“Kata radja: “Siapa jang patut kita suruh pada radja Tjina mamindjam pandai jang tahu barbuat barhala gangsa itu?” Sambah Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Djiwa: “Pada rasa hamba hanja Wiramartas itu jang patut, karana ia tahu basa Tjina”. Maka Wiramartas itu disuruh pada radja Cina...”³³

Begitu pula gambaran Bondan dalam bukunya *Suluh Sejarah Kalimantan* berkenaan dengan kepandaian seorang yang menjabat Wiramartas di Kerajaan Negara Dipa. Menurut Bondan, *Patih Wiramartas* atau *Mantri Dagang* adalah seorang yang terkenal bijaksana, menyesuaikan haluan pemerintahan terhadap dunia luar, terutama tentang masalah ekonomi. Wiramartas adalah orang yang pandai dan menguasai beberapa bahasa asing, seperti Bahasa Paranggi (Portugis), Bahasa Jawa, Arab, Parsi, dan Bahasa Tionghoa.³⁴

31 J.J.Ras, *Hikajat Bandjar*, h.248.

32 *Ibid.*, h.234.

33 *Ibid.*, h.254.

34 Amir Hasan Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Percetakan Karya, 1953), .h.173.

Keberadaan seorang *mantri pardagang* atau *wiramartas* yang pandai dan memiliki kemampuan berbagai bahasa asing menunjukkan bahwa pada masa itu Kerajaan Dipa telah berhubungan dan memiliki orientasi perdagangan ke luar negeri. Hubungan dagang antara Kerajaan Dipa dengan Cina telah diinformasikan oleh sumber-sumber tua Cina sejak zaman Dinasti Han (Ras, hal 254). Hubungan dagang itu dibangun bukan hanya karena adanya komoditas yang diperdagangkan atau dipertukarkan, tetapi juga dilakukan dengan cara atau menggunakan strategi diplomasi, yakni dengan mengirim utusan atau duta yang memahami bahasa dan budaya Cina, sehingga hubungan baik bisa terjalin kemudian.

Adapun komoditas perdagangan yang dihasilkan oleh Kerajaan Dipa dapat ditelusuri dari bagian cerita mengenai pemberian yang dibawa dan hendak dihandarkan sebagai persembahan kepada raja di Cina tatkala Empu Jatmika mengutus *wiramartas* untuk mencari dan menjemput seorang pandai besi Cina yang ahli dalam membuat patung *gangsang* (kuningan) untuk dijadikan sebagai simbol raja, pemegang kekuasaan atas tahta Kerajaan Negara Dipa.³⁵ Barang persembahan itu adalah khas lokal Banjar, maksudnya dihasilkan dari daerah Banjar dan biasa diperdagangkan pada waktu itu, yang terdiri dari batu permata dan hasil hutan, yakni: intan, mutiara, *jumantan* (zamrud), polam (batu koral merah), batu mirah (batu rubi), biduri (batu oval), lilin, damar, paikat (rotan), madu, dan lain-lain. Sedangkan komoditas yang dimiliki dan didapat dari hasil membeli (barang dari luar) dan barang yang dibawa sebagai hasil pertukaran, antara lain adalah: sabuk atau selendang sutera, kain sarasah, baju bertulis air mas, dan keramik (guci). Adapun persembahan yang diberikan oleh Raja Cina untuk Raja Banjar setelah utusan Negara Dipa kembali, selain para pandai pematung tembaga, juga diikuti oleh sejumlah barang, yakni sekodi imka berwarna merah, kuning, biru, hitam, dan hijau, gendang air emas, gendang, beragam kain

35 J.J.Ras, *Hikajat Bandjar*, h.254.

sutera, mangkuk berukuran kecil dan besar, cupu beragam warna, dan menyan.

Perkembangan dunia dagang di masa Kerajaan Dipa juga dapat ditelusuri dari berita tentang aktivitas dagang para pedagang besar di sana, yakni Dampu Awang dan Ki Mas Lelana sebagaimana disinggung dalam Ras.³⁶ Dijelaskan bahwa seorang pedagang besar dari Surabaya bernama Dampuawang, sekembalinya dari Negara Dipa dan pulang ke negeri asalnya diberitakan bahwa dia telah membawa beragam jenis barang, sebagai hasil perdagangan atau tukar-menukar barang di Pelabuhan Muara Rampiau, seperti damar, lilin, tikar dari rotan, buah galam, pekat, tatudung, emas, rial, ayam sambungan, dan sebagainya. Kemudian, pedagang besar lainnya yang juga berasal dari Surabaya, bernama Ki Mas Lelana ketika tiba di Negara Dipa telah mempersembahkan sejumlah barang untuk Raja Banjar. Barang-barang yang dipersembahkan sebagai tanda pajak tersebut terdiri dari 2 lembar kain batik, 2 lembar kain limar, 2 lembar tapih cangkring patajin, 4 lembar kakamban limar, 1000 buah gula, 100 butir kelapa, 4 tajau minyak kelapa, 2 tempayan asam, 100 tumpuk bawang merah, 10 kampil beras, 4 buah sabuk talik datuk dan kopiah, satabla wayang, gadogan, satabla wayang purawa, satabla topeng, dan sekojan garam.

Perkembangan dagang di masa Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha yang berpusat di hulu Sungai Negara, diteruskan oleh Kesultanan Banjarmasin yang berpusat di Muara Sungai Barito. Sebelum menjadi kerajaan, daerah Banjarmasin dan sekitarnya merupakan tempat tinggal komunitas orang-orang Melayu di bawah pimpinan Patih Masih, sehingga Bandar dagangnya dinamakan *Bandar Masih* dan mereka disebut sebagai orang-orang *Oloh Masih*. Patih Masih adalah orang yang berjasa besar dalam merajakan Raden Samudera dan mendirikan Kesultanan Banjar. Jadi, Patih Masih adalah pemimpin kelompok pedagang *Oloh Masih*, penguasa pelabuhan Banjarmasin, dan

36 *Ibid.*

seorang pedagang besar yang mempunyai hubungan baik dan luas dengan penguasa-penguasa lokal yang lain, termasuk dengan penguasa di Jawa (Surabaya, Tuban), terutama Demak.³⁷ Sehingga ketika dia membantu Raden Samudera untuk mendirikan Kesultanan Banjar, dengan kolega dagangnya, Patih Masih berhasil menarik dukungan dan menyatukan mereka dalam satu gerakan yang sama, yakni Patih Balit dari Balandean, Patih Muhur dari Serapat, Patih Kuwin dari Kuwin, dan Patih Balitung dari Balitung. Patih Masih juga berhasil menarik para pedagang dari luar untuk memindahkan aktivitas dagang mereka ke Pelabuhan Masih Banjarmasin, meminta bantuan para pedagang serta Kesultanan Demak untuk berperang melawan Pangeran Tumenggung penguasa Kerajaan Daha.

Berikutnya, perkembangan Banjarmasin sebagai kota dagang yang maju paling tidak dimulai sejak pemerintahan Sultan Musta'inbillah atau Marhum Panembahan (1595-1620 M). Di bawah pemerintahan Sultan Marhum Panembahan, Kesultanan Banjarmasin merupakan salah satu kerajaan terkuat, sehingga ditakuti oleh daerah dan kerajaan-kerajaan daerah sekitarnya seperti Tuban, Surabaya, dan Mataram. Bahkan, Kesultanan Banjar juga berhasil menguasai dan memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat beserta penghasilan upeti tahunannya. Banjarmasin juga menjadi salah satu pusat dan kota perdagangan yang sangat ramai. Itulah sebabnya, orang-orang dari Cina, Arab ramai berdagang, begitu pula dengan bangsa-bangsa asing, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang tertarik untuk mengadakan hubungan dagang dengan Banjarmasin.

Banjarmasin sebagai pelabuhan dan kesultanan mengalami pasang surut, di mana sampai akhir abad ke-16 peranan Banjarmasin dalam perdagangan di Nusantara belum banyak berarti. Masa keemasan perkembangan Banjarmasin terjadi

37 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning: Sebuah Studi Kasus tentang Kekuasaan dalam Masyarakat Banjar*, (Rantau: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2002), h.v, 40.

pada pertengahan abad ke-17 sebagai akibat meningkatnya permintaan rempah-rempah (lada) di pasar Eropa.³⁸ Pada masa ini, Banjarmasin merupakan salah satu pusat perdagangan dan kesultanan yang berkembang pesat dan dikenal sebagai pelabuhan dagang yang ramai. Banyak kapal-kapal dagang dari berbagai kawasan di Nusantara bahkan luar negara, seperti pedagang dari Jawa, Sulawesi, Cina, Gujarat, dan India yang singgah berlabuh dan berniaga di Banjarmasin pada pertengahan abad ke-17 M. Lopian menjelaskan, pada abad ke-17 ini Banjarmasin merupakan pelabuhan paling terkenal di wilayah Kalimantan sesudah pelabuhan Brunei, sehingga dikunjungi oleh banyak pedagang dari berbagai kawasan dan mancanegara. Hubungan dagang Banjarmasin terutama diadakan dengan kota-kota pelabuhan yang berada di Pantai Utara Jawa. Adapun komoditi dagang yang biasa dibawa oleh para pedagang Banjar, selain dari rempah-rempah (lada), mereka juga menjual batu pertama; seperti emas dan intan, hasil hutan berupa; rotan, damar, dan kayu-kayuan, dan ada pula dari pedagang Banjar tersebut yang menjual perahu kayu buatan Kalimantan yang waktu itu dikenal sangat kuat.³⁹

Komoditas primadona Kesultanan Banjar pada waktu itu tentu saja lada yang sangat diburu oleh para pedagang dari Eropa. Walaupun kelak dalam perkembangannya kemudian, lada yang dalam Bahasa Banjar disebut *sahang* akan menjadi sumber konflik, tidak hanya konflik antara Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda-VOC dan pedagang-pedagang lainnya, tetapi juga konflik-konflik yang terjadi secara intern di Kesultanan Banjarmasin, karena terkait dengan suksesi kepemimpinan dan perebutan kekuasaan.⁴⁰ Menurut Sulandjari, perdagangan lada yang meningkat pada abad XVIII M berpengaruh besar terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi di Kesultanan Banjarmasin. Pada waktu itu, lada merupakan komoditas dagang yang diekspor

38 J. Jahmin, dkk, "Banjarmasin Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", *Laporan Penelitian*, (Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 1995), h.1.

39 Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, h.85.

40 J. Jahmin, dkk, "Banjarmasin Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", h.1.

ke luar daerah dan diminati oleh para pedagang asing. Lada menjadi primadona dan diburu, sehingga mengakibatkan konflik dan berbagai permasalahan besar kemudiannya.⁴¹

Lada dianggap sebagai daya tarik yang mengakibatkan datangnya pedagang asing (Belanda) yang kemudian melakukan monopoli dan kolonialisasi atas Tanah Banjar. Dalam hal ini, menurut Ras, tampaknya nenek moyang penguasa Banjar telah meramal dan mengingatkan dampak dari perdagangan lada bagi Banjarmasin jauh sesudah kehidupan mereka, sehingga melarang rakyat banjar untuk menanam dan memperdagangkan lada, masebagaimana pesan dari Maharaja Surjanata (Kerajaan Negara-Dipa) dan Maharaja Sari Kaburangan (Kerajaan Negara-Daha):

“...Dan satu lagi pasanku: djangan sagala alkah nagri ini bartaman sahang, saparti Djambi dengan Palembang itu. Barangkali nagri ini mandjadikan sahang akan mantjari harta, akan kasugihan. Nistjaja nagri ini achirnja rusak, banjak pitinah dan larang makanan; karena huabnja sahang itu panas, barang jang ditanam tiada pati mandjadi. Parentah huru-hara karena orang kota tiada diupamai oleh orang desa; orang jang kaparak pada radja itu tiada ditakuti oleh sakai jang barsahang itu. Djikalau bartanam sahang, sakira-kira akan dimakan, djangan banjak, kira-kira sapuluh duapuluh tunggulnja saorang-saorang. Astamewah pakumpulannja orang banjak itu mandjadi banjak itu. Adapun djangan tiada-tiada barbuat sungguh-sungguh usahakan tanam itu: padi dan djagung dan hubi, kaladi, pisang. Barang sagala makan-makanan jang lain daripada sahang itu tanam sungguh-sungguh, supaja makmur nagri, suka-ramai, barang kahandak sigra djadi, parentah astilah tahta karadjaan mandjadi karena makanan murah, sagala rakjat tiada sukar mantjari makanan” (Maharadja Surjanata, Kerajaan Negara-Dipa).⁴²

“Dan djangan angkau barikan orang mandjadikan bartanam sahang. Manakal mandjadikan sahang itu sagala tanam-tanaman jang lain itu tiada mandjadi, karena huabnja sahang itu panas. Achirnya larang makan-makanan, Parentah mandjadi huru-hara itu, orang

41 Sulandjari, “Politik dan Perdagangan Lada di Kesultanan Banjarmasin 1747-1787”, Tesis, (Depok: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991), h.3.

42 J.J.Ras, *Hikajat Bandjar*, h.330.

kota tiada ditakuti oleh orang desa. Djangnkan ia takut, hormat pun kurangitu karena ia mahumakan sahang itu. Suruhan radja pun tiada pati ditakutinya itu dan tiada akan tiada achirnja itu parentah madnjadi huru-hara dan banjak pitinah dating pada nagri itu. Hanja bartanam sahang itu kira-kira sapuluh tunggulnja atawa duapuluh tunggulnja akan dimakan sadja itu; astamewah paraba orang banjak itu banjak djadinja itu. Hanja yang patut ditanam didjadikan sungguh-sungguh itu: padi, djagung, hubi, gumbili, kaladi, pisang. Barang makanan jang lain daripada sahang itu harus didjadikan, supaja makmur nagri saraba murah; parentah itu mandjadi karena murah makanan, tiada sukar barang ditjari itu. Jangan saparti Djambi dangan Palembang; karananja rusak sabab mandjadikan sahang itu”(Maharadja Sari Kaburangan, Kerajaan Negara-Daha).⁴³

Perdagangan di Banjarmasin mengalami perkembangan yang signifikan pada abad ke-17 ditandai dengan ramainya para pedagang dari berbagai kawasan ke Banjarmasin. Sehingga dikatakan oleh Lapian bahwa pada masa ini, pelabuhan paling ramai dan terkenal di Kalimantan sesudah Brunei adalah Banjarmasin. Hubungan dagang terutama diadakan dengan kota-kota di pantai utara Jawa. Adapun komoditi yang biasa dibawa oleh para pedagang, selain dari rempah-rempah (lada), mereka juga menjual emas, intan, hasil hutan (rotan, damar, kayu-kayuan), dan ada pula yang menjual perahu buatan Kalimantan.⁴⁴ Begitu juga perkembangan dan hubungan dagang antara Banjarmasin dan Makassar. Menurut Syamtasiyah, hubungan dagang antara Banjarmasin dengan Makassar pada abad ke-17 terjalin dan Banjarmasin menjadi salah satu kota pelabuhan yang masuk dalam lalu-lintas pelayaran niaga dengan pelabuhan Makassar. Dalam jaringan perdagangan ini, di samping hubungan dagang Banjarmasin dengan Makassar, terhubung pula dengan kota-kota pelabuhan lainnya waktu itu, yakni perhubungan dagang yang berlangsung antara lain dari dan ke Manggarai, Timor, Tanimbar,

⁴³ *Ibid.*, h.374.

⁴⁴ Adrian B. Lapian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, h.85.

Alor, Bima, Buton, Tombuku, Seram, Mindanao, Sambuangan, Makau, Manila, Cebu, Kamboja, Siam, Patani, Bali, pelabuhan di pesisir Jawa, Batavia, Batam, Palembang, Jambi, Johor Malaka, Aceh, Banjarmasin, Sukadana, Pasir, Kutai, Berau, dan berbagai kota dagang di wilayah Sulawesi dan Maluku. Adapun komoditas dagang yang diperjualbelikan dalam jaringan dagang Makassar ini antara lain rempah-rempah, kayu cendana, budak, produk India (tekstil).⁴⁵

Munculnya Banjarmasin sebagai salah satu pusat perdagangan di Nusantara pada abad ke-17 disebabkan oleh beberapa faktor penting. Pertama, ekspansi Kesultanan Mataram ke Pantai Utara Jawa yang mengakibatkan matinya perdagangan di kawasan ini, karena ketika ekspansi dilakukan, Mataram telah menghancurkan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan di Pantai Utara Jawa. Ekspansi Mataram ini menyebabkan para pedagang melakukan migrasi secara besar-besaran dan mencari daerah baru yang lebih aman, termasuk ke Banjarmasin (Graaf, 1990:288). Kedua, adanya monopoli perusahaan dagang Belanda, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atas beberapa pusat perdagangan di Nusantara, di mana pada abad XVII VOC telah melakukan monopoli perdagangan di wilayah Aceh, Palembang, Jambi, Banten, dan Makassar. Monopoli Belanda ini menyulitkan para pedagang Cina untuk mendapatkan rempah-rempah berupa lada di bagian barat Nusantara, sehingga mereka mencari kawasan perdagangan baru yang tidak tersentuh oleh VOC, dan itu adalah Banjarmasin (Leur, 1960:5). Ketiga, posisi Banjarmasin yang terletak di antara Laut Jawa di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Timur, sangat strategis untuk perdagangan, membuat Banjarmasin cepat berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam.⁴⁶

Sebab-sebab di atas menjadikan Banjarmasin dan pelabuhannya kemudian berkembang dengan pesat, menjadi kawasan

45 Ita Syamtasyah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19*, h.80.

46 M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.99.

perdagangan yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa dan sekaligus menjadi pusat pengembangan Islam. Sehingga, pengaruh dan perkembangan Islam pun semakin luas dan menyebar keberbagai kawasan sekitar hingga ke perdalaman. Dikatakan bahwa Banjarmasin mengalami perkembangan karena menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari berbagai suku bangsa di Indonesia, sehingga berdampak integratif. Demikian juga dengan kedatangan pedagang-pedagang Asia, misalnya India, Arab, dan Cina, menambah ramainya Pelabuhan Banjarmasin. Pada masa-masa berikutnya semakin bertambah ramai seiring dengan masuk dan terhubungnya perdagangan dengan orang-orang Portugis dan Belanda. Perkembangan Banjarmasin yang melibatkan hubungan-hubungan antar bangsa itu berpengaruh terhadap keadaan politik, ekonomi, dan sosial.⁴⁷ Perkembangan perdagangan tersebut, juga berdampak luas terhadap masuk dan perkembangan agama Islam di Banjarmasin.

Pentingnya pelabuhan, berkembangnya dunia perdagangan, dan masuknya para pedagang di wilayah Banjarmasin, membuat para sultan yang berkuasa pada masa itu mengangkat pejabat khusus yang menangani dan mengatur segala urusan kepelabuhan agar berjalan dengan baik dan jabatan ini merupakan salah satu jabatan penting serta strategis, baik di masa Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, maupun Kesultanan Banjarmasin.

Pada masa Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha, pejabat yang berwenang mengurus masalah pelabuhan dinamakan *Anggarmarta*, yakni seorang pejabat yang diangkat dan bertugas sebagai Juru Bandar atau Kepala Urusan Pelabuhan. "*Dan mandjadikan djuru bandar, nama mantrinja Anggamarta, kaumnja lima puluh*".⁴⁸ Seorang yang menjabat sebagai *anggarmarta* secara khusus bertanggungjawab kepada Sultan Banjar dan diberi wewenang untuk menangani atau mengurus segala urusan terkait dengan pelabuhan, terutama urusan yang berhubungan pedagang

47 J. Jahmin, dkk, "Banjarmasin Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", h.2.

48 J.J.Ras, *Hikajat Bandjar*, h.248.

dan perdagangan. Dalam menjalankan tugasnya, *anggamarta* juga berwenang untuk menetapkan dan mengatur hukum serta tatacara perdagangan yang dijalankan, memberikan izin para pedagang dari luar untuk masuk dan berdagang, menarik upeti atau pajak yang telah ditetapkan, sekaligus pula sebagai pedagang yang menjalankan usahanya atau pemilik modal.

Kemudian, untuk membantu *anggamarta* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengurus perdagangan dan pelabuhan, telah pula dibentuk petugas patroli kerajaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan di pasar pelabuhan yang disebut *pariwara* atau *singabana*, sedangkan komandannya dinamakan *singantaka* dan *singapati*.⁴⁹ Tugas utama mereka adalah untuk melindungi dan memastikan keamanan sehingga perdagangan dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, menjadi tugas dan wewenang mereka pula untuk mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, mereka biasanya melakukan patroli secara rutin dengan berkeliling untuk melakukan pengawasan, terutama daerah-daerah yang penting sebagai aset kerajaan yang harus dilindungi, seperti pelabuhan, pasar, dan sekitar istana, dan lain-lain. Sehingga untuk memudahkan tugas yang dijalankan, pada tempat-tempat terpenting tersebut biasanya dibangun pos jaga atau pos pemantauan. Pos pemantau yang dibangun di kawasan pelabuhan dan pasar berfungsi untuk menjaga dan memastikan keamanan, sekaligus untuk memudahkan pemantauan barang keluar masuk dan mencegah tindak kejahatan atau diperjualbelikannya barang hasil curian atau penyelundupan.

Pada masa awal Kesultanan Banjar, yakni pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1545 M), pejabat yang diangkat secara khusus untuk mengurus masalah perdagangan di pelabuhan adalah kepala pelabuhan, yang disebut *Kiai Palabuhan* atau *Mantri Bandar*. "... dan mandjadikan mantri bandar, namanja *Kjai Palabuhan*. *Tampat bandar pada sungai, dihulunja sungai Kalajan*.

49 J.J.Ras, *Hikajat Banjar*, h.245.

Itulah maka barnama sungai Palabuhan. Mantri bandar barnama Kjai Palabuhan, kaumnja saratus itu”.⁵⁰

Kiai Palabuhan adalah seorang penguasa pelabuhan (semacam kepala bea cukai) yang diangkat oleh sultan dalam rangka dan bertugas untuk memungut bea cukai, mengurus kelancaran perdagangan di pelabuhan, serta mengembangkan (struktur dan infrastruktur) kepelabuhan, agar pelabuhan Banjarmasin menjadi pelabuhan atau bandar yang besar dan maju. Mengingat besarnya tanggungjawab dan beratnya tugas yang harus dilaksanakan, maka pada waktu itu, seorang yang menjabat sebagai Kiai Palabuhan bisa mempunyai sampai seratus orang anak buah untuk menjalankan kegiatan mengurus pelabuhan, perdagangan, dan pemungutan bea cukai di pelabuhan.⁵¹

Pada masa pemerintahan Sultan Inayatullah (1620-1637 M) yang bergelar Ratu Agung, pejabat yang diangkat untuk mengurus segala masalah terkait dengan urusan kepelabuhan seiring dengan pesatnya perdagangan dan ramainya pedagang asing yang datang ke Banjarmasin, adalah *syahbandar* (kepala pelabuhan). Menurut Idwar Saleh, pada waktu itu golongan pedagang asing diterima dengan baik dan mereka diizinkan untuk tinggal menurut kelompok masing-masing berdasarkan daerah asal mereka yang terpisah satu sama lain. Golongan pedagang ini diatur oleh seorang *syahbandar*. Kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan dan semakin banyaknya pedagang asing yang berniaga dan bermukim di Banjarmasin, maka Kesultanan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Inayatullah pun mengangkat seorang pedagang asing untuk menjadi pegawai kerajaan, yakni sebagai *syahbandar* untuk mengatur segala hal terkait dengan pelabuhan. Tentu saja, *syahbandar* adalah seorang yang sangat mengerti seluk-beluk perdagangan dan memahami bahasa asing untuk memudahkan urusannya dengan pedagang yang datang dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-

50 *Ibid.*, h.408.

51 M. Suriansyah Ideham, dkk, (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), h.53.

beda. Sehingga, pada abad ke-17 terkenal seorang syahbandar pelabuhan Banjarmasin bernama Godja Babouw (1635 M) yang berasal dari Gujarat. Ia diberi gelar kehormatan oleh Sultan Banjar dengan gelar *Ratna Diraja* dan pernah menjadi utusan Kesultanan Banjarmasin untuk menandatangani suatu kontrak perjanjian perdagangan dengan Belanda di Batavia.⁵² Menurut Cense, Godja Babouw yang dalam berbagai sumber Belanda disebut *Retna dy Ratya* menjabat sebagai syahbandar di Kesultanan Banjarmasin sampai tahun 1692 dan kemudian digantikan oleh seorang syahbandar Tionghoa.⁵³

Wewenang seorang Syahbandar di masa pemerintahan Sultan Inayatullah ini lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan wewenang Kiai Palabuhan di masa pemerintahan Sultan Suriansyah. Wewenang syahbandar, mengingat pesatnya kemajuan perdagangan dan lingkup tugas yang harus ditanganinya ketika itu, maka tugas dan fungsi syahbandar tidak hanya mengurus masalah pajak, pedagang asing yang masuk, perdagangan yang berjalan, penentuan harga atau nilai tukar barang, dan mata uang yang digunakan, tetapi juga mengatur tempat tinggal para pedagang yang ingin menetap, mengatur pemberian atau persembahan para pedagang untuk sultan, dan lain-lain. Bahkan, dalam hal tertentu seorang syahbandar juga dapat bertindak sebagai wakil sultan, seperti dalam suatu kegiatan perjanjian dagang dengan pedagang-pedagang asing yang datang dari luar, sebagaimana yang pernah dilakukan syahbandar Godja Babouw ketika menjadi wakil Sultan Banjar dalam mengurus perjanjian dagang dengan Belanda-VOC di Batavia.

Pengangkatan, tugas, dan wewenang syahbandar Banjarmasin di masa Sultan Inayatullah tampaknya mengadopsi sistem kesyahbandaran yang berlaku di Malaka, termasuk pengangkatan pedagang atau orang asing sebagai syahbandar, karena pedagang asing tersebut dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan

52 M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, h.35, 39.

53 Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, h.108.

yang luas serta mengerti beberapa bahasa asing yang biasa digunakan, sehingga perdagangan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Lapien menjelaskan bahwa di masa jayanya, Kesultanan Malaka bahkan sampai memiliki empat orang syahbandar sekaligus dan syahbandar yang menempati kedudukan pertama adalah syahbandar yang bertugas memperhatikan kepentingan-kepentingan para pedagang dari Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Pulau-pulau Filipina, sedangkan pedagang-pedagang yang lain, seperti pedagang dari Tionghoa dan dari Pulau-pulau Ryu-Kyu diurus oleh syahbandar khusus.

Berkenaan dengan wewenang dan tugas seorang syahbandar, maka tugas utama seorang syahbandar waktu itu adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, tidak hanya di pelabuhan, tetapi termasuk juga pengawasan di pasar dan gudang. Syahbandar harus mengawasi timbangan, ukuran dagang, dan mata uang yang dipertukarkan, agar tidak terjadi kecurangan atau perselisihan antar sesama pedagang. Apabila tidak ada persesuaian paham antara nahkoda dan para pedagang di salah satu kapal yang berasal dari wilayah syahbandar bersangkutan, maka ia harus jadi penengahnya. Oleh sebab itu, syahbandar biasanya diangkat dari kalangan saudagar-saudagar asing itu sendiri dan pada umumnya yang paling berwibawa di antara merekalah yang menjadi syahbandar, di mana kekayaan yang mereka miliki menjadi ukuran utama dibanding berhasil atau tidaknya ia berdagang. Syahbandar juga bertugas untuk memberi petunjuk dan arahan tentang cara-cara berdagang setempat, menaksir harga barang dagangan yang dibawa, menentukan pajak yang harus dibayar para pedagang, serta bentuk dan jumlah barang yang harus dipersembahkan kepada sultan atau bangsawan kerajaan.⁵⁴

Pada abad ke-17 tersebut, orang asing sebagai syahbandar diberbagai pelabuhan di Nusantara tampaknya adalah sesuatu yang lumrah. Karenanya, selain Malaka dan Banjarmasin yang

⁵⁴ *Ibid.*, h.103.

syahbandarnya adalah orang asing, syahbandar pelabuhan Banten ternyata juga orang asing, yakni seorang yang berasal dari Keling (India).⁵⁵

Berdasarkan kenyataan di atas, secara historis, jauh sebelum kedatangan, monopoli, dan kolonialisme Belanda, perdagangan di Tanah Banjar telah berjalan dan berkembang secara pesat. Interaksi perdagangan tidak hanya melibatkan para pedagang lokal, tetapi juga dengan para pedagang dari kawasan lain, antar pulau, bahkan antar negara (mancanegara). Perdagangan menjadi pemicu utama perkembangan dan kemajuan ekonomi kerajaan serta bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjar.

C. Konflik dan Persaingan Dagang

Perseteruan dan persaingan dagang pedagang Banjar dengan Belanda adalah konflik yang sebenarnya sudah lama terjadi. Apabila pedagang Banjar tidak suka karena monopoli dagang Belanda dan terbiasa bebas dalam berjual beli serta berinteraksi dengan pedagang dari mana pun, sehingga merasa sangat dirugikan oleh berbagai pembatasan dan monopoli Belanda, maka sebaliknya Belanda juga tidak suka dengan pedagang Banjar, karena dianggap licik dan suka menipu.

Ketidaksukaan pedagang Belanda terhadap sikap pedagang Banjar yang dianggap tidak konsisten dan merugikan tersebut menjadi salah satu sumber konflik. Belanda sangat marah dengan sikap ketidakjujuran para pedagang Banjar dan menyebut mereka sebagai pedagang yang tidak dapat dipercaya. Misalnya, apabila ada orang Belanda yang menawar barang dagangan milik pedagang Banjar dan berjanji besok membayarnya setelah kesepakatan harga, tetapi kemudian pada malam harinya ada pedagang lain, seperti pedagang Cina yang menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka pedagang Banjar tadi akan melepaskan barang tersebut kepada pedagang Cina. Sehingga, besok hari ketika orang

55 *Ibid.*, h.110.

Belanda datang dan ingin membayar harga barang yang telah disepakati, maka pedagang Banjar tadi akan mengatakan bahwa barangnya masih di hulu, belum datang, atau alasan-alasan lain yang menjadi sebab dibatalkannya transaksi. Sikap-sikap seperti inilah yang menimbulkan kekesalan para pedagang Belanda. Menurut Bambang, kekecewaan dan kemarahan pedagang Belanda ini kemudian menjadi salah satu sebab terjadinya perseteruan, konflik, dan “Perang Banjar”, dan itu sudah dimulai ketika untuk pertamakalinya kapal-kapal Belanda datang dan menyerang pelabuhan Banjarmasin serta membakar pelabuhan dan kapal-kapal saudagar Banjar yang sedang bersandar ketika itu.⁵⁶

Setidaknya persaingan dan konflik dagang telah terjadi sejak awal perjumpaan pedagang Banjar dengan Belanda. Secara historis, pengenalan pertama pedagang Banjar dengan Belanda terjadi ketika beberapa pedagang Banjar melakukan aktivitas perdagangan di Banten dalam tahun 1596 ketika mereka tidak mau menjual barang dagangan mereka kepada Belanda. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang sombong dan menetapkan sendiri harga beli, sehingga kemudian pedagang Banjar menolak menjual barang dagangan mereka kepada para pedagang Belanda. Sementara itu di pelabuhan Banten berlabuh dua buah *jung* (perahu besar) dari Kesultanan Banjarmasin yang dibawa pedagang-pedagang Banjar. Dua *jung* tersebut memuat lada yang pada waktu itu merupakan komoditas *dagangan primadona* Kesultanan Banjarmasin.

Karena tidak memperoleh lada di Banten, maka akhirnya Belanda merampok lada dari dua buah kapal *jung* pedagang Banjar, padahal kapal *jung* yang membawa lada tersebut di antara pemiliknya (modal) adalah bangsawan dan Sultan Banjar. Peristiwa ini menimbulkan kesan awal bagi pedagang sekaligus Kesultanan Banjar terhadap orang Belanda sebagai kesan yang buruk. Walaupun, bagi Belanda sendiri, pertemuan dengan pedagang-pedagang Banjar tersebut telah menambah informasi mereka tentang asal-usul dan daerah datangnya lada itu, sehingga

56 Bambang Subiyakto, dalam “Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis”, h.72.

timbul keinginan mereka untuk mengetahui daerah Banjarmasin dan mengadakan hubungan dagang.

Melalui VOC-nya, Belanda kemudian berusaha untuk mengadakan hubungan dagang dengan Banjarmasin dan mengirim sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Koopman Gillis Michielzoon pada tanggal 17 Juli 1607 untuk berlayar dan membawa misi dagang ke Banjarmasin. Namun, ketika sampai di Banjarmasin, oleh Sultan Banjar, utusan dan seluruh anggota ekspedisi Belanda ini dibunuh, kemudian harta benda dan kapal mereka dirampas. Oleh Sultan Banjar, hal ini dilakukan sebagai pembalasan terhadap perampokan jung lada yang telah dilakukan oleh Belanda pada kapal dagang bangsawan Banjar ketika mereka berdagang di Banten.

Pada tahun 1612 (ada pula yang menyatakan tahun 1610), kembali Belanda mengirimkan armadanya ke Banjarmasin. Tujuannya kali ini adalah untuk menyerang Banjarmasin dan membalas kematian dari utusan atau ekspedisi pimpinan Gillis Michielzoon tahun 1607. Sampai di Banjarmasin, dari muara Sungai Barito, armada Belanda ini merapat ke arah delta (sekarang disebut Pulau Kembang) dan menyerang Banjarmasin. Lokasi Pulau Kembang yang cukup berdekatan dengan Kampung Kuin (yang waktu itu merupakan pusat permukiman dan Kesultanan Banjarmasin) membuat mereka mudah melakukan penyerangan dan penembakan. Tidak hanya pusat kesultanan, Belanda bahkan juga menembaki perkampungan penduduk yang ada di sekitar Kuin, termasuk Alalak. Penyerangan Belanda ini mengakibatkan hancurnya Banjar Lama atau Kampung Keraton Kuin dan sekitarnya, karena itu, oleh Sultan Musta'inbillah atau Marhum Panembahan (yang merupakan Sultan Banjarmasin ke-4), ibukota Kesultanan Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Sungai Tabuk dan sampai akhirnya ke Kayutangi Martapura (Sartono, 1999:122). Cense dalam *De Kroniek van Bandjarmasin*, juga menegaskan bahwa setelah Keraton Banjar di Kuin dibakar habis oleh Belanda, Banjar Lama (Banjarmasin) ditinggalkan. Pusat pemerintahan dan keraton

dipindahkan ke Pamakuan, kemudian ke Batang Mangapan, ke Batang Banyu dan seterusnya ke Kayu Tangi serta Karang Intan.

Pemidahan pusat Kesultanan Banjarmasin ke Martapura menjadi sejarah asal mula berdirinya Kota Martapura, sebagaimana ditegaskan Ras dalam bukunya *Hikajat Banjar: A Study in Malay Historiography*:

*“Maka Marhum Panembahan manjuruh orang maangkat mambawa lari karadjaan itu. Maka habislah itu orang lari ka Pamakuan. Maka barbuat talutuk, ialah tabing hulin dan ditabas jang basubarangan. Maka Walanda itu didatangi pula. Maka ia itu lari, tiada barani barlawan. Banjak tiada tarsabut itu. Sapuluh tahun di Pamakuan itu pindah pula, handak diam ka Hamuntai, mantuk pada tempat dahulu itu. Baru dalam Marhum Panembahan itu satangah lagi barbuat satangah lagi di rantauan itu hilir pula bardiam di Tambangan (Batang Mangapan). Sapuluh lamanja diam di Tambangan itu pindah pula bardiam di Batang Banju.....lamanja Marhum Panembahan di Batang Banju itu sapuluh tahun....”*⁵⁷

Selanjutnya, seiring dengan pemidahan pusat Kesultanan Banjar ke Kayu Tangi (dekat Teluk Selong Martapura sekarang) dan pemindahan pusat kota ke daerah Pamakuan-Keliling Benteng (Sungai Tabuk) pada Mei 1612, telah memunculkan istilah “Banjar Lama” atau Kota Banjarmasin sekarang dan “Banjar Baru” atau Kota Martapura (ketika Banjarbaru masih menjadi bagian dari Kabupaten Banjar).⁵⁸

Dalam perkembangan berikutnya, Belanda kemudian menyampaikan permohonan maaf atas tindakan mereka merampok kapal dagang Kesultanan Banjar di Banten. Permohonan maaf ini disampaikan oleh Belanda ketika mereka melakukan pelayaran perdagangan ke Brunai pada 4 Juli 1626 dan singgah serta berlabuh di Banjarmasin pada tahun itu. Pada periode ini, yang menjadi Sultan Banjar adalah Sultan Inayatullah atau Ratu Agung bin Marhum Panembahan (1620-1637). Meskipun kesalahan dalam pertikaian antara pedagang Kesultanan Banjar dengan Belanda

57 J.J.Ras, *Hikajat Bandjar*, h.466 dan 468.

58 M. Idwar Saleh, *Sedjarah Bandjarmasin*, (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, 1958), h.42.

telah diperbaiki, namun kontrak dagang yang ditawarkan oleh Belanda selalu ditolak oleh Sultan Banjar. Karenanya, kapal-kapal dagang Banjar berpindah jalur dan lebih suka berhubungan dagang dengan orang-orang atau ke Chocin (Cina) dan dengan orang-orang Bugis di Makassar, sehingga Belanda merasa sangat dirugikan akibat perpindahan jalur dagang ini.

Bulan Juli 1633 wakil Kompeni Belanda G. Corszoon tiba di Banjarmasin untuk melakukan pertemuan dan perjanjian dengan Sultan Banjar, meneruskan pertemuan sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa Belanda akan mendapatkan monopoli dagang di pelabuhan Banjarmasin, untuk itu Belanda bersedia menjamin keamanan pelayaran dan armada dagang orang-orang Banjar terhadap serangan dari Mataram.

Tindak lanjut pertemuan Sultan Banjar dengan perwakilan dagang Belanda dilakukan dengan mengadakan perjanjian dagang yang disepakati pada 4 September 1635. Dalam perjanjian dagang yang dilakukan melalui pertemuan di Batavia ini, Sultan Banjar diwakili oleh Syahbandar Ratna Diraja Goja Babouw (seorang berkebangsaan Keling-India yang diangkat sebagai syahbandar, diberi gelar *Ratna Diraja*, dan orang menjadi kepercayaan Sultan Banjar) sedangkan Belanda diwakili oleh Hendrik Brouwer, Anthonie van Diemen, Jan van der Burgh, dan Steven Barentszoon D. Inilah sejarah awal dari kontrak atau kesepakatan dagang pertama yang diadakan oleh Kesultanan Banjar dengan Belanda, di mana dalam perjanjian dagang ini antara lain disebutkan:

1. Banjarmasin tak akan menjual atau mengekspor ladanya selama di Banjarmasin masih ada orang-orang VOC ataupun kapal-kapalnya;
2. Peminjaman uang sejumlah 3.000 riyal kepada Sultan yang akan dibayar kembali dengan lada seharga 5 riyal sepikulnya;
3. Pinjaman ini yang dibeliakan kepada picins dan barang-barang lainnya atas nama Sultan boleh diangkut tanpa bea oleh kapal-kapal VOC.

Perjanjian atau kontrak dagang yang telah dibuat oleh Sultan Banjar dengan Belanda tidak seluruhnya dipatuhi oleh pedagang Banjar, sebab pada kenyataannya, antara tahun 1660-1661 hubungan kontrak yang telah disepakati sebelumnya sering diabaikan oleh pedagang Banjar. Lada yang menjadi komoditas perdagangan dan telah dikumpulkan oleh pedagang Banjar biasanya langsung dibawa ke Batavia tanpa melalui prosedur beli secara monopoli sebagaimana yang ditetapkan oleh Belanda.⁵⁹

Berikutnya, pada tanggal 17 Juni 1635, Banjarmasin juga kedatangan kapal Pearl Tewseling dan Gregory dari Inggris. Kedatangan kapal dan armada dagang Inggris ke Banjarmasin, menambah permasalahan baru dalam hal perdagangan. Sebab, Inggris ternyata juga meminta untuk diperbolehkan secara resmi ikut berdagang dan mendirikan perusahaan dagangnya di Banjarmasin. Permintaan izin dagang dan beroperasinya perusahaan dagang Inggris di Banjarmasin, tentu saja dianggap membahayakan eksistensi VOC serta usaha dagang Belanda, karena akan terjadi persaingan dagang antara Belanda dan Inggris. Walaupun pada tahun 1702, oleh Sultan Hamidullah (1700-1734 M), Inggris pernah diberikan izin untuk mendirikan kantor dagangnya, *East India Company* (EIC) di Banjarmasin, namun EIC tidak bertahan lama. Sebab, pada tahun 1707, kantor dagang Inggris ini dihancurkan oleh rakyat Banjarmasin atas perintah Sultan Hamidullah sendiri akibat sikap orang-orang Inggris yang hendak menguasai perdagangan di Banjarmasin dan melakukan provokasi perdagangan dengan Makassar. Karena itu, pada akhirnya, Sultan Hamidullah memutuskan hanya memberi izin pada VOC untuk membangun perusahaan dagang, sedangkan permintaan izin dagang Inggris ditolak. Jelas, penolakan terhadap perusahaan dagang Inggris ini dipicu oleh kemarahan Sultan Banjar. Penyebabnya, Inggris telah menghasut orang-orang Makassar yang telah lama menjadi mitra dagang pedagang Banjar untuk menyerang Banjarmasin. Walau demikian, tidak semua

59 M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, h.45.

kerabat istana Kesultanan Banjarmasin menyetujui sikap dan penolakan Sultan Banjar terhadap perusahaan dagang Inggris. Kalangan istana Kesultanan Banjarmasin terpecah menjadi dua kubu dalam menyikapi permohonan izin dagang Inggris dan Belanda, ada yang pro dengan Inggris dan ada pula yang pro dengan Belanda. Tetapi tetap saja, penolakan Sultan Banjar terhadap Inggris membuat Inggris tidak bisa mengembangkan usaha dagang mereka di Banjarmasin. Kapal-kapal dagang Inggris bahkan diperiksa secara ketat dan harus melalui prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan kapal dagang Belanda.

Di tengah pro dan kontra serta persaingan dagang antara Inggris dan Belanda, telah terjadi serangkaian peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang semakin menambah runcingnya konflik antara Belanda dengan Kesultanan Banjar. Idwar Saleh menjelaskan, bahwa pada tahun 1638 terjadi serangkaian pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Belanda, pembakaran loji, dan perampasan barang-barang dagangan di tengah terjadinya persaingan dagang antara Inggris dan Belanda, terjadi gencatan terhadap perdagangan intersuler atau intercontinental Banjar, umpamanya ke Cochin-Cina, dan lain-lain.⁶⁰

Hubungan kontrak dagang antara tahun 1633-1635 dengan VOC pada satu sisi telah menyelamatkan Banjarmasin dari serangan ekspansi Mataram dan memungkinkan Banjarmasin untuk mendapatkan kembali daerah-daerah Pasir dan Kutai sebagai daerah upeti. Namun sebaliknya, monopoli Belanda semakin merugikan perdagangan Banjarmasin, sehingga semakin mempertajam konflik yang telah tumbuh sebelumnya, bahkan terhadap eksistensi Kesultanan Banjar sendiri.

Terbukti, setelah penandatanganan perjanjian atau kontrak dagang dengan Banjarmasin, dalam perkembangannya kemudian, armada dagang dan orang-orang Belanda tidak hanya

60 M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h.31.

aktif dalam perdagangan, tetapi juga turut campur dengan persoalan politik dalam negeri Kesultanan Banjar. Terlebih, ketika Banjarmasin mengalami banyak konflik dan perpecahan intern yang disebabkan oleh perebutan dan persaingan dinasti. Kehadiran dan keikutcampuran Belanda telah mengakibatkan semakin bertambahnya perpecahan di kalangan istana khususnya dan di antara penguasa setempat (keluarga bangsawan). Sultan Banjar yang didukung Belanda pun pada akhirnya tidak dapat menguasai keadaan. Di pihak lain, akibat campurtangan Belanda dalam urusan intern Kesultanan Banjar, semua penghuni kantor perwakilan dagang Belanda di Kayutangi Martapura dibunuh oleh golongan yang anti-Belanda, sehingga semakin menambah konflik dan genting suasana pada waktu itu.

Sultan Tamjidillah (Sultan Banjar) pada masa itu yang berusaha untuk mengalihkan kekuasaan dan hak mewarisi tahta kepada garis keturunannya sendiri (P. Nata Alam), kecuali menunda penobatan P. Mohammad (sebagai pewaris tahta dan pada saat itu berstatus sebagai putra menantu) juga terus berusaha untuk menyingkirkan pesaingnya dalam memimpin Kesultanan Banjarmasin. P. Mohammad yang merasa berhak atas tahta Kesultanan Banjar juga tidak tinggal diam. Menyadari kelicikan dari Sultan Tamjidillah, maka dia pun kemudian mengerahkan dan mengumpulkan pengikutnya untuk bermukim di Tabanio (Tanah Laut) guna menyusun strategi melawan Sultan Tamjidillah. Tabanio digunakan sebagai markas gerakan dan setiap kapal yang melewati perairan Tabanio, terlebih armada dagang Sultan Banjar, selalu dibajak dan dirompak untuk menurunkan paksa muatan yang mereka bawa. Perampasan dan perompakan terhadap kapal-kapal yang lewat perairan Tabanio, oleh P. Mohamad dilakukan tidak hanya untuk memperoleh kekayaan dan menghidupi pengikutnya, tetapi juga untuk melumpuhkan perdagangan dan ketidakstabilan ekonomi di Banjarmasin. Akhirnya, pada 1759, P. Mohammad dan pasukannya berhasil memaksa Sultan Tamjidillah untuk menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepadanya, maka

tanggal 3 Agustus 1759 dia secara resmi naik tahta dengan gelar Sultan Mohammad Aliuddin Aminullah.

Dalam menghadapi situasi konflik intern Kesultanan Banjar ini, Belanda yang sangat licik melalui wakilnya di VOC, Paravinci, menjalankan politik mendua untuk memperoleh keuntungan sekaligus dari kedua pihak, kepada Sultan Tamjidillah maupun kepada P. Mohammad.

P. Mohammad yang berhasil merebut kembali tahta dan dilantik menjadi Sultan Banjar tidak lama berkuasa, pemerintahannya hanya berjalan selama lebih kurang satu tahun, dia kemudian meninggal karena penyakit. Maka, proses unsurpasi tahta Kesultanan Banjarmasin oleh Wangsa P. Nata Alam berjalan terus dengan pengangkatan putra Nata Alam, Sultan Sulaiman Saidullah sebagai Pangeran Mahkota. Dua dari tiga anak Sultan Mohammad Aliuddin Aminullah yang diberikan hak asuhnya kepada Nata Alam, yakni Abdullah dan Rahmat meninggal dibunuh, sedangkan Pangeran Amir yang menyadari kejadian atas saudaranya, dengan alasan meminta izin untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah melarikan diri dan minta bantuan kepada Arung Tarawe di Pasir (Kalimantan Timur). Arung Tarawe yang merupakan pimpinan suku Bugis di Pasir, menyanggupi memberi bantuan pada Pangeran Amir untuk menyerang Martapura dan merebut kembali tahta dari Pangeran Nata Alam (Ideham dkk, 2003:117). Kembali tertadi peperangan dan perebutan dalam Kesultanan Banjarmasin. Peperangan ini dianggap sebagai peristiwa terburuk bagi perkembangan Kesultanan Banjarmasin, sebab dalam peperangan perebutan tahta ini bangsa Belanda dan orang-orang Bugis ikut campur tangan, sehingga timbul sikap antipati orang Banjar terhadap Belanda dan orang-orang Bugis.

Pada tahun 1785 Pangeran Amir dengan bantuan Arung Turawe menyerang Martapura. Peperangan ini melibatkan pertentangan antar suku yang mendukung masing-masing pihak yang bertikai, yaitu suku Banjar dan suku Bugis, juga melibatkan orang Belanda sebagai bangsa yang melegalkan berbagai cara untuk mendapatkan tanah jajahan. Di Tabanio pasukan Bugis Arung Turawe melakukan

pembunuhan terhadap rakyat (yang dianggap pro P. Nata Alam) yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan konflik serta perebutan tahta Kesultanan Banjarmasin, pemusnahan kebun lada yang dianggap sebagai sumber potensial dari perdagangan Kesultanan Banjarmasin dan sumber penghasilan rakyat, menawan rakyat dan selanjutnya dijadikan budak oleh orang Bugis. Peristiwa pembunuhan, pembakaran, pemusnahan, dan pelibatan rakyat umum ini menyebabkan terjadinya pertentangan suku, suku Bugis dan suku Banjar. Sekaligus, menyebabkan pula hilangnya simpati rakyat Banjar terhadap Pangeran Amir (walaupun keturunan yang sah atas tahta Kesultanan Banjar), sehingga rakyat Banjar tidak ada yang membantu perjuangan Pangeran Amir. Peristiwa ini, secara politik sangat merugikan kedudukan Pangeran Amir.

Sementara, untuk melawan serangan Pangeran Amir dan pasukan Arung Turawe, Pangeran Nata Alam telah meminta bantuan dan membuat kontrak baru pada tahun 1787 dengan VOC-Belanda. Tujuannya untuk memenangi perebutan tahta Kesultanan Banjar dan menjaga stabilitas kekuasaannya, agar tetap berada di tangan atau garis keturunannya kelak. Pangeran Nata Alam menyadari bahwa serangan Pangeran Amir dengan pasukan Bugis Pasir Arung Turawe tersebut hanya dapat dilawan oleh pasukan dan kekuatan VOC, karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Nata, selain bahwa dia harus meminta bantuan VOC untuk mengusir dan melawan serbuan Pangeran Amir beserta pasukan yang membantunya.

Dalam perjanjian atau kontrak baru yang dibuat oleh Pangeran Nata Alam dengan VOC-Belanda ini dinyatakan beberapa hal yang semestinya sangat merugikan Kesultanan Banjarmasin. Adapun hal-hal penting dari perjanjian itu adalah:

1. Sultan Banjar menyerahkan daerah kekuasaannya atas Pasir, Laut, Pulo Tabanio, Mendawai, Sampit, Pambuang, dan Kotawaringin pada VOC;
2. Kerajaan Banjar adalah *vazal* (bagian dari) VOC dan sultan cukup puas dengan “uang tahunan”;

3. Pengangkatan Sultan Muda dan Mangkubumi harus mendapat persetujuan VOC;
4. Kerajaan Banjar, hanyalah diperintah oleh keturunan Sultan Nata Alam.⁶¹

Kehadiran pasukan kompeni Belanda dalam membantu Pangeran Nata Alam, dianggap sebagai pasukan penyelamat pemerintahan Pangeran Nata Alam dari kehancuran. Karena itulah dalam butir-butir isi perjanjian kedudukan Kompeni Belanda menunjukkan posisi yang dominan. Sementara, yang lebih tragis lagi adalah posisi Kesultanan Banjar yang hanya sebagai sebuah Kesultanan pinjaman dari milik kompeni Belanda.⁶²

Namun bagi Pangeran Nata Alam, perjanjian ini merupakan sebuah kemenangan diplomasi. Maksudnya, kemenangan diplomasi yang diperoleh Pangeran Nata Alam adalah bahwa kompeni Belanda harus meminjamkan Kesultanan Banjar sebagai pinjaman yang bersifat abadi kepada Pangeran Nata Alam atau keturunannya dan tidak boleh dibatalkan. Kemenangan diplomasi lainnya adalah bahwa walaupun Kesultanan Banjar sebagai kesultanan pinjaman sehingga kedudukannya setengah jajahan, tetapi persetujuan itu menghasilkan keputusan bahwa Kesultanan Banjar menempati kedudukan sebagai kesultanan yang kedudukannya setaraf dengan Kompeni Belanda sebagai kesultanan merdeka.

Belanda dalam perjanjian yang dibuat tersebut harus memberi bantuan penuh dan menjadi pimpinan untuk mengusir pasukan Bugis dari Kesultanan Banjarmasin. Akhirnya, pasukan Pangeran Nata Alam bersama rakyat Banjar dan dibantu oleh pasukan VOC berhasil mengusir pasukan Bugis, dan menangkap Pangeran Amir dan selanjutnya dibuang ke pulau Ceylon (Srilangka). Dalam bayangan Belanda, kemenangan perang ini akan memberikan keuntungan besar; sebab, selain hadiah yang besar berupa konsesi daerah-daerah bawahan, maka hak politik pemerintahan

61 M. Suriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar*, h.117.

62 *Ibid.*, h.117.

Kesultanan Banjarmasin juga berada dalam tangan Belanda dan Kesultanan Banjarmasin tak lebih dari *vazal* Belanda. Tetapi kenyataannya bukanlah demikian, Belanda hanya memperoleh impian dari kemenangan tersebut, karena kalah strategi dari Pangeran Nata Alam.

Setelah meraih kemenangan dan merasa aman dengan kedudukannya sebagai Sultan Banjar, Pangeran Nata Alam selanjutnya berencana dan mengatur siasat untuk mengusir kekuatan Belanda dari Kesultanan Banjarmasin, tidak dengan kekuatan bersenjata tetapi dengan taktik perdagangan, yakni dengan cara membuat kerugian perdagangan Belanda. Sehingga, sejak perjanjian tahun 1787 sampai dengan 1797 melalui taktik politik perdagangannya, Sultan Nata Alam berhasil memainkan peranannya dan merugikan usaha dagang Belanda. Segala rencana perdagangan VOC disabotase, bajak laut dan perompakan sungai diorganisir untuk merampok kapal-kapal dagang Belanda, perdagangan bebas dengan bangsa lain berjalan dengan lebih ramai sehingga VOC tidak berhasil memperoleh monopoli sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak 1787.

Siasat yang paling berhasil yang dilakukan oleh Sultan Nata Alam ialah menghancurkan sentral-sentral kebun lada yang semula menjadi pemasok utama, sehingga populasi produksi lada berada dalam batas minimal. Akibatnya, menjelang tahun 1793 perdagangan lada sangat merosot ditambah dengan bajak laut yang menutup muara sungai Barito sehingga melumpuhkan perdagangan VOC. Kegagalan perdagangan di Banjarmasin ini kemudian secara tegas diakui oleh Belanda dalam tulisan Noorlander:

“Betul-betul licin orang-orang Banjar itu terhadap suatu “Grootmacht” seperti VOC yang telah berpengalaman dua abad lebih mengenai soal-soal Banjar, begitu lamanya mereka dengan diam-diam menyembunyikan sebab-sebab sebenarnya daripada kegagalan pengluasan kekuasaan VOC. Baru lama kemudian setelah perlawanan diam-diam ini tak perlu dirahasiakan lagi,

VOC mengerti bahwa dia telah bertahun-tahun ditipu” (Ideham dkk, 2003:120).

Berikutnya, dalam penilaian Komisaris Francois van Boekholtz terdapat dua masalah utama dari kegagalan perdagangan Belanda di Banjarmasin, yakni: kegagalan terhadap monopoli perdagangan lada yang sebelumnya diharapkan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Kompeni Belanda dan sikap Sultan Banjar yang tidak tulus membalas budi Kompeni Belanda yang telah membantu Kerajaan untuk menghancurkan serbuan Pangeran Amir dengan pasukan Bugis Pasir (Kalimantan Timur).⁶³

Karena itulah, Banjarmasin merupakan pos pengeluaran belaka dan sama sekali tidak mendatangkan keuntungan, bahkan menimbulkan kerugian yang sangat besar, sehingga menjadi beban yang berat bagi Belanda untuk mempertahankan atau melanjutkan hubungan dengan Banjarmasin. Akhirnya, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan perjanjian tahun 1787 mendatangkan kerugian bagi Belanda dan menunjukkan kekalahan diplomasi mereka terhadap Pangeran Nata Alam serta biaya yang dikeluarkan Belanda untuk memenuhi isi perjanjian tahun 1787 tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan Belanda sebelumnya, karena Belanda dihadapkan dengan risiko pengeluaran biaya yang sangat besar, ditambah kewajiban setiap tahun untuk membayar kepada Pangeran Prabu sebesar 250 real dan kepada Ratu Prabu sebesar 50 real. Maka, perjanjian ini akhirnya dihentikan Belanda dan dibuat perjanjian baru pada masa Sultan Banjar yang berikutnya.

Setelah melihat keberhasilan politik yang dijalankannya, maka Pangeran Nata Alam mengirimkan utusan ke Pulau Pinang (Malaysia), pusat perdagangan Inggris untuk berdiplomasi dan bersama-sama Inggris mengusir Belanda dari Kesultanan Banjarmasin. Begitu pula dikirim utusan ke Batavia, supaya VOC meninggalkan Banjarmasin. Akhirnya VOC meninggalkan Banjarmasin. Inilah bukti kemenangan diplomasi Sultan Nata Alam yang menyebabkan Sultan berkuasa atas Kesultanan Banjar

63 M. Suriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar*, h.121.

sebagaimana sebuah kesultanan merdeka tanpa campur tangan kompeni Belanda.

Sultan Nata Alam telah memainkan peranan yang sangat penting bagi politik Kesultanan Banjarmasin dan berhasil mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Kesultanan Banjar dari dominasi kolonialisme Belanda. Tetapi kemenangan ini harus dibayar mahal bagi Kesultanan Banjar; perdagangan merosot akibat kebun lada dihancurkan, sedangkan komoditi lada merupakan salah satu sumber devisa yang terpenting bagi Kesultanan Banjarmasin, sebelum akhirnya Belanda kembali datang dan menguasai Banjarmasin serta menjadikan batubara sebagai primadona kolonialisme baru di wilayah ini melalui perjanjian-perjanjian baru yang dibuat dan dipaksakan kepada Sultan Banjar, seperti perjanjian yang harus ditandatangani oleh Sultan Sulaiman.

Menyadari kekalahan strategi dan diplomasi melawan Sultan Nata Alam, maka pasca wafatnya Sultan Nata Alam, Belanda pun membuat dan mengadakan perjanjian baru pada tahun 1798 dengan Sultan Banjar yang berikutnya, yakni Sultan Sulaiman. Dalam perjanjian yang terdiri dari 13 pasal mengajukan beberapa hal baru yang dilakukan untuk memperbaiki perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, misalnya pada pasal 3 dinyatakan bahwa Belanda menetapkan Sultan Sulaiman Sa'idallah sebagai sultan yang berkuasa memerintah sekalipun atas tanah Belanda dan sultan pulalah yang memelihara wilayah atau tanah kerajaan itu sebagai kepunyaan sendiri. Segala keuntungan dari hasil kerajaan termasuk segala jenis sarang burung dan semua komoditi perdagangan yang sebelumnya menjadi hak Kompeni Belanda, sekarang diserahkan kepada Sultan. Pasal 4 menyebutkan bahwa kedaulatan atas daerah Pasir dan Laut Pulau yang telah diambil Belanda dikembalikan kepada sultan.

Namun, melalui taktik liciknya, dalam perjanjian-perjanjian yang berikutnya, Belanda berhasil memperdaya Sultan Banjar dan memiliki hak untuk mengeksploitasi dan menguasai wilayah Pengaron yang kaya dengan deposit batubara sebagai sumber

energi penting untuk industri dan transportasi (kapal) yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa masa itu. Penguasaan Belanda terhadap Tanah Banjar terus berlanjut dan semakin luas, sampai terakhir pada masa pemerintahan Sultan Adam. Setelah Sultan Adam wafat, Belanda semakin leluasa ikut campur dan menentukan kepemimpinan dalam Kesultanan Banjar, bahkan kemudian mengumumkan pembubaran Kesultanan Banjar pada 1860. Seiring dengan itu, Perang Banjar pun kemudian meletus dengan akumulasi berbagai faktor, terbentuknya *Pagustian* di DAS Barito sebagai kelanjutan Kesultanan Banjar sekaligus meneruskan perjuangan melawan Belanda, bangkitnya perlawanan bersenjata rakyat Banjar terhadap Belanda, terus bersambung sampai periode kebangkitan nasionalisme hingga perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, perdagangan dan pedagang tetap memainkan peranan penting dalam setiap masa tersebut.

D. Jaringan Perdagangan

Perdagangan antar kawasan di Nusantara adalah suatu kegiatan yang sudah berumur lama. Dilakukan silih berganti dan sepanjang zaman, dari satu masa kepada masa yang lain, seiring dengan perkembangan kebudayaan dan masuknya berbagai agama. Sehingga dikatakan bahwa penyebaran agama, terutama Islam, dilakukan seiring dengan terbentuknya jaringan perdagangan di Kepulauan Nusantara dengan bangsa Arab, Persia, dan India. Arnold, ketika mengupas Islam di kepulauan Indonesia mengaitkannya dengan kegiatan dagang para saudagar Arab ke jurusan Asia Timur. Menurut Arnold, sejak abad II sebelum masehi, orang Arab sudah meluaskan perdagangan mereka ke Srilanka. Sejak awal abad ke-7 M kegiatan perdagangan tersebut berlanjut ke Tiongkok melalui laut. Dapat diperkirakan, bahwa orang-orang Arab ketika itu sudah membangun permukiman di beberapa daerah di Nusantara.⁶⁴ Diduga kuat bahwa para

64 Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, (Jakarta: PT. Wijaya, 1981), h.35.

musafir dan pedagang-pedagang dari Arab, Persia dan India telah memperkenalkan Islam di Nusantara, karena sejak abad ke- 5 M Samudera Hindia telah menjadi jalan perdagangan Teluk Persia-Tiongkok yang terus berlanjut pada abad-abad berikutnya.⁶⁵

Kemudian, sejak abad ke-8 M, hubungan Nusantara lebih meningkat menjadi hubungan langsung dengan Arab, dan Samudera Hindia semakin ramai dengan pelayaran dan perdagangan. Pada abad ini juga masa-masa kejayaan Dinasti Abbasiyah (750–1258 M). Suatu hal yang sangat meyakinkan adalah terjadi aktivitas pelayaran perdagangan semakin pesat. Pedagang Arab yang sebelumnya hanya sampai ke India, tetapi pada abad ke- 8 M ini sudah sampai ke Nusantara. Karenanya dapat dikatakan bahwa hubungan Arab dengan Nusantara sudah langsung.⁶⁶

Dampak adanya hubungan langsung antara pedagang asing dan pedagang pribumi maupun antar para pedagang pribumi sendiri, di antaranya adalah munculnya kota-kota pelabuhan atau pesisir. Karena kota-kota perdagangan umumnya berada di pinggir atau tepi laut atau sungai yang dapat dilayari, maka agama Islam pun berkembang pertama kali di daerah di mana terjadinya komunikasi antara bangsa dan komunikasi perdagangan.⁶⁷ Pesisir dan muara sungai tersebut akhirnya menjadi tempat bergaulnya para pedagang dari berbagai pulau di Indonesia dan dari pergaulan itu kemudian terjadi proses integrasi antara masyarakat Indonesia dan para pedagang, termasuk semakin berkembangannya jaringan perdagangan.

Di samping itu, dikatakan pula bahwa kedatangan para pedagang Muslim dari Timur Tengah, India dan berbagai wilayah tersebut di Nusantara telah membawa penduduk pada perkembangan suatu kebudayaan baru yang oleh Pigeaud disebut sebagai “kebudayaan pesisir”, yaitu suatu kebudayaan

65 Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Juz 2, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), h.215.

66 M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.71.

67 *Ibid.*, h.59.

yang berkembang di sekitar perdagangan rempah-rempah internasional pada abad ke-14 sampai abad ke-18, yang semenjak permulaannya telah mempunyai hubungan rapat dengan berkembangnya agama Islam. Kebudayaan pesisir ini memiliki ciri utama kepercayaan dan lembaga Islam serta orientasi ke arah aktivitas pasar atau perdagangan.⁶⁸ Timbal balik dari hubungan tersebut dan gencarnya kontak dengan para pedagang Muslim, baik dari Arab, Persia, maupun Gujarat telah melahirkan kelas orang kaya dan pedagang dengan status yang disegani. Kekuatan armada dagang dan keuangan mereka menjadi sumber kekuatan politik dan militer kearajaan-kerajaan Melayu Islam. Mereka bahkan telah mampu mengembangkan armada laut dan jaringan perdagangan. Walaupun kemudian, pada masa-masa berikutnya lapisan pedagang sebagai kekuatan politik berangsur-angsur tenggelam bersamaan dengan hancurnya kerajaan-kerajaan maritim Nusantara akibat kolonialisme Belanda. Selepas ini, kaum pedagang tidak bisa lagi bangkit dan terus terpuruk.⁶⁹

Memang, dalam catatan sejarah, terbukanya jalur sutera (*silk road*) melalui laut yang menghubungkan Cina dengan Indonesia telah membuat perdagangan semakin ramai. Terlebih ketika komoditi rempah-rempah di pasaran Eropa melambung dan menjadi barang utama yang diperjualbelikan, semakin membuat terbukanya jaringan perdagangan Indonesia dengan dunia luar. Sehingga, jalur sutera (darat) yang ada dalam benak kebanyakan orang adalah lintasan perjalanan darat panjang dari Xi'an hingga ke Konstantinopel, melintasi gurun Taklamakan dan daratan Eurasia; tetapi, seiring dengan perkembangan dunia maritim di Abad Pertengahan, jalur sutera yang kuno ini pun meredup, digantikan oleh lintasan perdagangan baru dari samudera ke samudera. Rute inilah yang dikenal dengan "jalur sutera maritim" (*marine silk road*), di mana lintas perdagangan antar kawasan dan negara terhubung melalui jalur pelayaran di lautan. Para pedagang

68 Hildred Geertz, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1981), h.42.

69 Z.A.Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, h.37.

dari negeri Tiongkok melintasi laut Tiongkok Selatan, sampai ke Semenanjung Malaya, seterusnya mereka melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda, dan menyeberangi Samudera Hindia hingga ke Saudi Arabia, dan Indonesia berada pada jalur yang strategis ini.⁷⁰

Seiring dengan terbukanya jalur sutera melalui laut, maka Indonesia yang waktu itu merupakan daerah potensial penghasil berbagai macam rempah, seperti lada atau cengkeh, pala, kayu manis, kemiri, kopi, kakao, dan lain-lain, telah semakin menarik minat banyak para pedagang dari berbagai belahan dunia, tidak hanya para pedagang dari bangsa Asia (Arab, Persia, India, Cina) tetapi juga para pedagang dari bangsa Eropa untuk datang langsung ke Indonesia. Mereka datang untuk mencari dan membeli rempah-rempah yang menjadi primadona komoditas perdagangan antar negara. kenyataan ini membuat Indonesia menjadi kawasan perdagangan internasional yang sangat ramai dan terbuka; tidak hanya karena komoditas perdagangan yang dihasilkannya, tetapi juga karena letak dan posisinya yang strategis.

Dampak dari terbukanya rute jalur sutera melalui pelayaran dan faktor yang mendorong tumbuh subur dan ramainya perdagangan antara negara di Indonesia, sekaligus masuk serta tersebar Islam, sebagaimana ditegaskan Shaleh Putuhena, dampak tersebut dapat ditelaah dari beberapa hal berikut:

1. Adanya peristiwa Perang Salib (abad 11–13 M), di sela gencatan senjata, terjadi kontak kebudayaan. Tentara Salib senang dengan minyak harum dan rempah-rempah serta barang-barang produksi dari daerah tropis lainnya, sehingga Eropa menerima hasil pertanian dan komoditas Asia, terjadilah kemudian hubungan dagang internasional. Hal ini menambah ramai lalu lintas perdagangan kepulauan Nusantara dengan bangsa Arab;
2. Perkembangan perdagangan di Anatolia Barat turut melibatkan Turki Utsmani dalam perdagangan

70 Singgih Tri Sulistyono, "Rempah-Rempah, Imperialisme, dan Perubahan Peta Kekuatan Maritim di Nusantara Abad XVI-XVII", *Makalah Seminar*, lihat dalam <http://indonesian.cri.cn/201/2012/09/20/1s131407.htm>.

internasional. Ayasolog dan Balat menjadi pusat dagang dari segala penjuru dunia. Pedagang yang berhimpun di Malaka terdiri atas pedagang Muslim dari Kairo, Mekkah, Aden, Abesynia, Kilwa, Malindi, Hormuz, Persia, dan lain-lain;

3. Pada saat Dinasti Ming berkuasa di Cina (tahun 1368 M), pelabuhan ditutup untuk pedagang asing, (imbis dari penutupan ini), maka para pedagang semakin banyak yang mengalihkan jalur perdagangannya ke Nusantara. Seiring dengan itu, Islam turut berkembang dibawa oleh para pedagang.⁷¹

Karena itu, disimpulkan bahwa seiring dengan terbukanya wilayah Indonesia sebagai kawasan perdagangan internasional memicu masuk dan berdatangnya para pedagang dari berbagai kawasan. Misalnya, para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat (India), dan Cina yang telah memeluk Islam, secara langsung mereka pun menyebarkan pengaruh Islam di Indonesia.



Foto 3. Rute Jaringan Perdagangan Kesultanan Banjarmasin.

Dalam konteks ini, jelas bahwa jalur perdagangan dan kaum pedagang memiliki peranan yang sangat besar terhadap

71 M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h.74–75.

perkembangan sosial, politik, sekaligus pula tersebarnya Islam di Kepulauan Nusantara. Di mana, dengan adanya jalur perdagangan, maka memungkinkan dan mendorong datangnya para muballig ke bandar-bandar atau pelabuhan di Indonesia, menetap dalam waktu yang cukup lama di bandar Indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan sampai menunggu pergantian musim, mereka kemudian juga mengenalkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada pedagang lain dan penduduk sekitar pelabuhan, mendirikan permukiman beserta tempat ibadah (masjid), hingga kemudian melangsungkan perkawinan dengan penduduk pribumi yang sudah diIslamkan.⁷²

Antara perdagangan, pelabuhan, dan Islam kemudian saling berintegrasi dan menjadi aspek yang saling terkait. Perpaduan tersebut telah mendorong tumbuhkembangnya ketiga aspek ini secara simultan, sehingga saling menguatkan keberadaan ketiganya dalam sejarah Islam di Indonesia pada masa-masa kejayaan Kesultanan Islam diberbagai kawasan di Indonesia, termasuk Kesultanan Banjarmasin. Misalnya, dijelaskan bahwa pada abad ke-16 M telah terdapat banyak dan bermunculan kota-kota pelabuhan di Sumatera, Jawa, Maluku, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Hubungan perairan di daerah dilakukan dengan memakai perahu kecil, sedangkan pengangkutan lebih lanjut ke pusat-pusat pelabuhan besar dilakukan oleh pedagang dari luar dengan menggunakan kapal-kapal yang lebih besar (*jung*). Pusat-pusat perdagangan abad ke-16 M dapat disebutkan di daerah sepanjang pantai timur Sumatra dan di seberang Selat Malaka, di antaranya Kerajaan Aceh, Lamuri, Arkat, Rupert, Siak, Kampar Tongkal, Indragiri, Klang, Bernam, dan Perlak di pantai barat Semenanjung Malaya.

Kemudian, di pantai barat Pulau Sumatera telah muncul beberapa pelabuhan kecil di antaranya Baros, Tiku, Meulaboh, dan

72 <http://youchenkymayeli.blogspot.com/2012/05/hubungan-penyebaran-agama-islam-dengan.html>.

Andalas. Adapun pelabuhan Pasai, Pidie, Palembang, Priaman termasuk pusat pelabuhan perdagangan tingkat kedua di bawah Malaka. Daerah sekitar Selat Malaka sudah barang tentu masuk daerah pengaruh Malaka, sedangkan Jambi dan Palembang masuk lingkungan Demak. Lampung dan Tulangbawang masuk pengaruh Kerajaan Sunda, sedang Bangka masuk dalam pengaruh Jepara. Dengan munculnya penguasa-penguasa baru pada abad ke-16 M, maka Jepara, Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, Gresik, dan Tuban tumbuh sebagai kota pelabuhan. Maluku merupakan stasiun terakhir dari pelayaran internasional. Daerah Maluku termasuk di antara Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Motir, Jailolo merupakan penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada.

Sedangkan di Kalimantan, pelabuhan yang terkenal adalah Brunei dan menyusul kemudian Banjarmasin yang mencapai masa kejayaannya pada abad ke-17, Sukadana, Sambas, dan lain-lain.

Jaringan perdagangan di Kalimantan sendiri telah berkembang jauh sebelum terbentuknya Kesultanan Banjarmasin. Dimulai sejak masa Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha yang bercorak Hindu di tahun 1400-an dan di awal-awal proses kedatangan dan masuknya Islam di daerah ini.

Meilink-Roelofs menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan dalam kurun niaga sejak sebelum abad ke-15, sudah bersifat besar-besaran, artinya sudah ada *bulk trade*, karena adanya perdagangan beras dan lada yang memerlukan kapal dengan muatan besar.⁷³ Di samping itu, berdasarkan kepada sumber-sumber Cina dinyatakan pula bahwa kapal-kapal dagang Asia Tenggara di masa awal sudah ada yang berukuran besar. Penggalan purbakala yang mutakhir menunjukkan bahwa ada kapal yang panjangnya bahkan sampai 30 meter.⁷⁴ Dalam sumber-sumber sejarah Banjarmasin seperti *Hikayat Banjar*, *Hikayat Lembu Mangkurat*, *Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kotawaringin*, serta *Tutur Candi*, telah disinggung

73 Meilink-Roelofs, dalam Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara*, h.19.

74 Maungin dan Nurhadi, dalam Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara*, h.19.

tentang terbentuknya mata rantai jaringan perdagangan kapal-kapal besar Cina dengan kapal-kapal besar Banjarmasin, yakni jenis Wangkang dan Banawa. Dalam berbagai sumber tersebut dijelaskan pula jaringan dan hubungan dagang antara Banjarmasin dengan Cina, antara Banjarmasin dengan Keling dan Surabaya, Giri, Gresik, dan Kudus di Pulau Jawa.

Muncul dan berkembangnya jaringan perdagangan di Banjarmasin setidaknya telah dimulai oleh Empu Jatmika sebagai anak saudagar Keling, pendiri Kerajaan Negara Dipa (Amuntai) dan Raden Sekar Sungsang alias Ki Mas Lelana, anak angkat juragan Balaba dari Surabaya, pendiri dinasti Kerajaan Negara Daha (Negara). Empu Jatmika membangun bandar di Muara Rampiau, dan telah masuk dalam jaringan perdagangan Majapahit. Ketika Raden Sekar Sungsang memindah dan mendirikan pelabuhan kerajaan di Muara Bahan sebagai kelanjutan dari pelabuhan Muara rampiau, maka pelabuhan Muara Bahan ini sebenarnya telah masuk dalam jaringan dagang pesisir Jawa hingga Malaka dan Singapura. *Hikajat Bandjar* telah menyinggung tentang eksistensi pelabuhan Surabaya, Gresik, dan Giri, misalnya dijelaskan bahwa Surabaya sejak abad ke-14 sudah merupakan pelabuhan dagang yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.

Berikutnya, berdasarkan bukti-bukti arkeologis, berbagai temuan keramik di perairan Sungai Negara dan Sungai Bahan (Marabahan), perbandingan *Hikajat Bandjar* dengan *Tutur Candi*, dan *Babad Demak (Hikayat Demak)*, disertai kedekatan geografis antara Jawa Timur dengan Banjarmasin, juga pesatnya arus perdagangan maritim pada periode abad ke-15, semakin menegaskan ramainya perdagangan di kawasan itu.

Menurut Syamtasiyah, Tanjung Pura dan daerah Matan di Kalimantan Selatan merupakan pusat perdagangan Intan, yang umumnya jatuh ke tangan pedagang dari Cina. Adapun jalur perdagangan intan dari Banjarmasin ketika itu sudah sampai ke

Landak di Kalimantan Barat, dengan melalui Sukadana, Tanjung Pura dari abad ke-16.⁷⁵ (hal.35).

Pada periode berikutnya, masuk dan berkembangnya Islam melalui perdagangan telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan dagang dan jaringan perdagangan antara Banjarmasin dengan berbagai kawasan lain. Setidaknya, pada abad ke-15 geliat penyebaran Islam di Banjarmasin melalui jalur perdagangan telah mulai berlangsung secara intensif. Sunan Giri dan Sunan Bonang dalam abad ke-15 telah berdakwah ke Muara Bahan. Sunan Giri dan Sunan Bonang juga membentuk jaringan perdagangan dengan komunitas Bakumpai, di bawah Raden Sira Panji Kesuma (anak Raden Sekar Sungsang dengan Puteri Kalungsu, Ratu Negara Dipa). Bahkan *Hikajat Bandjar* sangat jelas memaparkan peran Nyai Suta Ageng) Pinatih (yang merupakan ibu angkat dari Sunan Giri) yang telah berperan aktif dalam perdagangan hingga ke Banjarmasin.

Melihat berbagai bukti historis, maka jaringan pedagang dari Surabaya, Gresik, Giri dan Kudus, tidak bisa dilepaskan dari jaringan sosial pedagang-pedagang Cina yang aktif melakukan perdagangan internasional. Pedagang-pedagang Cina dari Kanton ini, tentu telah sampai pula ke Jawa Timur dan aktif berdagang hingga ke Banjarmasin sejak abad ke-15. Sehingga, seiring dengan perkembangan jaringan pedagang Cina (Muslim) dan *muballigh* (penyebarkan Islam) lainnya yang berpusat di Surabaya, Gresik, Giri, dan Kudus, mereka berhasil melakukan Islamisasi di Banjarmasin terhadap orang-orang Dayak Biaju-Ngaju-Bakumpai.⁷⁶

Melalui jaringan dagang tersebut, komunitas Bakumpai berhasil menyerap keahlian dagang para pedagang yang datang. Komunitas pedagang Bakumpai ini kemudian bersama komunitas pedagang dari Negara-Alabio-Amuntai serta Kalua membangun jaringan perdagangan dari hulu-hulu Sungai sampai di perdalaman, ke muara-muara Sungai hingga ke Bandar Masih (Kuin) yang mulai

75 Ita Syamtasyiah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19*, h.35.

76 Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung*, h.45.

berkembang sebagai pelabuhan Kesultanan Banjar pada awal abad ke-16. Dalam perkembangannya kemudian, etnis Dayak Biaju-Ngaju-Bakumpai mengambil peran penting sebagai dinamisator dari perubahan ekonomi, dari ekonomi yang bersifat subsistensi kepada ekonomi perdagangan, di mana dalam menjalankan usaha perdagangannya, mereka tidak hanya menyusuri jalur perdagangan sungai, tetapi juga membangun jaringan perdagangan maritim. Mereka berafiliasi dengan *Bubuhan Tutus Raja-raja Banjar* (bangsawan) dan membentuk hubungan simbiosis dalam menjalankan perdagangan, termasuk dalam menghadapi persaingan dagang dengan Cina dan Belanda.

Sementara aktivitas dagang dari komunitas pedagang Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih (seorang saudagar Melayu), di muara Sungai Barito (Kuin) juga dilakukan secara intensif. Komunitas ini telah pula membangun jaringan dengan komunitas Rantauan Bakumpai, dan jaringan pedagang di sekitar bandar Muara Bahan, serta melakukan komunikasi aktif dengan *Bubuhan Tutus Raja-Raja*, khususnya Pangeran Samudera, sehingga berhasil membangun jaringan kekuasaan baru di Kuin-Bandar Masih menggantikan kekuasaan lama di Negara-Bandar Muara Bahan. Untuk memperkuat legitimasi politiknya, maka kelompok pedagang di Kuin-Bandar Masih ini pun kemudian membangun relasi dan jaringan dengan Kesultanan Demak.

Ketika Kesultanan Banjarmasin didirikan dan kemudian berkembang dengan pesat, komunitas pedagang adalah kelompok yang berperan penting dan mendapat pengayoman secara khusus dari kesultanan. Di antara sebabnya adalah karena Kesultanan Banjarmasin adalah kesultanan yang mengandalkan perdagangan lada, khususnya sejak abad ke-17 dan 18 dan pedagang adalah kelompok utama dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang menjadi penopang utama ekonomi kesultanan pada waktu itu. Dalam perkembangannya, Kesultanan Banjarmasin berhasil membentuk jaringan perdagangan dari daerah pedalaman hingga ke muara sungai, dari muara sungai hingga ke muara sungai Barito, dan jaringan dagang ini langsung bersambung

dengan Laut Jawa.⁷⁷ Kemudian, karena Banjarmasin merupakan Kerajaan Islam, maka dengan sendirinya mudah berhubungan dagang dengan pedagang Muslim dan berbagai Kerajaan Islam yang lainnya di Nusantara.⁷⁸

Jalur perdagangan Kesultanan Banjarmasin pada masa ini telah sampai ke Cochin Cina (Vietnam) dan secara langsung melibatkan pedagang dari Cina, Siam, Johor, Jawa, Palembang, Portugis, Inggris, dan Belanda.⁷⁹ Kemudian diikuti pula oleh para pedagang dari Perancis, Ujung Pandang, dan Banten.⁸⁰

Memasuki abad ke-17, perdagangan di Banjarmasin semakin ramai, karena masuknya pedagang dari Jawa seiring dengan terjadi ekspansi Mataram, jatuhnya Surabaya dan bandar-bandar di sepanjang Pantai Utara Jawa dikuasai oleh Mataram. Jalur perdagangan pun berpindah dan semakin bertambah luas. Apabila semula perdagangan ke Maluku berlangsung melalui rute Gresik, Bali, Sunda Kecil terus ke Banda, maka kemudian berpindah melalui Makassar, Banjarmasin, terus ke Banten dan India. Selain orang Indonesia yang aktif dalam perdagangan di jalur ini, juga diikuti oleh pedagang dari Portugis, Tiongkok, dan India. Di mana dalam melakukan pelayaran dagang menuju Makassar, Maluku dan daerah sekitarnya, mereka melalui Banjarmasin, sehingga Banjarmasin menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang tersebut. Di samping itu, menurut Saleh orientasi perdagangan Banjarmasin pada periode ini ditujukan ke Jawa Timur, Ujung Pandang, Banten, Sumatera sampai Aceh dan Siam.⁸¹

Jahmin dalam laporan penelitiannya menggambarkan dinamika perkembangan dan peranan Banjarmasin sebagai

77 M. Idwar Saleh, *Sedjarah Banjarmasin*, h.54 dan 56; Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara*, h.49; Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), h.39.

78 M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, h.45.

79 M. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan, dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1994), h.74.

80 M. Idwar Saleh, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Samapi dengan Akhir Abad-19*, (Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, 1986), h.14.

81 *Ibid.*, h.14.

pelabuhan perdagangan yang mencapai masa keemasannya pada abad ke-17 dan 18 M. Banjarmasin dianggap sebagai salah satu bagian penting dari jalur sutera perdagangan di Nusantara. Jalur sutera Nusantara, pelayaran dari Asia dengan menyusuri pantai timur Cina, kemudian terus ke selatan akan sampai di Selat Malaka, dari Malaka pelayaran kemudian diteruskan ke Maluku, yang antara lain rutenya adalah melalui Banjarmasin. Sebagai kota pelabuhan yang berada di jalur sutera dan menjadi tempat persinggahan para pedagang, Banjarmasin berperan penting dalam membangun koneksi perdagangan. Pedagang-pedagang dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan di Nusantara saling bertemu di jalur perdagangan ini. Demikian juga pedagang-pedagang dari berbagai negara Asia (Arab, Cina, dan India), bahkan kemudian disusul oleh negara-negara Eropa (Portugis, Belanda, Inggris), sehingga semakin menambah penting dan strategis posisi Banjarmasin. Di samping itu, penelitian ini juga mengetengahkan pembahasan beberapa hal terkait dengan sejarah pelabuhan Banjarmasin dan dinamika yang terjadi di masanya, seperti barang atau komoditas dagang yang diperdagangkan, golongan-golongan masyarakat Banjarmasin, dan keadaan sosial politik serta ekonomi Banjarmasin.⁸²

Berikutnya, pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, pedagang-pedagang Bakumpai dan Negara, terlebih-lebih lagi pedagang-pedagang Banjar dari Alabio, Amuntai dan Kalua telah berhubungan secara langsung dengan para cokung dan pedagang Cina. Akibat berkembangnya perdagangan, maka banyak di antara pedagang lokal yang kemudian mengalami mobilitas vertikal dan juga memiliki posisi strategis sebagai kelompok elit kelas menengah di Banjarmasin. Di antara sebagian mereka kemudian menjadi haji dan ikut mendinamisasi komunitas Banjarmasin. Di masa pergerakan, kelompok pedagang-haji ini telah memobilitas dan menjadi penggerak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Para pedagang Banjar yang terlibat dalam

82 J. Jahmin, dkk, "Banjarmasin Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", h.2.

jaringan perdagangan internasional saat itu dan telah berhasil mengembangkan usaha sampai ke luar Kalimantan dalam jaringan perdagangan internasional, sebagian besar merupakan pedagang Muslim atau para haji, kedudukan mereka menjadi penting terutama setelah peranan pedagang atau saudagar kesultanan menurun seiring dengan merosotnya kekuasaan Kesultanan Banjar akibat dominasi politik Belanda yang semakin menggurita.⁸³

Melihat jauh ke belakang, cikal-bakal perkembangan dagang dan jaringan perdagangan antara Banjarmasin dengan dunia luar, menurut Idwar Saleh memang terjadi jauh sebelum terbentuknya Kesultanan Banjarmasin. Sebab, dari periode Kerajaan Daha, Kerajaan Dipa, sehingga periode Kesultanan Banjarmasin yang merupakan kerajaan maritim sungai telah melakukan berbagai hubungan (termasuk hubungan dagang) dengan kerajaan lain yang ada diberbagai wilayah di Nusantara pada masanya. Akibat dari hubungan dengan kerajaan lain tersebut, maka sangat memungkinkan dan berdampak pada munculnya perdagangan dan pelayaran, perdagangan barter atau penggunaan ekonomi uang, mendorong ekspor hasil-hasil bumi tertentu, Banjarmasin menjadi bandar transito pedagang antara Malaya dengan daerah-daerah timur Indonesia.⁸⁴ Hubungan dagang para pedagang Banjar di masa Kerajaan Dipa atau Kerajaan Daha dengan dunia dapat terjadi karena usaha dagang dan kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika itu sudah berorientasi pasar dan telah menjurus pada terbentuknya kelompok pedagang dan kelompok penguasaha.⁸⁵

Berikutnya, Idwar Saleh juga menjelaskan bahwa, Pelabuhan Kuta Arya Terenggana atau Muara Bahan yang menjadi pelabuhan utama pada masa Kerajaan Daha, sejak pemerintahan R. Sari Kaburangan hingga P. Tumenggung, merupakan bandar dagang yang terutama di Kalimantan Selatan, di mana disebutkan

83 Alfisyah, "Etika Dagang Urang Banjar", h.20.

84 Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, h.28-29.

85 Alfani Daud, *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2000), h.3-4.

pengunjunganya antara lain orang-orang Keling dan Tionghoa. Kronik Banjarmasin menyebutkan adanya orang-orang Keling-Gujarat (India) di Muara Bahan dan kemudian terus berlanjut hingga di Pelabuhan Patih Masih ketika pelabuhan kerajaan dipindahkan ke Banjarmasin. Diberitakan pula bahwa, sebelum Kesultanan Banjarmasin terbentuk, orang-orang Keling-Gujarat sangat besar pengaruhnya di Kesultanan Banjarmasin, maka bukanlah sesuatu yang tidak mungkin apabila pengaruh golongan ini sangat besar di masa pemerintahan R. Samudera ketika bangkit melawan P. Tumenggung penguasa Kerajaan Daha. Demikian pula, berita dari Valentijn yang menyatakan bahwa di awal terbentuk Kesultanan dan Kota Banjarmasin, banyaknya orang-orang Tionghoa yang berdiam di Banjarmasin.⁸⁶

Di Pelabuhan Muara Bahan ini pula pada masa dulu diperjualkan produk-produk dan hasil hutan dari tanah Siang, Murung, dan Kampung Dayak di sepanjang DAS Barito yang lainnya melalui perdagangan sungai dengan berjejanya ratusan perahu dan rakit raksasa. Setelah pelabuhan utama dipindahkan ke Banjarmasin, pelabuhan Muara Bahan tetap memerankan fungsinya yang sangat penting terhadap perkembangan pelbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi pintu gerbang masuk atau menuju ke hulu atau udik Sungai Barito dan hulu Sungai Negara dari Banjarmasin, hingga masa kolonialisme Belanda. Misalnya, menurut menurut R. Broersma, antara tahun 1916 hingga 1922, Marabahan telah mengekspor belasan juta tikar melalui pelabuhan Banjarmasin. Puncak ekspor pada tahun 1920 yakni lebih dari 13 juta lembar tikar dengan nilai 380 ribu Gulden.⁸⁷

Pertumbuhan yang pesat dan ramainya perdagangan antar pelabuhan di Nusantara dengan Kalimantan digambarkan dalam buku *Hikajat Bandjar* yang antara lain menyebutkan bahwa pelabuhan utama Kerajaan Banjar, baik pada masa Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga terakhir di masa Kesultanan

86 Idwar Saleh, *Sedjarah Bandjarmasin*, h.36.

87 Helius Sjamsuddin, *Pagustian dan Temenggung*, h.2.

Banjarmasin, pelabuhan atau bandar selalu ramai dikunjungi oleh para pedagang lokal maupun pedagang dari luar, seperti Jawa, Melayu, Cina, Campa, maupun Keling. Bandar Muara Bahan yang terletak di tepi sungai Barito dan dekat dengan laut Jawa ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru.⁸⁸ Banyaknya orang-orang yang menetap di wilayah Kerajaan Daha dari berbagai penjuru terutama Gujarat dan Melayu, memperkuat dugaan adanya orang Islam yang bermukim di wilayah dan tersebar nya agama Islam karena aktivitas dakwah dan perdagangan yang mereka lakukan. Apalagi hubungan dagang Bandar Muara Bahan dengan bandar-bandar dari daerah lain pada waktu sangat luas dan intens.⁸⁹

Dalam buku *Sejarah Banjar* juga dijelaskan bahwa hubungan dagang antara Malaka, Jawa, Kalimantan, dan Maluku telah diberitakan oleh pelaut Portugis Tome Pires dan Antonio Galvao.⁹⁰ Kemudian, berdasarkan historiografi tradisional masyarakat Banjar, dalam *Hikayat Lambung Mangkurat* dijelaskan bahwa pelabuhan Kerajaan Negara Dipa di Muara Rempiau dan Kerajaan Negara Daha di Muara Bahan sangat ramai didatangi oleh pedagang-pedagang asing. Mantri perdagangan Negara Dipa, Wiramartas dikenal mempunyai keahlian dan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, di antaranya dia pandai berbahasa Cina, Melayu, dan Arab, sehingga mempermudah terjadinya hubungan perdagangan. Para pedagang terdiri dari bangsa-bangsa Nusantara seperti dari pantai utara Pulau Jawa, Palembang, Johor, Malaka, sedangkan orang asing terdiri orang Campa, Cina, Arab, India.⁹¹

Jaringan perdagangan pedagang Banjar semakin ramai dan semakin luas, seiring dengan masuknya agama Islam di daerah ini dan kemudian diteruskan dengan terbentuknya Kesultanan Banjarmasin yang berpusat di muara Sungai Barito-Kuin.

88 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.370; Amir Hasan Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, h.12.

89 A. Hafiz Anshary AZ, "Islam di Selatan Borneo sebelum Kerajaan Banjar", *Orasi Ilmiah*, IAIN Antasari Banjarmasin, tanggal 2 September 2002, h.18.

90 M. Suriansyah Ideham, dkk, (ed.), *Sejarah Banjar*, h.58.

91 *Ibid.*, h.58.

Ketika menjelaskan tentang masuknya Islam ke Banjarmasin, Artum Artha menyinggung bahwa jalur masuknya Islam ke Kalimantan ada dua, yakni melalui Gujarat, Tumasik, Malaka, dan Singapura oleh pedagang Arab dan melalui daratan Cina oleh pedagang Cina, dan ini terjadi sekitar tahun 1250-1295 M.⁹² Hamka juga menyimpulkan bahwa pembawa dan penyebar Islam di Kalimantan Selatan yang berlangsung pada pertengahan atau penghujung abad ke-14 M adalah para pedagang/ulama sebagai hasil dari hubungan jaringan dagang timbal balik antara Singapura-Malaka, kemudian Pasai dan Aceh dengan Kerajaan Banjar, di mana bandar Kerajaan Negara Daha, Muara Bahan merupakan pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai kawasan, terutama pada masa pemerintahan Raja Sari Kaburangan dan Pangeran Tumenggung.⁹³

Menurut Ambary, sejalan dengan semakin bertambah pesatnya hubungan internasional dalam abad ke 7-8 M antara pedagang-pedagang Muslim (Arab, Gujarat, dan Persia) dengan pedagang Cina yang menggunakan lintas laut sebagai jalur perniagaan dengan menelusuri dan melayari Laut Jawa dan Selat Karimata, maka pedagang-pedagang Muslim telah aktif di kawasan Asia Tenggara. Karenanya bukan tidak mungkin Pulau Kalimantan yang mempunyai potensi ekonomi hasil bumi dan intan berlian telah menarik perhatian bagi pedagang-pedagang Muslim untuk menyinggahi beberapa daerah Pulau Kalimantan, sehingga terjadi kontak dagang dengan penduduk lokal.⁹⁴

Terbentuknya jaringan perdagangan, misalnya jaringan perdagangan antara Banjarmasin dengan Surabaya dapat dilihat dari berita tentang kedatangan kapal dagang dari Raden Paku (Sunan Giri) unjungan cara lebih detail, menurut Abdul Muis

92 Artum Artha, "Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan sebagai Pembangunan Sejarah Indonesia", *Makalah Seminar Prasejarah Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 1973.

93 Hamka, (1976). "Meninjau Sejarah Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan", *Makalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 8-9 April 1976.

94 Hasan Mu'arif Ambary, "Catatan tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan Berdasarkan Beberapa Sumber Sejarah", *Makalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 8-9 April 1976.

Raden Paku (Sunan Giri) putra Sayid Ishak pada waktu berumur 23 tahun berlayar ke Pulau Kalimantan di pelabuhan Banjar, membawa barang dagangan dengan 3 buah kapal bersama dengan juragan Kamboja yang terkenal dengan nama Abu Hurairah (Raden Burereh). Sesampainya di pelabuhan Banjar datanglah penduduk berduyun-duyun untuk membeli barang dagangannya, namun kepada penduduk fakir miskin barang-barang itu diberikannya dengan cuma-cuma;

Data-data tentang keberadaan para pedagang Gujarat maupun pedagang Cina yang sudah beragama Islam dan diperkirakan, sekitar awal abad ke 15 dalam perjalanan misi dagangnya, mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Selatan; demikian juga adanya berita tentang pedagang Islam dari Jawa (Raden Paku) yang pernah singgah dan berdagang dan berdagang di pelabuhan Banjarmasin; juga adanya anjuran Patih Masih agar Raden Samudera meminta bantuan kepada Sultan Demak; serta adanya kelompok pedagang dari luar seperti orang Melayu, orang Cina, orang Bugis, orang Makasar, orang Jawa, yang menyatakan membantu Raden Samudera ketika timbul perlawanan terhadap Pangeran Tumenggung; semua itu menunjukkan bahwa agama Islam sudah masuk ke Kalimantan Selatan melalui para pedagang jauh sebelum bantuan dan *penghulu* (ulama) yang dikirimkan Sultan Demak sampai di Banjarmasin.⁹⁵

Berikutnya, berkenaan dengan perdagangan, posisi strategis Banjarmasin yang terletak di antara Laut Jawa di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Timur membuat Banjarmasin cepat berkembang dan menjadi pusat perdagangan pusat penyebaran Islam.⁹⁶ Banyaknya pedagang-pedagang yang datang dari luar seperti pedagang dari Jawa, Sulawesi, Cina, Gujarat, dan India untuk berniaga di Pelabuhan Banjarmasin. Perkembangan Banjarmasin sebagai pelabuhan dagang yang ramai dan mencapai

95 Ramli Nawawi, "Perkembangan Islam Di Kalimantan Selatan Sampai Akhir Abad Ke 18", *Makalah pada Seminar Sejarah Nasional III* di Jakarta, 1981, lihat dalam: <http://ramlinawawitun.blogspot.com/2009/04/perkembangan-islam-di-kalimantan.html>.

96 M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h.99.

puncak kejayaannya dengan banyaknya kapal-kapal dagang dari berbagai kawasan di Nusantara bahkan luar negara yang singgah dan berlabuh di Banjarmasin pada pertengahan abad ke-17 M. Sehingga dikatakan bahwa pelabuhan paling terkenal di Kalimantan sesudah Brunei adalah Banjarmasin. Hubungan dagang terutama diadakan dengan kota-kota di pantai utara Jawa. Adapun komoditi yang biasa dibawa oleh para pedagang, selain dari rempah-rempah (lada), mereka juga menjual emas, intan, hasil hutan (rotan, damar, kayu-kayuan), dan ada pula yang menjual perahu buatan Kalimantan.⁹⁷

Hal terpenting, bahwa pada masa ini, banyak pedagang dari luar yang memindahkan rute pelayaran dan perdagangan mereka dari kota-kota dagang pesisir utara Pulau Jawa ke Banjarmasin. Menurut Ita Syamtasyiah, beralihnya rute pelayaran dan pusat perdagangan Nusantara pada abad ke-17 M tersebut ke Banjarmasin disebabkan oleh beberapa faktor penting.

Pertama, runtuhnya dominasi dan pusat perdagangan di Pantai Utara Jawa, seperti Demak, Tegal, dan Jepara akibat ekspansi wilayah Kerajaan Mataram di masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M), sehingga pedagang Jawa yang tidak mau tunduk kepada Mataram lalu mengadakan hubungan dagang dengan Banjarmasin.

Kedua, berubahnya rute perdagangan, dari Pantai Utara Jawa ke Maluku dengan melalui Kalimantan Selatan dan Banjarmasin menggantikan Gresik untuk pelayaran dari Cina dan India dalam mencari rempah-rempah juga telah memicu perkembangan dan kejayaan pelabuhan Banjarmasin.

Ketiga, pedagang-pedagang Nusantara yang mencari pelabuhan bebas untuk berdagang telah menjadikan Banjarmasin sebagai pusat dan tujuan perdagangan mereka, hal ini dipicu bukan saja karena runtuhnya dominasi perdagangan di Pantai Utara Jawa, tetapi juga karena perdagangan di Jambi yang waktu itu merupakan penghasil lada terbesar di Nusantara (wilayah bagian

97 Adrian B. Lapien, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, h.85.

barat) telah dimonopoli oleh Belanda melalui VOC. Kenyataan inilah yang kemudian menempatkan Banjarmasin sebagai pelabuhan dan sumber penghasil lada terbesar di Nusantara (wilayah bagian tengah) dan yang penting di Asia.⁹⁸

Uka Tjandrasasmita menjelaskan bahwa, letak geografis kota-kota yang menjadi pusat kerajaan bercorak Islam di Nusantara, umumnya berada di pesisir dan di muara sungai-sungai besar, seperti Samudera Pasai, Pidie, Demak, Banten, Ternate, Sombaopu, Makassar, termasuk Banjarmasin beserta dengan pelabuhannya. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota-kota tersebut juga menjadi pusat perdagangan dengan bandar atau pelabuhan yang dibangunnya sebagai penanda dari kerajaan yang bercorak maritim.⁹⁹

Penegasan yang sama dikemukakan Uka Tjandrasasmita, bahwa orang-orang Islam melakukan perjalanan dari Malaka ke Maluku untuk pertamakali lewat pantai utara Jawa dan kemudian melewati daerah-daerah pesisir Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.¹⁰⁰ Karenanya bisa dikatakan bahwa pelabuhan di Kalimantan Selatan pada waktu itu menjadi salah satu pelabuhan persinggahan para pedagang Muslim tersebut sebelum meneruskan pelayaran mereka. Kenyataan demikian, menunjukkan betapa pentingnya posisi dari bandar sebagai pintu masuk persebaran agama Islam dan terjadinya kontak dengan dunia luar.¹⁰¹

Banjarmasin mengalami perkembangan karena menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari berbagai suku bangsa di Indonesia, sehingga berdampak integrative. Demikian juga dengan kedatangan pedagang-pedagang Asia, misalnya India, Arab, dan Cina, menambah ramainya Pelabuhan Banjarmasin.

98 Ita Syamtasyiah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin*, h.6. lihat juga Ramli Nawawi, "Perkembangan Islam Di Kalimantan Selatan Sampai Akhir Abad Ke 18".

99 Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia*, (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2000), h.46. lihat juga Ita Syamtasyiah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin*, h.75.

100 Uka Tjandrasasmita, "Datangnya Islam dan Berkembangnya di Indonesia dalam Kaitannya dengan Asia Tenggara", *Makalah Seminar Internasional Islam di Asia Tenggara*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1986, h.23.

101 Bambang Sakti Wiku Atmojo, *Faktor Pendukung*, h.40.

Pada masa-masa berikutnya perdagangan terus berkembang dan semakin dinamis manakala terjalin hubungan dagang dengan orang-orang Portugis, Inggris, dan Belanda. Perkembangan Banjarmasin yang melibatkan hubungan-hubungan antar bangsa itu berpengaruh dalam keadaan politik, ekonomi, sosial, serta masuk dan penyebaran Islam di Banjarmasin.¹⁰²

Dikatakan pula, semula, Banjarmasin merupakan kota pelabuhan untuk perdagangan insuler dan perdagangan antarpulau. Kapal-kapal dagang Banjar pada waktu itu telah melakukan kegiatan perdagangan keberbagai kawasan; sebelah Utara sampai dengan Semenanjung Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina; ke Selatan sampai dengan Kepulauan Nusa Tenggara, Jawa, Bali, dan Australia. Kemudian pada waktu kegiatan perdagangan lada di Kesultanan Banjarmasin mencapai puncak kejayaan serta masuknya komoditas perdagangan karet dengan pangsa pasar yang luas disertai tingkat permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pabrik besar automotif di Eropa (Inggris, Perancis) pada awal abad ke-19, Belanda kemudian membatasi dan melakukan monopoli perdagangan.¹⁰³

Pada awal abad ke-19 ini pula Banjarmasin telah berkembang sebagai pelabuhan yang penting di kawasan Kalimantan Selatan dan Timur. Kombinasi antara faktor alamiah yang strategis dan kekayaan alam di daerah *hinterland* menyebabkan pelabuhan ini berkembang pesat. Kondisi alamiah pelabuhan Banjarmasin sangat menguntungkan untuk perdagangan karena Sungai Martapura dan terutama Sungai Barito yang sangat luas memungkinkan kapal-kapal besar bisa bersandar. Pelabuhan Banjarmasin menjadi pusat kegiatan ekspor-impor dan sekaligus merupakan pelabuhan transito di kawasan di Kalimantan bagian selatan dan timur. Barang-barang yang diimpor dari Jawa dan Singapura dikumpulkan di Banjarmasin untuk kemudian didistribusikan ke seluruh kawasan ini. Sementara itu, pelabuhan ini juga menjadi

102 J. Jahmin, dkk, "Banjarmasin Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", h.2.

103 Bambang Sakti Wiku Atmojo, *Faktor Pendukung*, h.7.

pusat ekspor untuk komoditi seperti hasil hutan (damar, rotan, kayu jelutung, dan lain-lain), biji besi, intan, dan sebagainya. Barang-barang impor penting misalnya beras (dari Jawa, Siam, dan Saigon), ikan asin, berbagai jenis kain, garam, minyak, barang-barang logam, dan lain-lain.¹⁰⁴

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dikatakan bahwa jalur perdagangan merupakan jalur utama awal masuknya pengaruh agama Islam di Banjarmasin pada abad ke-15. Penegasan ini juga membuktikan adanya jaringan perdagangan yang luas antara pedagang Banjarmasin dengan pedagang dari berbagai daerah yang lain di Nusantara bahwa dengan pedagang asing.

104 Endang Susilowati, "Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan Pada Paroh Kedua Abad XX", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.40.

BAB III

PERLAWANAN TERHADAP MONOPOLI DAGANG BELANDA

Pada abad ke-16, di masa-masa awal berdirinya Kesultanan Banjarmasin, seiring dengan berkembangnya Banjarmasin sebagai pelabuhan dan kota dagang, perdagangan sebagai bagian penting dan kelanjutan dari periode sebelumnya, terus berkembang. Begitu pun pada periode berikutnya, di mana perdagangan di Banjarmasin mengalami masa keemasan pada abad ke-17 dengan berbagai komoditas unggulan, terutama lada. Kapal-kapal dagang Banjar pada waktu itu telah melakukan kegiatan perdagangan keberbagai kawasan. Rute perdagangan pedagang Banjar arah sebelah Utara sampai dengan Semenanjung Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina; arah ke Selatan sampai dengan Kepulauan Nusa Tenggara, Jawa, Bali, dan Australia. Sampai dengan abad ke-18, perkembangan dagang di Banjarmasin terus berjalan dengan semakin bertambahnya pangsa dan jaringan dagang yang terbentuk, di mana jaringan dagangan Banjarmasin tidak hanya kawasan sepulau, kawasan sesama kesultanan Islam, kawasan-kawasan lain di Nusantara, tetapi sudah merambah sambai ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, bahkan terus ke Cina dahn melibatkan banyak pedagang dari mancanegara, termasuk bangsa Eropa; Belanda, Inggris, dan Portugis. Seiring dengan aktivitas perdagangan lada di Kesultanan Banjarmasin yang terus berkembang serta masuknya komoditas perdagangan karet dengan pangsa pasar yang luas disertai tingkat

permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pabrik besar automotif di Eropa (Inggris, Perancis) pada awal abad ke-19, Belanda yang mendapatkan hak dalam mengatur perdagangan melalui kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dengan Kesultanan Banjar kemudian membatasi dan melakukan monopoli perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.¹

Melalui perusahaan dagangnya VOC, Belanda telah melakukan monopoli perdagangan; lada, rotan, damar, dan hasil-hasil tambang, seperti emas dan intan. Akibat monopoli perdagangan Belanda mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Tidak hanya antara pedagang Belanda dengan pedagang Banjar, tetapi juga dengan pedagang-pedagang dari kawasan lain, bahkan dengan pedagang asing, seperti pedagang dari Inggris, Cina, Arab, dan India. Sebab, monopoli Belanda tidak hanya menyangkut masalah barang-barang yang diperdagangkan, akan tetapi juga berkaitan dengan jalur perdagangan yang harus dilewati oleh para pedagang, penentuan nilai tukar barang yang diperdagangkan, sumber atau asal tempat daerah barang didatangkan, izin dan prosedur perdagangan yang dikeluarkan, dan Belanda sebagai pembeli pertama dari setiap barang yang baru datang atau diperdagangkan (terutama) rempah-rempah.

Tentu saja, monopoli dagang dan kekuasaan Belanda yang bertentangan dengan aturan, tradisi, dan sifat dagang orang Banjar telah merugikan dunia perdagangan dan para pedagang (saudagar) Banjar. Batasan-batasan dan peraturan yang ditentukan oleh Belanda telah mengekang dan membuat perdagangan menjadi tidak sehat. Belanda mengatur harga beli dan kewajiban pedagang untuk menjual komoditas tertentu hanya kepada Belanda; sebaliknya para pedagang Banjar juga harus membeli komoditi tertentu kepada Belanda dengan harga yang telah ditetapkan oleh Belanda. Aktivitas dan interaksi pedagang Banjar dengan pedagang dari luar juga dibatasi. Padahal, para pedagang Banjar biasa untuk berdagang sampai ke berbagai daerah, terutama

1 Bambang Sakti Wiku Atmojo, *Faktor Pendukung*, h.7.

Pulau Jawa. Kondisi ini mengakibatkan munculnya konflik dan perlawanan pedagang Banjar terhadap Belanda.

Perseteruan dan persaingan dagang pedagang Banjar dengan Belanda sendiri sebenarnya sudah lama terjadi. Apabila pedagang Banjar tidak suka karena monopoli dagang Belanda dan terbiasa bebas dalam melakukan jual-beli serta berinteraksi dengan pedagang dari mana pun, sehingga merasa sangat dirugikan oleh berbagai pembatasan dan monopoli Belanda, maka dalam taktik penguasaan, kolonialisme, dan monopoli perdagangan, sebaliknya Belanda juga tidak suka dengan taktik dan sikap dari pedagang Banjar, karena pedagang Banjar dianggap licik dan suka menipu.

Ketidaksukaan Belanda, misalnya menyangkut prinsip kebebasan berdagang yang diterapkan oleh pedagang Banjar. Di mana, sejak awal Banjarmasin menjadi pelabuhan dagang internasional, para pedagang atau saudagar Banjar biasa berdagang secara bebas. Para pedagang berdaulat penuh dan akan melepaskan barang dagangannya kepada pembeli berani menawar dan membeli dengan harga tertinggi serta mampu membayarnya secara kontan sesuai dengan kesepakatan. Berkenaan dengan prinsip dagang orang Banjar yang terkadang memindahkan dan mengutamakan pembeli tertinggi dan pembayaran secara kontan harga barang yang telah disepakati ini, dalam pandangan para saudagar asing, terutama Belanda bertentangan dengan konsep pemesan pertama adalah pembeli pertama. Maksudnya, pedagang Banjar sering abai pada semangat atau etika dagang yang biasa berlaku di kalangan perdagangan dunia masa itu, misalnya dalam hal prinsip *first come first served* (siapa yang pertama datang maka dia yang harus dilayani terlebih) atau prinsip bahwa barang dagangan yang telah disepakati penjualannya dan telah dipesan, maka dialah yang berhak memiliki barang tersebut. Sehingga taktik dagang yang diterapkan oleh pedagang Banjar tersebut membuat kesal pedagang Eropa yang bertransaksi dengan pedagang Banjar, karena seringkali mereka tidak bisa membayar secara kontan harga barang yang telah disepakati atau ada pedagang lain yang

menawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga barang yang sudah mereka pesan tidak jadi terbeli.²

Pada kenyataannya, monopoli dagang Belanda bukanlah suatu siasat yang selalu berhasil diterapkan, tetapi pernah mengalami kegagalan, bahkan berdampak pada kerugian yang besar terhadap perdagangan Belanda. Boleh jadi juga kegagalan strategi monopoli perdagangan di Banjarmasin telah berkontribusi terhadap kebangkrutan perusahaan dagang Belanda VOC, yang kemudian dibubarkan. Seperti kerugian yang diderita oleh VOC dan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nata Alam (1787-1801). Strategi yang brilian dari Sultan Nata Alam ditambah dengan kepiawiannya dalam bermain politik serta kepandaianya, dia mampu mematahkan strategi monopoli Belanda, mematahkan perjanjian dan kontrak yang dibuat Belanda, menghancurkan usaha dagang Belanda, serta membuat kerugian besar dengan biaya dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Belanda untuk wilayah Banjarmasin. Walaupun Banjarmasin sendiri mengalami kerugian yang sangat besar, akibat konflik dan kontrak dagang dengan Belanda, karena terjadinya kemerosotan perdagangan, tetapi setidaknya pada periode ini, Sultan Nata Alam telah berhasil mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Kesultanan Banjar dari dominasi kolonialisme Belanda.³

Di samping itu, Monopoli Belanda terhadap perdagangan di Banjarmasin juga bukan tanpa perlawanan dari pedagang Banjar. Banyak pedagang Banjar yang menolak monopoli dagang dan berhubungan dagang dengan Belanda atau bahkan tetap menjalankan tradisi dagang tanpa mengindahkan peraturan dagang Belanda. Hal ini menunjukkan keberanian dan ketidaktakutan pedagang Banjar terhadap kekuasaan Belanda. Jejak perlawanan pedagang Banjar terhadap monopoli dan keinginan Belanda untuk

2 Bambang Subiyakto, "Perdagangan Borneo Tenggara Tempo Doeloe", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 15 Tahun V, November-Desember 2007, LK3 Banjarmasin, h.67.

3 M. Suriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar*, h.122.

menguasai Banjarmasin dapat ditelusuri dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi.

Misalnya, keberanian dari pedagang Banjar ketika menolak melakukan transaksi jual-beli dengan Belanda di pelabuhan Banten pada tahun 1596, karena penawaran Belanda yang terlalu murah terhadap harga lada yang dibawa oleh pedagang Banjar. Akibatnya, Belanda marah, tidak terima, dan kemudian merampok lada dari dua buah kapal jung pedagang Banjar.

Kemudian, pada periode awal kedatangan Belanda ke Banjarmasin dengan tujuan untuk mengadakan kontrak perdagangan, berkali-kali kedatangan mereka ditolak oleh penguasa Kesultanan Banjar, bahkan rombongan pertama kapal dagang Belanda yang berlabuh di Banjarmasin pada 1607, atas perintah Sultan Banjar dibunuh, harta benda dan kapal mereka dirampas sebagai balasan atas perampokan Belanda di Banten pada tahun 1596. Setelah beberapa kali mengirim ekspedisi dan meminta maaf atas perampokan jung lada pedagang Banjar yang pernah dilakukan Belanda di pelabuhan Banten. Belanda kemudian mendapatkan izin berdagang dan berhasil mengikat kontrak atau perjanjian dagang dengan Banjarmasin pada tahun 1635, ketika Kesultanan Banjarmasin berada dalam kondisi kritis dan was-was menghadapi ancaman serangan serta ekspansi Mataram.

Berikutnya, bentuk penentangan dan perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh pedagang Banjar, tampak dari ketidakpatuhan mereka terhadap perjanjian atau kontrak dagang yang telah dibuat oleh Sultan Banjar dengan Belanda. Pada kenyataannya, antara tahun 1660-1661 hubungan kontrak yang telah disepakati sebelumnya sering diabaikan oleh pedagang Banjar. Lada yang menjadi komoditas perdagangan dan telah dikumpulkan oleh pedagang Banjar dari tangan produsennya langsung dibawa ke Batavia tanpa melalui prosedur pembelian secara monopoli sebagaimana yang ditetapkan oleh Belanda.⁴ Padahal dalam perjanjian, salah satu bunyinya dinyatakan bahwa

4 M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, h.45.

Banjarmasin tidak akan menjual atau mengeksport ladanya ke pihak manapun selama di Banjarmasin masih ada pedagang Belanda atau orang-orang VOC ataupun kapal-kapalnya.

Bentuk perlawanan yang lain dimunculkan oleh Banjarmasin sekaligus untuk menahan laju monopoli dan perkembangan dagang Belanda adalah dengan memunculkan Inggris sebagai saingan dagang Belanda. Sehingga kemudian, permohonan izin dagang Inggris dan izin untuk mendirikan perusahaan dagang, *East India Company* (EIC) yang secara langsung telah disampaikan seiring kedatangan kapal Inggris Pearl Tewseling dan Gregory pada 17 Juni 1635, maka pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah (1700-1734 M), yakni pada tahun 1702, Inggris pernah diberikan izin untuk menjalankan usaha perdagangan mendirikan kantor dagangnya. Kehadiran kapal dan perusahaan dagang Inggris sempat membuat konflik dan benturan kepentingan dengan Belanda, sayangnya kehadiran Inggris di Banjarmasin tidak lama, sebab pada tahun 1707, kantor dagang Inggris ini dihancurkan oleh rakyat Banjarmasin atas perintah Sultan Hamidullah sendiri akibat sikap orang-orang Inggris yang hendak menguasai perdagangan di Banjarmasin dan melakukan provokasi perdagangan dengan Makassar, sehingga sempat membuat ketegangan hubungan antara Banjarmasin dengan Makasar.

Pada periode antara tahun 1620-1637, meskipun Kesultanan Banjarmasin terikat kontrak dagang dengan Belanda, namun pedagang Banjarmasin tetap berani melakukan perlawanan, tidak mengindahkan, bahkan memindahkan jalur perdagangan. Jalur perdagangan pedagang Banjarmasin tidak mengikuti jalur perdagangan yang telah ditentukan oleh Belanda, sebaliknya mereka berpindah, membuat jalur baru, dan lebih suka berhubungan dagang dengan orang-orang atau ke Chocin (Cina), kemudian juga dengan orang-orang Bugis di Makassar, sehingga Belanda merasa sangat dirugikan akibat perpindahan jalur dagang ini.

Secara perseorangan, bentuk perlawanan terhadap monopoli dagang Belanda ditunjukkan oleh Ratu Komala Sari (seorang

bangsawan dan saudagar Banjar). Ratu Komala Sari berani menentang kebijakan monopoli Belanda dengan melakukan penyelundupan garam ke Banjarmasin. Tidak tanggung-tanggung, jumlah garam yang diselundupkan oleh Ratu Komala Sari ke Banjarmasin berjung-jung banyaknya. Ratu Komala Sari berani mengabaikan dan tidak mengikuti sistem atau prosedur monopoli perdagangan sebagaimana yang ditetapkan Belanda. Ratu Komala Sari juga berani tidak mengantongi izin untuk mendatangkan garam ke Banjarmasin, padahal Belanda telah mengharuskan setiap kapal yang masuk dan membawa barang ke Banjarmasin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dulu dari Belanda. Belanda kemudian menyebut Ratu Komala Sari sebagai penyelundup yang licik dan saudagar yang tidak jujur, sehingga sebutan terhadap Ratu Komala Sari sebagai penyelundup ini semakin menguatkan anggapan Belanda berkenaan dengan sifat ketidakjujuran dan ketidakkonsistenan dari para saudagar Banjar.

Cap sebagai pedagang yang tidak jujur, pedagang yang tidak bisa dipercaya, dan pedagang yang tidak konsisten bagi pedagang Banjar ini sebenarnya hanyalah dilihat dari sisi kolonial Belanda. Karena, dilihat dari kacamata pedagang Banjar sendiri, sikap, taktik, dan apa-apa yang mereka lakukan dalam hal perdagangan tersebut pada prinsipnya merupakan sistem dan politik dagang yang bersifat bebas dan terbuka. Politik dagang terbuka ini adalah tipikal pedagang murni saudagar Banjar yang tidak ingin ada intervensi politik dari pihak mana pun, tidak dari penguasa pada waktu itu, terlebih dari pihak asing (Belanda), karenanya, harga barang ditentukan oleh penawaran yang tertinggi. Lebih dari itu, dilihat dari konteks gerakan sosial, maka sikap mereka tersebut merupakan perlawanan atas politik dagang dan monopoli Belanda yang telah menjajah dan merugikan perdagangan di Banjarmasin.⁵

Secara lebih luas, bentuk perlawanan masyarakat banjar terhadap monopoli dan kekuasaan dagang Belanda dapat dilihat

5 Bambang Subiyakto, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.72.

dari peristiwa pembakaran sentral perkebunan lada yang berada di Tanah Bumbu dan Muara Uya (Tabalong) sebagai protes masyarakat Banjar terhadap kekuasaan Belanda dan monopoli perdagangan lada waktu itu. Karena tidak ingin ada monopoli dalam perdagangan maka secara sengaja mereka melakukan pembakaran, sehingga pasokan lada menjadi jauh berkurang bahkan kosong di pasaran. Akibatnya, Belanda tidak bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar Eropa terhadap lada. Berkenaan dengan pembakaran kebun lada ini dilatari oleh keinginan monooli Belanda yang tidak saja meliputi jalur perdagangan, akan tetapi juga hingga ke hulu tempat sumber barang-barang dagangan yang diperjualbelikan berasal. Karena Belanda ingin memonopoli, akhirnya, sentra lada yang ada di Tanah Bumbu dan Muara Uya dibakar oleh masyarakat, mereka tidak rela Belanda menguasai perdagangan lada.⁶ Tujuan dari pembakaran ini sebetulnya adalah untuk mengurangi produksi lada sehingga Belanda tidak bisa memeunhi permintaan pasar. Ketika permintaan pasar terhadap lada yang telah dimonopoli Belanda, maka pedagang Banjar yang telah memindahkan sumber-sumber penghasil lada ke arah perdalaman dapat menggantikan kedudukan Belanda dengan menjual lada secara langsung kepada pedagang asing yang lain, misalnya Cina atau Inggris. Ini menjadi salah satu taktik dan strategi dagang yang teah diterapkan sejak awal pedagang Banjar menjalankan aktivitas perdagangan mereka.

Monopoli dagang Belanda juga menyebabkan pedagang Banjar merubah strategi dagang mereka. Ketika sistem monopoli itu diterapkan para pedagang Banjar pun bergerak secara aktif menyusuri Sungai Negara dan Sungai Barito menggunakan perahu kecil untuk membeli secara langsung komoditas dagang. Barang-barang tersebut dikumpulkan secara langsung dari penjual tangan pertama dan setelah terkumpul, semua barang dipindahkan ke perahu yang agak besar untuk selanjutnya dibawa menggunakan jalur tersendiri yang jauh di luar jangkauan dan pengawasan

6 Bambang Subiyakto, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.72.

Belanda menuju pelabuhan atau sentral dagang yang masih bebas. Barang dagangan tersebut kemudian mereka perjualbelikan secara langsung dengan pedagang-pedagang yang lain.

Jelas, apabila yang dilakukan oleh para pedagang Banjar, seperti membuat rute baru perdagangan, memasok dan mendistribusikan secara langsung, mendapatkan barang secara langsung ke perdalaman atau sentral-sentral produksi, menjual secara langsung barang dagangan kepada pedagang asing yang lain (pedagang Cina), ataupun berhubungan dagang dengan pedagang Inggris untuk menjadikan saingan dagang Belanda, adalah bagian dari strategi dagang dalam rangka perlawanan terhadap monopoli dagang Belanda. Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh Ratu Komala Sari dan ataupun masyarakat pedagang Banjar yang lain ketika mereka menolak meminta perizinan dagang dari Belanda, membayar pajak barang dagang, para pedagang Banjar melakukan penyelundupan barang dagangan, menghancurkan perkebunan lada untuk pengurangan pasokan, dan lain-lain, maka usaha-usaha tersebut sebenarnya merupakan bentuk perlawanan dari para pedagang lokal yang anti terhadap monopoli Belanda dalam perdagangan, karena sistem monopoli sangat bertentangan dengan tradisi dagang orang Banjar yang menganut sistem dagang terbuka.⁷

Itulah sebabnya, tepat apabila dikatakan bahwa sikap berkuasa dan monopoli perdagangan oleh Belanda menjadi salah satu faktor utama pemicu pecahnya Perang Banjar. Karena, monopoli perdagangan ini diikuti dengan penguasaan Belanda atas wilayah tertentu di Tanah Banjar sebagai hasil kompensasi dan strategi licik mereka dalam mengikutcampuri urusan intern di Kesultanan Banjar. Nampak, apabila tujuan semula, Belanda datang ke Banjarmasin untuk berdagang dan bersaing secara bebas dengan pedagang Banjar dan pedagang dari berbagai kawasan lain

7 Noorhalis Majid, "Pasar Besar vs Pasar Rakyat", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.11.

hanyalah kedok untuk Belanda melakukan kolonialisasi Tanah Banjar.

Tujuan utama Belanda atas Tanah Banjar tersebut dapat dilihat dari kegigihan dan upaya yang terus-menerus mereka lakukan untuk menguasai perdagangan di Banjarmasin. Belanda membujuk dan mendekati Sultan Banjar untuk mendapatkan izin dan hak monopoli dagang. Akhirnya, pada tahun 1635 dibuatlah kontrak atau kesepakatan dagang pertama antara Kesultanan Banjar dengan Belanda (Sartono, 1999:383). Konsekuensi dari kesepakatan dagang itu, Belanda bersedia menjamin keamanan pelayaran dan armada dagang orang-orang Banjar terhadap serangan dari Mataram dan Sultan Banjar mendapat pinjaman dana yang cukup besar, sedangkan Banjarmasin harus menjual atau mengekspor ladanya hanya kepada VOC. Walaupun monopoli perdagangan Belanda pernah mendapatkan saingan dari Inggris, namun dalam perkembangan berikutnya Belanda tetap dianggap pihak yang menang dan menguasai Tanah Banjar.

Awal kolonialisme Belanda atas Banjar dapat dilihat dari kesepakatan dagang yang ditandatangani pada tahun 1635 yang merupakan kontrak dagang yang pertama bagi Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda. Kontrak dagang ini oleh para ahli dianggap sebagai proses dan jalan Belanda mengawali monopoli perdagangan, sekaligus penguasaan mereka terhadap Banjarmasin. Sebab, setelah penandatanganan kontrak dagang Belanda, dalam perkembangannya kemudian, armada dagang dan orang-orang Belanda tidak hanya aktif dalam perdagangan, tetapi juga turut campur dengan persoalan politik dalam negeri Kesultanan Banjar. Terlebih, ketika Banjarmasin mengalami banyak konflik dan perpecahan intern yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Kehadiran dan keikutcampuran Belanda telah mengakibatkan konflik dan perpecahan di antara keluarga bangsawan. Konflik dan perpecahan serta campurtangan Belanda ini terus berlanjut sampai akhirnya Kesultanan Banjar dihapuskan dan Belanda secara *de facto* berhasil menguasai wilayah Banjar.

Melalui kekuasaannya atas Tanah Banjar, Belanda dapat menerapkan sistem monopoli perdagangan secara menyeluruh pada barang-barang dagangan yang laku dipasaran internasional, terutama lada yang ditanam di wilayah Kerajaan Banjar. Belanda mulai membatasi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sultan-sultan bersama keluarganya atau saudagar-saudagar pribumi yang kaya raya berasal dari rakyat biasa. Belanda memaksa Sultan Banjar, bahwa segala lada yang ditanam di perbatasan wilayah Kesultanan banjar harus dijual dan diserahkan kepada Belanda dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan. Belanda mengadakan larangan penanaman lada dan cengkih di dalam wilayah kerajaan yang dipinjamkan. Oleh karena itu, Belanda dengan para petugas yang diperintahkan oleh sultan-sultan mengadakan pengawasan ke daerah-daerah untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Jika terdapat pelanggaran, maka para petugas yang berpatroli harus memusnahkan semua jenis tanaman tersebut. Di samping itu, Belanda juga melarang penduduk pribumi mengadakan transaksi perdagangan barang dagangan terlarang dengan bangsa lainnya, dan juga melarang penduduk pribumi untuk membawa ke luar barang dagangan tersebut dari wilayah Kesultanan Banjar. Pengawasan Belanda dilakukan secara ketat pada aktivitas perdagangan para sultan bersama keluarganya atau para saudagar pribumi yang menyimpan atau menimbun dan memperdagangkan jenis-jenis barang dagangan yang dilarang Belanda.⁸

Sistem monopoli dagang terhadap lada yang diproduksi di wilayah Kesultanan Banjar melalui pengawasan ketat telah berlangsung sejak Kesultanan Banjar menjadi milik Belanda (1878) dan bahkan sebelumnya. Kegiatan perdagangan para sultan atau penguasa lokal dan saudagar pribumi yang kaya raya pun mengalami kemerosotan, bahkan kematian. Dengan demikian, masyarakat Banjar yang semula telah mengembangkan kegiatan perdagangan dalam negeri, insuler, dan internasional kemudian

8 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning*, h.57.

meninggalkan profesi mereka dan mereka kembali menjadi petani dan mengelola pertanian kembali. Jadi, pada masyarakat Banjar terjadi proses menjadi masyarakat petani kembali sebagai akibat sistem monopoli perdagangan yang mutlak diterapkan oleh Belanda.⁹

Bahkan, dalam abad ke-19, ketika terjadi revolusi industri dan batubara digunakan sebagai bahan bakar kapal-kapal Belanda, dan di wilayah Kesultanan Banjar banyak ditemukan batubara, seperti di Pengaron yang telah ditambang oleh penduduk pribumi secara tradisional, maka Belanda pun kemudian mengambil alihnya sebagai wilayah konsesi melalui perjanjian dengan Sultan Adam, kemudian mendirikan pertambangan batubara, *Orange Nassau*, pada 1849. Padahal, pengeksploitasian wilayah pertambangan batubara di wilayah Kesultanan Banjar oleh Belanda pada dasarnya adalah suatu usaha untuk merebut sumber perekonomian masyarakat Banjar yang baru pada pertengahan abad 19 hingga seterusnya. Dengan demikian, masyarakat Banjar telah kehilangan kembali sumber perekonomian yang utama untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dari monopoli perdagangan lada hingga pengeksploitasian pertambangan batubara yang berkangsung dari abad 18 hingga abad 19 mengakibatkan serangkaian penindasan Belanda terhadap masyarakat Banjar. Penindasan ekonomis oleh Belanda ini diikuti oleh penindasan kelompok yang memerintah terhadap penduduk pribumi. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya sumber kehidupan keluarga keraton Kesultanan Banjar, yang semula diperoleh dari pajak perdagangan, pajak penghasilan pertanian, hasil produksi perorangan, dan barang-barang impor serta tambang emas dan intan yang telah diambil alih oleh Belanda.¹⁰

Penguasaan terhadap daerah Pengaron sebagai tanah konsesi dan dibangunnya tambang batubara *Oranje Nassau* pada tahun 1849 menjadi simbol penguasaan dan dimulainya kolonialisasi

9 *Ibid.*, h.58.

10 *Ibid.*, h.58.

Belanda di Tanah Banjar. Karena, setelah penguasaan wilayah tambang batubara di Pengaron secara penuh, dengan licik Belanda juga merencanakan untuk terus merebut dan menguasai wilayah-wilayah Tanah Banjar yang memiliki deposit batubara, seperti Sungai Durian dan tanah Laut. Dalam menjalankan rencananya ini, Belanda telah menggariskan beberapa kebijakan terhadap wilayah Banjar. Itu sebab, dengan harapan mendapat tanah konsesi dan kontrak perjanjian baru, Belanda mengatur strategi agar konflik politik di Kesultanan Banjar terus bergejolak; Belanda membantu pihak Kesultanan Banjar yang pro dengan mereka, mau mengikat perjanjian, memenuhi kewajibannya sesuai kontrak perjanjian yang telah disepakati, serta mengizinkan dan tidak menghambat produksi tambang batubara Belanda. Agar bebas menjalankan misinya, maka di akhir pemerintahan Sultan Adam, Belanda pun mengangkat P. Tamjid sebagai Sultan Banjar yang pro Belanda sampai akhirnya menghapuskan Kesultanan Banjar pada 1860.

Dapat disimpulkan bahwa otomatis sejak Kesultanan Banjar dihapuskan, Belanda secara *de facto* berhasil menguasai wilayah Banjar, terutama wilayah-wilayah penting yang dianggap produktif dan memberi keuntungan besar, misalnya daerah penghasil batubara, emas, intan, hasil hutan (karet, rotan, damar, dan lain-lain), atau daerah perkebunan rempah (lada, pala, cengkih, dan lain-lain).

Penguasaan Tanah Banjar, monopoli perdagangan, politik pecah belah, penghapusan Kesultanan Banjar dan menjadikannya sebagai bagian dari daerah jajahan Hindia Belanda, memicu munculnya perlawanan rakyat Banjar. Akhirnya, berbagai elemen masyarakat bangkit dan berjuang untuk melakukan perlawanan dan menentang kebijakan, penguasaan, kekuasaan, dan berbagai kepentingan Belanda. Karena itu, momentum Perang Banjar yang dimulai sejak 1859 menjadi periode yang sangat penting bagi kelompok pedagang Banjar dengan berbagai latar belakang (dan di antaranya juga ada dari kalangan bangsawan bahkan Sultan Banjar sendiri) untuk menunjukkan kekuatan dan perlawanan mereka terhadap kolonialisme Belanda. Karena, Perang Banjar

sendiri pada akhirnya tidak hanya dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat Banjar, tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak terbatas pada satu wilayah (kedaerahan) atau temporal, tetapi bersifat luas, dilakukan dilakukan secara serentak, wilayah gerakan meliputi seluruh wilayah Banjar, dan dilakukan dengan taktik dan strategi serta dikoordinasi oleh pimpinan perlawanan yang telah ditunjuk. Itulah kenapa, Perang Banjar terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, dan klaim Belanda yang menyatakan Perang Berang hanya terjadi dari tahun 1859-1862 serta penguasaan mereka terhadap Tanah Banjar sejak tahun itu tidak bisa diterima, bahkan mendapat kritikan yang keras dari para peneliti dan penulis sejarah. Menurut mereka, penguasaan Belanda atas Tanah banjar sebenarnya hanyalah pada kawasan-kawasan luar atau daerah yang sudah terkenal, sementara daerah perdalaman yang jauh, cenderung bebas dari pengaruh dan kekuasaan Belanda. Terbukti, selama puluhan tahun lebih, gerakan perlawanan rakyat di bawah pimpinan P. Antasari dan diteruskan oleh anak cucu, keturunan serta pengikutnya yang bergerilya dan bermarkas di perdalaman Sungai Barito, dengan membetuk *Pegustian dan Temenggung* (sebagai kelanjutan dari Kesultanan Banjar) baru bisa dikalahkan Belanda pada tahun 1905. Kekalahan kelompok perlawanan Banjar di bawah pimpinan Sultan Muhammad Seman dengan hancurnya markas *Pegustian dan Temenggung* di Menawing-Barito serta terbunuhnya Sultan Muhammad Seman dalam peperangan tersebut, barulah gerakan perlawanan periode awal (pra kemerdekaan) ini dianggap berakhir. Sampai kemudian periode perlawanan ini diteruskan lagi oleh gerakan rakyat Banjar setelah munculnya kesadaran nasional untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari jajahan dan kolonialisme Belanda.

BAB IV

PEDAGANG DAN PERDAGANGAN PEMICU PERLAWANAN

Perdagangan merupakan bagian penting dari perkembangan masyarakat Banjar dari masa ke masa, karena menjadi penopang utama perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Banjar. Setidaknya tradisi perdagangan ini sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha yang bercorak Hindu-Budha hingga Kesultanan Banjarmasin. Bahkan, secara historis Kerajaan Negara Dipa sebagai negara awal di Kalimantan Selatan dibangun oleh para imigran saudagar (pedagang besar) dari Keling (daerah Kediri Utara Jawa Timur) di bawah pimpinan Empu Jatmika sekitar abad ke-14 M dengan pusat pemerintahan di lembah Sungai Tabalong (Amuntai).¹

Setelah era Kerajaan Dipa dan Kerajaan Daha, perdagangan terus dikembangkan oleh penguasa berikutnya hingga mencapai masa keemasan pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Kesultanan Banjar. Usaha para sultan untuk memajukan dunia perdagangan, di antara tampak dari pembangunan pelabuhan yang strategis dan diterapkannya sistem perdagangan yang mampu memberi jaminan keamanan kepada para pedagang yang datang.

Golongan pedagang yang terkonsentrasi di daerah perkotaan yang menjadi ibukota kesultanan atau pusat pemerintahan merupakan penduduk utama Banjarmasin.² Kehadiran dan

1 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.228 dan 268.

2 Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim*, h.106.

banyaknya golongan pedagang dalam masyarakat, ternyata tidak hanya membawa perubahan kultural. Bahkan, disepakati oleh para ahli, bahwa Islam tersebar ke berbagai wilayah di Nusantara melalui hubungan dagang dan perdagangan.³

Pentingnya keberadaan pedagang dapat dilihat dari perlakuan khusus yang diterima oleh pedagang dari penguasa Kesultanan Banjar, berupa perlindungan akan harta dan keselamatan diri mereka sebagai pedagang. Perlakuan khusus itu diberikan bukan sekadar memandangi kedudukan mereka sebagai pedagang yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi negara, namun lebih dari itu sumbangsih mereka dapat ditelusuri dari aspek bahwa mereka adalah kelompok pembayar pajak terbesar bagi kerajaan; para pedagang adalah kelompok yang biasa memberikan barang persembahan kepada raja; mereka juga membawa barang-barang baru atau yang diperlukan oleh masyarakat (penyedia); para pedagang adalah penyedia lapangan kerja; dan para pedagang karena memiliki relasi dan hubungan yang luas dengan pedagang dari berbagai kawasan lain, maka mereka adalah kelompok yang membawa informasi-informasi baru sebagai bahan penting bagi kerajaan dalam menata kemajuan, hal ini ditunjang oleh kemampuan mereka dalam berhubungan dengan pedagang yang lain dan dalam membentuk komunitas serta jaringan perdagangan.⁴ Tentu saja, hal terpenting dari semua posisi kelompok pedagang itu adalah bahwa mereka merupakan mitra kerja, mitra dagang dan bisnis dari kerajaan dalam menjalankan usaha perdagangan. Sebab, di antara barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang Banjar biasanya terdapat barang milik saudagar kerajaan, merupakan barang patungan, atau bahkan sepenuhnya milik Sultan Banjar yang dikuasakan kepada para pedagang untuk menjalankannya.

Pengayoman yang diberikan kepada kelompok pedagang lebih dilihat dari karakter Kesultanan Banjar yang merupakan kesultanan

3 Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim*, h.111.

4 Bambang Subiyakto, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.71.

dagang. Sehingga, ketika Kesultanan Banjarmasin didirikan dan kemudian berkembang dengan pesat, komunitas pedagang adalah kelompok yang berperan penting dan mendapat pengayoman secara khusus dari kesultanan. Di antara sebabnya adalah karena Kesultanan Banjarmasin adalah kesultanan yang mengandalkan perdagangan lada, khususnya sejak abad ke-17 dan 18 dan pedagang adalah kelompok utama dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang menjadi penopang utama ekonomi kesultanan pada waktu itu.⁵

Di samping sebab-sebab di atas, secara historis para pedagang Banjar adalah kelompok yang mendukung dan membantu Raden Samudera dalam membangun Kesultanan Banjar, pedagang juga kelompok yang berinisiatif dan kemudian merajakan Raden Samudera, dan kelompok pedagang pula yang membantu Raden Samudera mempertahankan kesultanan yang didirikan dari segala ancaman.⁶

Tampaknya, antara pedagang dengan pergerakan menjadi dua istilah yang saling terkait dalam sejarah perjuangan rakyat Banjar. Istilah pergerakan mengandung pengertian yang khas, yakni perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur, walaupun yang bergerak itu sebagian saja, asal menentukan nasib bangsa ini sebagai keseluruhan menuju kemerdekaan. Secara nasionalisme, tahapan pergerakan rakyat yang terorganisir di Indonesia mula-mula memang bersifat kedaerahan sesuai dengan pertumbuhan nasionalisme dunia. Dasarnya adalah keturunan yang sama (*common descent*), adat-istiadat sama (*common tradition*), bahasa sama (*common language*), dan agama yang sama (*common religion*), baru kemudian meningkat ke fase berikutnya dari pertumbuhan itu, yakni *a common effort in a fight for political rights, for individual and tolerance* (suatu usaha bersama dalam perjuangan untuk hak-

5 M. Idrar Saleh, *Sedjarah Banjarmasin*, h.54 dan 56; Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara*, h.49; Uka Tjandrasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), h.39.

6 J.J. Ras, *Hikajat Bandjar*, h.408.

hak politik, untuk kemerdekaan pribadi, dan menghormati orang lain) perjuangan itu kemudian diikat oleh suatu cita-cita dan suatu kemauan bersama untuk mencapai kemerdekaan.⁷

Karena itu, sangat tepat apabila dikatakan bahwa, dalam konteks gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, maka pedagang adalah kelompok pertama yang melakukan penentangan dan perlawanan terhadap Belanda. Sedangkan perdagangan menjadi faktor utama sebab-sebab terjadinya “Perang Banjar”. Hal ini tampak dari konflik dan pertentangan sebagai faktor yang paling dominan dalam mewarnai hubungan Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda dalam rentang waktu abad ke-17, dan itu dipicu oleh pedagang dan perdagangan. Kalaupun sempat terjadi hubungan damai, maka perdamaian itu cenderung bersifat semu atau sementara, sebab dilakukan secara terpaksa dan bertujuan untuk mengamankan kepentingan masing, seperti kontrak yang ditandatangani pada tahun 1635; Kesultanan Banjarmasin hendak menjaga wilayahnya dari ekspansi Mataram, menjaga keamanan jalur perdagangan dari ancaman kapal-kapal Makassar, kemudian mengembalikan kuasa atas daerah Kutai dan Pasir, sementara Belanda sibuk mengamankan Malaka yang berhasil mereka rebut dari Portugis.⁸

Senada dengan penjelasan di atas, menurut Wajidi, pelopor dan pendukung dari pergerakan rakyat tersebut adalah kaum pedagang, kaum terpelajar, petani, pegawai, ulama, dan guru-guru agama, dan Islam menjadi motor penggerak yang memiliki peran penting.⁹

Menurut Sjarifuddin,¹⁰ berdasarkan pertumbuhan, perkembangan, dan perjuangan pergerakan rakyat di Kalimantan

7 Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), h.9-10.

8 Norpikriadi, *Tumenggung Jalil: Studi Kasus Tentang Politik Pada Masyarakat Tradisional Banjar*, (Amuntai: Pemerintah Kabupaten HSU, 2005), h.55.

9 *Ibid.*, h.11.

10 Sjarifuddin, “Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1974.

Selatan, sejak mulai pertumbuhannya sampai tahun menjelang kemerdekaan dapat dibuat periodisasi, yakni:

1. Periode Pra Pergerakan Rakyat, dimulai sejak runtuhnya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tahun 1860-1901;
2. Periode Proto Pergerakan Rakyat, dimulai dari tahun 1901-1912;
3. Periode Pertumbuhan Pergerakan Rakyat Lokal dan Regional, dimulai dari tahun 1912-1927;
4. Periode Pergerakan Rakyat Lokal, Regional, dan Nasional dimulai dari tahun 1927-1942.

Sedangkan menurut Menurut Yusliani, ada empat komponen yang umumnya dikatakan sebagai pemicu munculnya gerakan, yakni struktur ekonomi politik, kepemimpinan, ideologi, dan basis massa.¹¹

Adapun Perang Banjar sebagai gerakan perlawanan, menurut Taufik Abdullah dalam Kata Pengantar buku *Pegustian dan Temenggung* tulisan Helius Sjamsuddin, sebab dan polanya mirip dengan sebab dan pola yang terjadi dalam Perang Jawa. Pola dari kedua perang ini sama-sama dimulai dari dominasi dan intervensi Belanda di dalam kesultanan yang sedang bertikai dan munculnya tokoh bangsawan yang ingin mengembalikan kondisi kesultanan seperti keadaan semula dengan mematahkan dominasi dan hegemoni Belanda. Dominasi dan hegemoni Belanda mereka anggap sebagai sebab utama yang mengakibatkan rakyat hidup dalam kesusahan, ekonomi kesultanan yang mengalami kemandegan, dan keterasingan kesultanan dari perdagangan laut yang menjadi sumber utama kehidupan.¹²

Akibat semakin mendalamnya campur tangan Belanda dalam bidang politik kesultanan Banjar, masuknya kegiatan ekonomi

11 Yusliani Noor, "Pemberontakan Hantarukung 1899: Sebuah Analisis Gerakan Sosial di Kalimantan Selatan", *Jurnal Vidya Karya*, FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 1996, h.37.

12 Taufik Abdullah, "Kata Pengantar", dalam Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung*, h.iv.

dalam bentuk perusahaan dagang dan tambang-tambang modern, berkembangnya *misi* dan *zending*, adanya rencana Belanda untuk menghapuskan pemungutan pajak kesultanan dan menggantinya dengan uang tahunan yang jumlahnya lebih besar, pajak khusus pedagang dan perdagangan, dan berbagai hal lain, telah membawa akibat yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat Banjar; terjadi banyak perubahan, kondisi sosial-ekonomi semakin sulit; timbul ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik Belanda, sampai pada akhirnya akumulasi dari semua hal ini kemudian memunculkan berbagai macam gerakan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda dengan meletusnya Perang Banjar (1859-1905).¹³

Proses intervensi, dominasi dan monopoli, perpecahan dan penguasaan Belanda atas Tanah Banjar yang menjadi pemicu munculnya gerakan perlawanan rakyat Banjar dan kemudian terakumulasi dalam peristiwa Perang Banjar, secara khusus menurut Husni Abar lebih disebabkan terjadinya pemindahan dan pengambilan secara paksa sumber-sumber perekonomian masyarakat oleh Belanda. Pengambilan secara paksa sumber perekonomian rakyat itu dimulai oleh Belanda dengan penguasaan perdagangan (monopoli), penguasaan perkebunan (lada dan cengkih), serta penguasaan terhadap pertambangan (tambang batubara), dan tentu saja penguasaan wilayah (tanah konsesi).¹⁴ Karena, seluruh jalur dan sumber perekonomian masyarakat sudah dirampas dan dikuasai Belanda, maka rakyat pun tidak bisa lagi untuk berusaha secara bebas dan mencari penghidupan yang baik, karena keterbatasan yang diterapkan Belanda, bahkan kalau pun mereka mendapatkan penghasilan yang layak, maka penghasilan tersebut pada akhirnya menjadi beban atau pajak yang harus dibayarkan.

Dengan kata lain, munculnya berbagai gerakan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda juga dipicu oleh kondisi

13 M. Idwar Saleh, *Sejarah daerah Kalimantan Selatan*, h.53.

14 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning*, h.56-57.

kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Adanya beban pajak, pungutan, rodi atau erakan dan ditambah dengan keadaan ekonomi yang sulit saat itu merupakan salah satu pemicu keresahan masyarakat yang bermuara kepada munculnya pemberontakan dan gerakan perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Akibat keadaan sosial berkaitan dengan pajak, rodi, erakan, dan pungutan ditambah dengan biaya pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya, terutama antara tahun 1900-1928 di Kalimantan Selatan. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk, khususnya dari Hulu Sungai yang kemudian melakukan eksodus ke luar dari daerah Banjar, terutama ke daerah pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaysia.¹⁵

Menurut Idwar Saleh, Perang Banjar sebagai puncak dari pertikaian kalangan Kesultanan Banjar dan kekecewaan terhadap hegemoni dan penjajahan Belanda atas Tanah Banjar dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Secara menyeluruh Perang Banjar merupakan suatu rantai gerakan pedagang dan tani melawan penjajahan. Perang Banjar ini mengharapkan kembalinya Kerajaan Banjar Tradisional, bebas dari segala macam kekuasaan asing, dan semata-mata untuk Tanah Banjar, sebagai keadaan yang diidealkan adalah zaman Sultan Kuning;
2. Sekalipun nativisme, Perang Banjar merupakan gerakan yang diawali oleh sejenis gerakan "Ratu Adil" yang dipimpin oleh Panembahan Aling dan juga dipengaruhi oleh gagasan "Perang Sabil". Karena itu, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Selatan sangatlah mewarnai pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. oleh karena itu, Islam sebenarnya merupakan unsur pertama yang menumbuhkan nasionalisme dalam perjuangan rakyat sebelum tahun 1930 (pra nasionalisme) (hal10).¹⁶

¹⁵ Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, h.34-35.

¹⁶ M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan

3. Gerakan perlawanan pedagang dan tani religius ini memuncak setelah Mangkubumi Pangeran Hidayat menyerah dan dibuang ke Jawa. Selanjutnya perlawanan dipimpin dan diteruskan oleh Pangeran Antasari bersama dengan pejuang-pejuang yang lainnya; Demang Lehman, Tumenggung Jalil, Tumenggung Antaluddin, H. Bujasin, Panglima Wangkang, Panglima Batur, dan lain-lain.¹⁷

Perang Banjar adalah satu periode dari akumulasi berbagai sebab pertentangan dagang dan masalah perdagangan antara Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda. Sejarah mencatat bahwa perdagangan sebagai awal konflik atau perselisihan dagang antara Banjarmasin dengan Belanda mula terjadi ketika pedagang Banjar menolak menjual lada yang mereka bawa ke Pelabuhan Banten kepada Belanda pada tahun 1596. Saat itu adalah awal kedatangan Belanda di Banten dengan maksud berdagang dan membeli rempah-rempah, namun mereka tidak mendapatkannya dari pedagang yang lain, termasuk dari pedagang Banjarmasin. Penolakan ini membuat Belanda marah dan kemudian merampok lada dan seluruh muatan dari *jung* pedagang Banjar. Peristiwa perampokan kapal dagang Banjar oleh Belanda di Banten ini kemudian dibalas oleh Sultan Banjar dengan membunuh habis semua awal kapal Belanda yang berlabuh di Banjarmasin pada tahun 1607, ketika ekspedisi Belanda datang untuk negosiasi perdagangan. Barang dagangan yang dibawa dan kapal mereka pun oleh Sultan Banjar disita sebagai ganti dari *jung* dagang Banjarmasin yang pernah mereka rampok. Peristiwa ini kemudian dibalas lagi oleh Belanda dengan mengirimkan armada untuk menggempur Banjarmasin pada tahun 1612. Banjarmasin hancur dan ibukota kesultanan kemudian dipindahkan ke Kayu Tangi (Martapura).

Persitiwa di atas, bukanlah akhir dari perseteruan Banajrmasin dengan Belanda, karena pada tahun 1638 pecah lagi konflik seiring

Daerah Depdikbud, 1978/1979), h.47.

17 M. Idwar Saleh, *Sejarah daerah Kalimantan Selatan*, h.53.

dengan penyerangan terhadap pos dagang Belanda di Banjarmasin yang mengakibatkan 108 orang Belanda tewas. Barang-barang dagang dan persediaan milik Belanda dirampas, dua kapal dan perahu pun ikut dibakar dan Belanda menderita kerugian sangat besar. Belanda pun merencanakan untuk melakukan pembalasan secara besar-besaran dengan mendatangkan 7 buah kapal dengan sejumlah serdadu beserta perlengkapan militernya. Namun, pembalasan ini tidak mencapai target dan sasaran yang diharapkan, karena Belanda hanya berhasil membunuh sekitar 27 orang Banjar sipil yang dijadikan sebagai pelampiasan pembalasan.

Menurut Norpikriadi, konflik dan pertentangan adalah hal yang paling dominan dalam mewarnai hubungan Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda dalam rentang waktu abad ke-17, dan itu dipicu oleh pedagang dan perdagangan. Kalaupun sempat terjadi hubungan damai, maka perdamaian itu cenderung bersifat semu atau sementara, sebab dilakukan secara terpaksa dan bertujuan untuk mengamankan kepentingan masing, seperti kontrak yang ditandatangani pada tahun 1635; Kesultanan Banjarmasin hendak menjaga wilayahnya dari ekspansi Mataram, menjaga keamanan jalur perdagangan dari ancaman kapal-kapal Makassar, kemudian mengembalikan kuasa atas daerah Kutai dan Pasir, sementara Belanda sibuk mengamankan Malaka yang berhasil mereka rebut dari Portugis.¹⁸

Jelas apabila aspek utama yang menjadi sebab pecahnya Perang Banjar dan dianggap sebagai penyebab kelanjutan dari perseteruan rakyat Banjar dengan Belanda, bahkan merupakan faktor awal pemicu kedatangan Belanda adalah faktor perdagangan. Berdagang adalah tujuan semula Belanda datang ke Banjarmasin, untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah dibanding pasaran Eropa. Namun, tujuan ini kemudian berubah menjadi monopoli dan penguasaan atau kolonialisme terhadap kawasan perdagangan yang dianggap menguntungkan, seperti halnya dengan Banjarmasin. Berkali-kali utusan Belanda

¹⁸ Norpikriadi, *Tumenggung Jalil*, h.55.

datang ke Banjarmasin untuk membangun jaringan kerjasama dan kontrak pedagang dengan Banjarmasin dan berkali-kali pula ditolak oleh Kesultanan Banjar yang tidak setuju dengan sikap Belanda, karena arogan, mau menang sendiri, dan rakus atau tamak. Dalam pandangan pedagang Banjar, arogansi, mau menang sendiri, dan tamak dari Belanda tampak dari sistem monopoli dagang yang mereka paksakan. Sebab, dalam praktiknya, sistem monopoli perdagangan Belanda tidak hanya menyangkut atau berhubungan jalur perdagangan, tetapi menyangkut pula komoditas perdagangan, penentuan harga barang dagangan, bahkan sumber atau asal dari komoditas perdagangan didapatkan. Tentu saja hal demikian tidak dapat diterima, merugikan pedagang Banjar, dan merupakan sistem perdagangan yang tidak kompetitif.

Terbukti kemudian, sistem monopoli perdagangan ini diikuti dengan penguasaan Belanda atas wilayah tertentu di Tanah Banjar sebagai hasil kompensasi dan strategi licik mereka dalam mengintervensi urusan intern di Kesultanan Banjar. Melalui perusahaan dagangnya VOC, Belanda telah melakukan monopoli perdagangan; lada, rotan, damar, dan hasil-hasil tambang, seperti emas dan intan. Akibat monopoli perdagangan Belanda mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Tidak hanya antara pedagang Belanda dengan pedagang Banjar, tetapi juga dengan pedagang-pedagang dari kawasan lain, bahkan dengan pedagang asing, seperti pedagang dari Inggris, Cina, Arab, dan India. Dominasi Belanda terhadap perdagangan telah menghambat laju dan dinamisasi perdagangan Banjar ke berbagai kawasan dengan kelompok pedagang dari luar, berbanding sebelum penguasaan Belanda. Karena itu dikatakan bahwa tujuan semula Belanda datang ke Banjarmasin untuk berdagang dan bersaing secara bebas dengan pedagang Banjar dan pedagang dari berbagai kawasan lain hanyalah kedok Belanda untuk melakukan kolonisasi Tanah Banjar.

Karenanya, cara pandang dan ketidaksamaan sistem atau tradisi dalam menjalankan perdagangan sering dianggap sebagai bibit awal munculnya permusuhan. Misalnya perbedaan sistem

perdagangan Banjar yang bersifat terbuka dengan sistem dagang Belanda; Belanda ingin menerapkan sistem dagang yang bersifat monopoli sedangkan orang Banjar lebih suka menerapkan sistem dagang yang bebas; Belanda tidak suka sifat-sifat dagang orang Banjar dan dianggap tidak jujur atau tidak konsisten dan orang Banjar pun tidak suka dengan sifat dagang Belanda yang selalu ingin berkuasa, menawar barang dagang dengan harga yang murah, dan arogan.

Ketika dominasi kekuasaan Belanda sudah sedemikian rupa, kehadiran Belanda hanya membuat kehidupan rakyat menjadi susah, Belanda juga ikut campur dalam intern Kesultanan Banjar, melakukan politik adu domba dan pecah belah, menguasai dan membagi-bagi wilayah Banjar, menghapuskan Kesultanan Banjar, dan melakukan kolonialisme di Tanah Banjar. Maka para pedagang adalah pelopor dan motivator utama munculnya gerakan kebangkitan rakyat Banjar untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dalam kondisi yang demikian, pedagang kemudian tampil di garda depan untuk melakukan perlawanan. Humaidy menegaskan bahwa para pedagang Banjar yang memiliki kedudukan penting; merupakan bagian dari kelas sosial yang sangat kuat di Banjarmasin; pelopor perubahan sosial, perkembangan kehidupan beragama, dan tentu saja para pedagang tersebut adalah kelompok utama yang memberikan pengaruh sangat kuat terhadap munculnya beberapa pergolakan dan gerakan sosial di Banjarmasin.¹⁹

Menurut Sjarifuddin, pedagang adalah pelopor pergerakan; pedagang pelopor pergerakan umumnya adalah pedagang yang melakukan perdagangan ekspor-impor, pedagang antar pulau (*interensuler*), dan pedagang antar daerah-kota di Kalimantan Selatan. Para pedagang, yang karena aktivitas perdagangannya (pekerjaannya), mereka mendapatkan banyak pengalaman, informasi dan pengetahuan, dan memiliki hubungan yang luas dengan dunia luar serta melihat secara langsung kemajuan berbagai

19 Humaidy, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.70.

pergerakan yang juga ada di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman, mereka pun turut dan menjadi pelopor atau penggerak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di daerah.²⁰

Sangat tepat apabila Steenbrink menyatakan bahwa kelompok pedagang (yang sebagian besar sudah berhaji) adalah kelompok yang merasa paling dirugikan akibat kebijakan, pengaruh kekuasaan, dan monopoli perdagangan Belanda yang semakin lama semakin luas.²¹ Karena, mereka tidak bisa dengan leluasa menjalankan usaha dan bisnis perdagangannya disebabkan oleh batasan dan aturan-aturan monopoli yang dibuat Belanda. Ataupun, apabila mereka tetap menjalankan usaha dagangnya, maka sangat berisiko apabila menderita kerugian yang besar. Di samping itu, pada masa tertentu pedagang adalah kelompok yang ditetapkan oleh Belanda harus membayar pajak yang lebih besar dibanding kelompok yang lain, hal ini tentu saja sangat memberatkan. Sehingga, ketika berada pada kondisi yang demikian, wajar apabila mereka kemudian muncul sebagai kelompok yang paling keras melakukan perlawanan terhadap Belanda; baik di masa awal masuknya Belanda, Belanda mengikat perjanjian dagang dengan Kesultanan Banjar, maupun masa-masa sesudahnya, dan terlebih lagi ketika meletus Perang Banjar.²²

Alfisyah menegaskan bahwa para pedagang Banjar yang terlibat dalam perdagangan internasional dan sebagian besar di antara adalah pedagang Muslim yang sudah berhaji, kedudukan mereka menjadi sangat penting, terlebih setelah peranan pedagang atau saudagar Banjar yang berlatarbelakang bangsawan atau dari kerajaan semakin menurun seiring dengan semakin merosotnya kekuasaan Kesultanan akibat tekanan-tekanan Belanda.²³

Di masa Perang Banjar, perlawanan pedagang Banjar terhadap hegemoni Belanda dapat dilihat dari beberapa aspek. Misalnya,

20 Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda".

21 Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, h.46.

22 Humaidy, dalam "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis", h.70.

23 Alfisyah, "Etika Dagang Urang Banjar", h.20.

secara terintegrasi kelompok pedagang ini meleburkan kesatuan dan kesamaan gerak penentangan mereka terhadap Belanda dengan kelompok-kelompok yang lain, yakni pendukung Pangeran Hidayatullah yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Banjar dan mendapat dukungan yang kuat dari rakyat; Pangeran Antasari yang prihatin terhadap nasib dan penderitaan rakyat akibat kesewenang-wenangan, intervensi, dan tradisi-tradisi Belanda yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai tradisi orang Banjar; serta masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang tidak memperoleh kebebasan dalam berusaha, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sangat mahal karena monopoli dan permainan dagang Belanda.²⁴

Berikutnya, dalam Perang Banjar tersebut, selain kelompok pedagang sebagai pemicu utamanya, maka kehadiran mereka dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda juga bisa dilihat dari sejumlah figur yang menjadi motor penggerak dan tokoh dalam berbagai gerakan sosial yang sebelumnya adalah berlatarbelakang sebagai pedagang, orang-orang yang terkait dengan perdagangan, atau setidaknya berada di lingkaran perdagangan, misalnya P. Antasarti (dari kalangan Kesultanan Banjar), Datu Aling (tokoh Gerakan Muning) atau H. Matarif, H. Matamin, dan Kyai Masdipati Jaya (tokoh Gerakan Bakumpai), dan lain-lain.

P. Antasari adalah tokoh utama dan motor penggerak dari perlawanan rakyat dalam Perang Banjar. Menurut data tertulis, tokoh ini dilahirkan di Kayu Tangi Martapura tahun 1787 dan wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 dalam usia 75 tahun Tanah Dusun di Desa Bayan Begok Sampirang Puruk Cahu.²⁵ Sedangkan menurut Syamsiar Seman, P. Antasari dilahirkan pada tahun 1800. Ayahnya bernama P. Masohud bin P. Amir dan ibunya bernama

24 Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, h.46.

25 Artum Artha, "Pangeran Antasari: Gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu'minin", *Makalah*, disampaikan dalam Forum Informasi Ilmiah Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin Memperingati Wafatnya P. Antasari pada tanggal 11 Oktober 1995. h.1.

Gusti Khadijah binti Sultan Sulaeman.²⁶ Tidak banyak catatan yang mengungkap secara detil sejarah hidup P. Antasari sewaktu kecil dan berdiam di Martapura. Namun yang jelas, dia dikenal sebagai seorang bangsawan Banjar yang hidup secara sederhana dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi daerahnya. Sebagai bangsawan, P. Antasari hanya memiliki *tanah lungguh* (*apanage*) di daerah Mangkauk sampai daerah wilayah dekat Rantau. Penghasilan yang didapat dari perdagangan hasil bumi di *tanah apanage* hanya sekitar 400 Golden Belanda pertahun setelah dipotong berbagai jenis pajak barang maupun perdagangan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem politik dan monopoli perdagangan Belanda. Penghasilan ini tentu tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sebagai bangsawan pada masa itu yang berdiam di Kampung Antasan Senor Martapura.

Ketidaksukaan P. Antasari terhadap Belanda yang telah menjajah Banua Banjar membuat Antasari mengangkat senjata dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Perjuangan tersebut ia wujudkan dengan menghimpun segala kekuatan yang dimiliki dan menyatukan kekuatan rakyat Banjar yang terpisah di beberapa daerah, baik yang ada di Martapura, Marabahan, Barito, maupun yang ada di Rantau, Tanah Laut, dan di daerah Hulu Sungai.

Salah satu semboyan P. Antasari yang sangat terkenal dan menjadi *motto* daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah *haram manyarah waja sampai kaputing*. Semangat dan kekuatan yang terkandung dalam semboyan tersebut tidaklah keluar begitu saja, namun dia diformulasikan dari semangat juang yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ajaran agama dan lahir dari lisan seorang pemimpin yang bergelar *Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu'minin*, pengemban tugas sebagai Panglima Tertinggi dalam pertahanan kedaulatan wilayah, sebagai pemimpin negara dan sebagai pemimpin tertinggi agama. Seorang tokoh yang tidak ambisius terhadap jabatan dan pangkat dalam kerajaan, tidak

26 Syamsiar Seman, *P. Antasari dan Meletusnya Perang Banjar*, h.1

menonjolkan diri sebagai seorang bangsawan, tidak menonjolkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi pada saat diperlukan secara spontan ia muncul sebagai pemimpin yang diharapkan. Seorang pemimpin yang hidup sederhana, sehingga dengan kesederhanaannya itulah ia dikagumi oleh semua orang, dicintai oleh rakyat dan dituruti kata-katanya, sehingga seluruh lapisan masyarakat, bahkan kelompok etnis di pedalaman mengakuinya sebagai pemimpin. Menurut Gazali Usman, *haram manyarah wajah sampai ka puting* inilah sebenarnya yang (mesti) menjadi prinsip dan etos kerja orang Banjar.²⁷

P. Antasari juga dikenal sebagai bangsawan yang merakyat, seorang ahli siasat dan strategi, memiliki kecerdasan otak yang tinggi serta keberanian yang mengagumkan.²⁸ Menurut Helius Sjamsuddin, P. Antasari dan P. Hidayatullah adalah dua orang Muslim yang saleh; mereka berdua tokoh yang mempresentasikan tradisi (perlawanan) kebangsawanan dan pedalaman yang merupakan akibat dari perubahan sosio-politik yang dipaksakan Belanda.²⁹

P. Antasari sebagai *tutus* Kerajaan Banjar,³⁰ diangkat dan dikukuhkan oleh rakyat sebagai sebagai Kepala Agama Tertinggi dan diberi gelar *Panambahan Amir Oedin Chalifatoel Mu'minin* pada tanggal 13 Ramadhan 1278 H/14 Maret 1862, oleh sekalian tokoh pejuang Kalimantan (Kiai Dipati Djaja Radja, Raden Mas Warga Nata Widjaja, Tumenggung Mangku Sari, Kepala di seluruh Teweh, Kapuas dan Kahajan, sekalian para haji, alim ulama dan pembesar Banjarmasin serta Martapura), sebagaimana ditulis Amir Hasan Bondan, dalam bukunya *Suluh Sedjarah Kalimantan*.³¹

P. Antasari berhasil menjadi seorang tokoh yang selalu hidup, dikenang, dan dijunjung oleh masyarakatnya, ia menempatkan diri sebagai seorang pemimpin pejuang yang mendapatkan

27 A. Gazali Usman, *op. cit.*, h.4.

28 M. Suriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar*, h.182.

29 Helius Sjamsuddin, *Islam dan Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah*, h.9.

30 *Ibid.*, h.1.

31 Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, h.59; Syamsiar Seman, *P. Antasari dan Meletusnya Perang Banjar*, h.5.

gelar tertinggi. Mengapa ia diberi kedudukan terhormat oleh masyarakatnya? Sehingga sampai sekarang kepribadian, perjuangan, semangat, dan petuahnya tetap diingat dan dikenang orang. Menurut Gazali Usman, setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa P. Antasari dicintai dan diterima secara luas oleh rakyatnya.

Pertama, walaupun ia seorang bangsawan dan memiliki hak terhadap tahta kerajaan Banjar namun dalam kehidupannya sehari-hari ia dikenal seperti layaknya masyarakat biasa. Ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan sederhana, rendah hati, tidak ambisi, dan dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga ia disenangi dan disukai oleh masyarakat. Perasaan dan penderitaan rakyat yang dialami dan dilihatnya sendiri, komitmen yang kuat terhadap kehidupan rakyat dan dorongan untuk menyelamatkan negara dari campurtangan dan kekuasaan Belanda yang semakin menjadikannya pada akhirnya mendorong P. Antasari untuk mengangkat senjata, melakukan perlawanan dan berjuang untuk membela dan mengembalikan hak hidup rakyat yang aman, damai, dan sejahtera di negeri kelahiran mereka. Itulah sebabnya asumsi yang menyatakan bahwa Perang Banjar sebagai perang feodal untuk membela kaum bangsawan tidak bisa dibenarkan. Sebab Perang Banjar sesungguhnya adalah perang yang dikobarkan untuk membela agama dari kehancuran karena pengaruh budaya Barat yang merusak, perang membela rakyat dari belenggu penjajahan, dan perang untuk membela keutuhan bernegara dan berbangsa.

Kedua, sebagai seorang Muslim yang taat dan dekat dengan golongan ulama, tuan-tuan guru, kepribadian dan jiwa P. Antasari banyak men-dapatkan pengaruh dan tempaan dari nilai-nilai dasar ajaran agama yang diyakininya.

Abdul Qodir Jaelani menulis, "Sejak kecil P. Antasari tidak suka hidup di istana yang penuh dengan instrik dan dominasi kekuasaan Belanda. Ia hidup di tengah-tengah rakyat dan banyak belajar agama kepada para ulama, dan hidup dengan berdagang dan bertani. Pengetahuannya yang dalam tentang Islam, ketaatannya melaksanakan ajaran-ajaran Islam, ikhlas, jujur, dan pemurah

adalah merupakan akhlak yang dimiliki P. Antasari. Menurut Saifuddin Zuhri, pandangan yang jauh dan ketabahannya dalam menghadapi setiap tantangan, menyebabkan P. Antasari dikenal dan disukai oleh rakyat. Dan ia menjadi pemimpin yang ideal bagi rakyat Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin".³² Sehingga, bermuara dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama inilah lahir semangat dan kekuatan yang luar biasa untuk berperang dan berjuang di bawah landasan agama, sehingga *haram manyarah* hukumnya menyerahkan segala perwalian, sistem pemerintahan, dan kedaulatan hidup kepada pemerintah Belanda yang tidak seakidah, walaupun harta, darah, dan nyawa taruhannya, *waja sampai kaputing*. Niscaya tidak akan berhenti tangan memegang senjata, kaki berlari, lisan memberi komando, teriakan *Allahu Akbar* menggema, kecuali *waja sampai ka puting* atau nyawa kembali kepada-Nya. Landasan moral agama begitu membaja dalam jiwa, sehingga tujuan tertinggi dari suatu perjuangan yang hendak diraihny adalah ridha-Nya.

Ketiga, P. Antasari adalah sosok seorang pemimpin yang mengedepankan dan memperjuangkan hak, kedaulatan dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau golongan, sehingga ia dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat luas secara terbuka. Ia adalah seorang tokoh yang tidak ambisius terhadap jabatan dan pangkat dalam kerajaan, tidak menonjolkan diri sebagai seorang bangsawan, tidak menonjolkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi pada saat diperlukan secara spontan ia muncul sebagai pemimpin yang diharapkan. Seorang pemimpin yang hidup dengan sederhana, sehingga dengan kesederhana-annya itulah ia dikagumi oleh semua orang, dicintai oleh rakyat dan pengikut-nya, serta dituruti kata-katanya, sehingga seluruh lapisan masyarakat, bahkan kelompok etnis di pedalaman mengakuinya sebagai pemimpin.³³

32 Abdul Qadir Djaelani, *Perang Sabil versus Perang Salib: Umat Islam Melawan Penjajah Kristen Portugis dan Belanda*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999), h.87.

33 A. Gazali Usman, *op. cit.*, h.4.

P. Antasari adalah seorang pemimpin perjuangan yang dikenal sangat berani Ia bahkan rela meninggalkan kedudukannya manakala ia gagal membela kepentingan rakyatnya. Sikap inilah yang dulu diperlihatkan oleh seorang P. Antasari. Ia rela meninggalkan rumah kediaman, hidup sakit dan melarat, bersatu dan berjuang di tengah-tengah rakyatnya, sampai akhirnya ia pun meninggal di tengah-tengah rakyatnya. Dengan gagah berani P. Antasari telah mencetuskan berkobarnya 'Perang Banjar', dan secara bergerilya berjuang bersama rakyat serta terus mengobarkan keberanian dan perjuangan melawan Belanda.

Semangat ini diikuti dan diteruskan oleh para pengikutnya, sehingga pantang bagi mereka untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Salah seorang panglima dan orang kepercayaan P. Antasari yang memimpin perjuangan rakyat Kalimantan di wilayah sepanjang Sungai Barito adalah Tumenggung Surapati³⁴ dan Panglima Sogo.³⁵ Dalam catatan sejarah, Tumenggung Surapati bersama dengan pasukannya yang hanya berjumlah beberapa orang inilah yang berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda, Onruts³⁶ di Sungai Barito, Lolontor (Lewu Lutung Tuwur³⁷), pada 26 Desember 1859. Pasukan Tumenggung Surapati juga berhasil membunuh Kapten kapal Onruts tersebut yang bernama van der Velde beserta 93 anak buahnya dengan bersenjatakan *parang mandau* (senjata khas Kalimantan).

P. Antasari telah dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional dan Kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK No. 06/TK/1968 di Jakarta, tertanggal 23 Maret

34 Tumenggung Surapati wafat pada tahun 1904 dan dimakamkan di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Lihat "Persaudaraan Suku Banjar dengan Suku Dayak", Ensiklopedi Wikipedia Indonesia, www.wikipedia.com. diakses pada 17 Juli 2009.

35 Panglima Sogo makamnya ada di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Lihat "Persaudaraan Suku Banjar dengan Suku Dayak", Ensiklopedi Wikipedia Indonesia, www.wikipedia.com. diakses pada 17 Juli 2009.

36 Sebagai bagian penting (bukti-bukti) dari sejarah dan guna menjadi pelajaran bagi generasi mendatang pemerintah daerah telah merencanakan untuk mengangkat bangkai dari kapal perang Belanda Onruts dimaksud dari dasar Sungai Barito.

37 Lihat "Persaudaraan Suku Banjar dengan Suku Dayak", Ensiklopedi Wikipedia Indonesia, www.wikipedia.com. diakses pada 17 Juli 2009.

1968 untuk mengingat jasa dan perjuangannya. Gelar ini memang tepat diberikan kepada P. Antasari serta sesuai pula dengan kriteria mereka yang layak mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, sebagaimana **prosedur dan tata cara pemberian gelar pahlawan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Departemen Sosial RI**, yakni: 1) Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik/perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan Negara; dan telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia; 2) Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya; 3) Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional; 4) Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi; 5) Memiliki akhlak dan moral yang tinggi; 6) Tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangannya; 7) Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.³⁸

Memang, tanpa penghargaan itupun, sebenarnya P. Antasari akan tetap hidup dan dikenang sebagai pahlawan dengan enam alasan mendasar³⁹ berikut:

Pertama, P. Antasari adalah tokoh besar dalam sejarah masyarakat Banjar, disebut demikian karena ia memiliki opini atau pendapat yang bisa abadi sepanjang catatan sejarah, bahkan opini tersebut telah menjadi pedoman, simbol, dan slogan dalam kehidupan masyarakat yang hidup sesudahnya, misalnya

38 "Gelar Pahlawan", <http://www.setneg.go.id/>, diakses pada 4 Desember 2008.

39 Diadaptasi dari tulisan M. Syafa'at Habib, "Kepahlawanan dan Pujaan Bagi Pahlawan", *Majalah Adzan*, edisi Nopember 1989, h.49-54.

haram manyarah waja sampai kaputing, jangan bacakut papadaan, dan sebagainya. Ia juga memberikan teladan perbuatan yang terpuji, yang sepanjang masa tidak akan terlupakan, di samping mewariskan tradisi, semangat perjuangan yang bermanfaat, dan patut dibanggakan bagi generasi penerus sesudahnya.

Kedua, P. Antasari adalah seorang tokoh yang telah memberikan contoh kepribadian teladan dalam sejarah. Kepribadiannya bukanlah kepribadian sembarang orang, tetapi eksklusif sifatnya. Sebab ia mewariskan perilaku perjuangan yang bersifat heroik, cinta negara, dan sikap patriotisme untuk mengusir penjajah serta kolonialisme dari wilayah tanah air.

Ketiga, P. Antasari memiliki nilai simbolis yang diperlukan oleh masyarakat, ia dipuja karena sifat-sifat unggulnya, sehingga pada akhirnya tidak ia tidak hanya menjadi idola masyarakat, akan tetapi juga sebagai model atau sosok teladan bagi masyarakat dalam membangun dan memperjuangkan kehidupan mereka. Ia telah diangkat oleh masyarakatnya menjadi pemimpin agama mereka (*Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu'minin*). Karena itu wajar jika perguruan tinggi agama Islam pertama dan tertua di bumi Kalimantan, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari mengabadikan namanya.⁴⁰

Keempat, karena ketokohan dan perjuangannya (*hero-worshop*), P. Antasari mendapatkan gelar dan penghargaan sebagai pahlawan. Dalam bahasa agama, mereka yang berjasa besar dalam membela dan memperjuangkan agama Allah dikenal sebagai *mujahid* (pejuang) yang *syahid*, dan dianggap hidup selamanya serta menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah Swt.

Kelima, oleh karena jasanya yang tak terhingga, yang tak dapat dinilai dengan ukuran harta, menjadikannya personifikasi keutamaan tingkahlaku dan kepribadian dalam kehidupan masyarakatnya.

40 Selain itu, nama P. Antasari juga dipakai sebagai nama jalan, kompleks perumahan, lembaga pendidikan, dan institusi-institusi lainnya; Korem 101 Antasari, MTs P. Antasari, Wisma Antasari, Asrama Mahasiswa P. Antasari, dan lain-lain.

Keenam, peranannya sebagai titik sentral dalam sejarah perjuangan masyarakat Banjar, secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pembentukan etos moral masyarakat Banjar. Di mana sekalipun ia telah tiada, namun eksistensinya tetap akan dikenang dan berada di tengah-tengah masyarakatnya sepanjang masa, karena keberadaannya memastikan adanya agenda perjuangan yang terus-menerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Datu Aling, tokoh ini dianggap sebagai orang yang pertama kali mampu memobilisasi massa untuk menentang kolonialisme Belanda. Bermarkas di daerah pinggiran Sungai Muning yang mengalir melewati Kampung Lawahan serta menjadi penghubung antara daerah Margasari dan sekitarnya dengan daerah Rantau, Datu Aling berani menunjukkan sikap perlawanannya terhadap Belanda dengan membangun kawasan baru yang dinamakan dengan Kampung Tambay Mekkah. Dia juga mengumumkan tentang pendirian kerajaan yang berfungsi untuk menopang Kesultanan Banjar, karena telah dihapuskan oleh Belanda, sekaligus mengangkat menantunya sebagai sultan dengan gelar Sultan Kuning.

Setelah berhasil memobilisasi massa pendukung dan Datu Aling berhasil mengumpulkan kekuatan dan menggoncangkan pertahanan Belanda setelah melakukan serang terhadap benteng batubara Oranje Nassau di Pengaron pada 28 April 1859. Serangan ini kemudian menjadi awal dari Perang Banjar yang terjadi selama 1859-1905. Karena itu, penyerbuan pasukan Muning menjadi inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Banjar yang lama. Perang Banjar ini kemudian meluas dan terjadi di seluruh wilayah Kesultanan Banjar, termasuk di sepanjang Sungai Barito sampai ke Hulu dari Sungai Barito, hingga daerah Muara Teweh dan Puruk Cahu.⁴¹

41 A. Gazali Usman, *Riwayat Datu Sanggul dan Para Datu*, (Rantau: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 1999), h.130, 139.

Ketika gerakan Datu Aling muncul, beberapa orang Belanda diutus untuk meneliti gerakan ini. Berdasarkan pengakuan dua orang kaki tangan Belanda yang bertugas di tambang batubara Pengaron, bernama Mihing dan Willem serta dan sumber-sumber Belanda yang lain, dilaporkan bahwa gerakan Datu Aling dianggap hanyalah sebagai gerakan nativisme dari segerombolan orang yang hendak memberontak kekuasaan Belanda. Mereka juga melaporkan bahwa Datu Aling hanyalah seorang yang sudah tua yang buta dan sakit-sakitan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Datu Aling adalah bekas seorang bajak laut sungai atau perompak kapal dagang yang lewat Sungai Negara, di sekitar Margasari. Datu Aling juga dianggap berbohong dan menyebarkan berita yang tidak benar tentang kesaktian dirinya yang bisa mengobati orang sakit kusta, mendapat wangsit ilmu dan kekuasaan, dan telah mendapat amanat untuk menyelamatkan Kesultanan Banjar dari kehancuran karena penjajahan Belanda, setelah menjalani ritual *balampah* (bertapa).⁴²

Boleh jadi laporan yang dibuat Belanda ketika menggambarkan sosok Datu Aling adalah narasi yang terlalu dilebih-lebih atau dibuat-buat, di tengah kesimpang-siuran berbagai berita tentang “Gerakan Muning”. Karena, berdasarkan sumber lisan yang diceritakan oleh masyarakat setempat, Datu Aling dikenal sebagai seorang yang baik, suka membantu, bisa mengobati orang sakit, memiliki banyak ilmu, pedagang besar yang kaya raya, dermawan, dan pejuang Banjar yang dihormati.⁴³ Faktor-faktor ini telah menjadikan masyarakat luas mengiyakan dan mendukungnya ketika dia mendirikan Kerajaan Tambay Mekkah serta mengumumkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangan dalam rangka mengembalikan Kesultanan Banjar seperti semula. Apa yang dilakukan oleh Datu Aling kemudian mendorong Pangeran Antasari mau datang ke tempat Datu Aling, bekerjasama memperjuangkan Tanah Banjar, bahkan kemudian

42 M. Idwar Saleh, *Pangeran Antasari*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h.35.

43 Wawancara dengan Mansyur (keturunan Datu Aling), 10 April 2017.

untuk mempererat hubungan antara keduanya, anak Pangeran Antasari yang bernama Gusti Muhammad Said dikawinkan dengan anak Datu Aling yang bernama Saranti. Atau ketika dia mendirikan Kerajaan Tambay Mekkah, masyarakat luas mengiyakan dan mendukungnya. Pengakuan masyarakat Rantau terhadap Datu Aling setidaknya mencakup 11 kampung di sekitar Kumbayau waktu itu, yakni Gadung, Alas, Rantau, Padang, Batang Hulu, Kandangan, Jambu Amandit, Bamban, dan Pangambau.⁴⁴

Bahkan kemudian, dalam pandangan Belanda, gerakan perlawanan rakyat yang dipelopori oleh Datu Aling dianggap lebih berbahaya dibandingkan gerakan perlawanan rakyat Banua Lima yang dipelopori oleh Tumenggung Jalil. Apabila gerakan di Banua Lima semata ditujukan sebagai perlawanan dan penolakan terhadap pemerintahan Sultan Banjar (Pangeran Tamjid), maka Gerakan Muning selain itu juga berdampak terhadap penyatuan gerakan-gerakan rakyat yang ada di Banua Lima, Barito, Margasari, Martapura, dan Tanah Laut, hal ini bisa dilihat dari pukulan pertama yang mereka lakukan ketika menyerang tambang batubara Belanda di Pengaron dan Banyu Irang, ditambah dengan pembunuhan terhadap misionaris Belanda dan pendudukan mereka atas Kota Martapura.⁴⁵ Jelas apabila gerakan sosial Panembahan Muda Aling timbul dalam kondisi kehidupan sosial politik masyarakat Banjar yang ketika itu sedang mengalami kemerosotan kekuasaan dan wilayahnya terpecah-pecah. Kondisi sosial-politik kronis. Kemudian penetrasi ekonomi Belanda melalui sistem monopoli dan eksploitasinya membuat masyarakat Banjar menjadi petani kembali dan mematikan aktivitas perdagangan yang telah dikembangkan sebelumnya. Dengan demikian, maka, kebangkitan gerakan Panembahan Muda Aling merupakan reaksi perkembangan politik masyarakat Banjar dari pertengahan abad 17 hingga awal akhir abad 19, yang dianggap sebagai suatu penyimpangan tradisi politik masyarakat Banjar yang

44 M. Idwar Saleh, *Pangeran Antasari*, h.33.

45 *Ibid.*, h.32.

telah dibangun sejak periode Negara Dipa. Gerakan sosial ini, selanjutnya mengadakan pemberontakan terhadap Sultan Tamjid, dan pemerintah Hindia-Belanda.⁴⁶

Menurut Gazali Usman, Datu Aling sebagai tokoh masyarakat berpengaruh di daerah Muning, di samping hidup sebagai petani dia juga memiliki sejumlah besar jukung sebagai alat transportasi dan sarana berdagang atau berniaga. Hasil pertanian yang melimpah telah menjadikannya sebagai orang terkaya di daerah Muning. Di samping itu, karena dia juga seorang yang saleh, banyak melakukan amal kebaikan, dan membantu fakir miskin, menyebabkan ia menjadi seorang yang terhormat di kalangan masyarakat luas. Kemudian, dikatakan pula bahwa ketika pemberontakan terhadap Datu Aling dan masyarakat Muning terhadap Belanda pecah, hasil panen padi dari pertanian rakyat di daerah Muning pada masa tahun 1858-an sangat baik, ini karena daerah Muning adalah daerah yang sangat subur dan menjadi lumbung padinya Kesultanan Banjar. Sehingga, rakyat merasa tentram terhadap masalah kehidupan mereka. Pada waktu itu, harga beras juga murah, hanya f.4,- untuk 100 gantang, dan 1 gantang garam bisa ditukar dengan 5 gantang beras.⁴⁷

Menurut Mansyur, Datu Aling adalah seorang petani kaya dan seorang pedagang yang memiliki banyak perahu besar atau jukung (*jung*) yang digunakan sebagai alat transportasi sekaligus mengangkut barang dagangan. Sumber kekayaan Datu Aling tidak hanya didapat dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil berdagang yang dilakukannya keberbagai daerah. Sebagai seorang pedagang dia memiliki relasi dan jaringan dagang yang lumayan luas, di antaranya adalah dengan para pedagang Cina yang biasa memanggilnya Aling, padahal nama sebenarnya adalah Muhammad Mahmud. Datu Aling dianggap sebagai tokoh yang memiliki kharisma dan berbagai kelebihan. Datu Aling juga dikenal sebagai seorang yang dermawan dan banyak membantu

46 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning*, h.2-5.

47 A. Gazali Usman, *Riwayat Datu Sanggul dan Para Datu*, h.31, 136.

masyarakat miskin, karena itu dia dikenal dan dihormati oleh masyarakat luas. Ketika melihat kondisi kehidupan masyarakat yang semakin sulit akibat campurtangan Belanda, Datu Aling yang merasa prihatin kemudian terpanggil untuk memperbaiki kondisi masyarakat ketika itu.⁴⁸

Di samping itu, sebagai pedagang besar yang sering membawa barang dagangannya dengan jung-jung besar, maka Datu Aling adalah bagian dari pedagang yang sangat dirugikan oleh Belanda. Karena, hampir disetiap pos pada rute perdagangan yang dilalui, anak buah kapal dagang Datu Aling selalu dikenai pajak oleh Belanda. Pajak-pajak ini tentu saja sangat merugikan dan memberatkan armada dagang Datu Aling. Itu sebab, setelah mendapatkan waktu dan *moment* yang tepat, maka Datu Aling kemudian menyatakan perlawanan terhadap Belanda dan memulai pecahnya Perang Banjar dari daerah pinggiran yang kecil, yakni Kampung Kumbayau yang dibangun dan menjadi markasnya. Senada dengan penjelasan Husni Abar bahwa, Aling sebagai petani kaya dan juga seorang pedagang besar adalah seorang yang merasakan dampak langsung dari penjajahan Belanda. Sebagai petani kaya, Aling terkena pajak yang besar secara tidak adil. Di samping itu, sebagai pedagang, di mana biasanya Aling menggunakan perahu-perahu atau jukung-jukung untuk membawa barang dagangannya. Jukung-jukung milik Aling ini juga terkena pajak, sehingga Aling merasa sangat dirugikan. Walaupun dalam berbagai sumber dari laporan-laporan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang tertulis yang memberitakan bahwa Aling adalah seorang pedagang besar dan kaya.⁴⁹

Barang-barang peninggalan Datu Aling seperti tombak, parang bungkul (senjata tradisional Banjar), beberapa piring melawin atau melamin (dari Cina), batu kembar widuri, celana pendek, dan lain-lain, masih tersimpan dengan baik. Sebelumnya banyak

48 Wawancara dengan Mansyur (keturunan Datu Aling), 10 April 2017.

49 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning*, h.10.

barang peninggalan Datu Aling yang disimpan oleh keluarga dan keturunannya, tetapi kemudian ada yang dipinjam oleh orang dan tidak dikembalikan lagi dengan berbagai alasan.⁵⁰

Secara umum, cerita yang sama tentang sosok Datu Aling sebagai tokoh besar yang berjasa, berilmu, dan seorang pedagang besar di zamannya, juga disampaikan oleh masyarakat Lawahan-Rantau ketika menggambarkan ketokohan Datu Aling. Perjuangan dan ketokohan Datu Aling dalam menggerakkan perlawanan masyarakat Muning terhadap Belanda, menjadi argumentasi kuat bagi masyarakat Rantau untuk memberi kehormatan kepadanya. Wajar apabila makam Datu Aling di Simpang Kumbayau-Lawahan yang baru ditemukan pada tahun 2016 pun dianggap oleh masyarakat sebagai “makam keramat”. Terlebih apabila melihat proses penemuan dari makam Datu Aling yang dianggap laur biasa. Karena makam tersebut lama tidak diketahui keberadaannya; makam tersebut ditemukan berdasarkan petunjuk seorang ‘*alim*’ dari Solo; makam tersebut ditemukan dan diteliti oleh para sarjana arkeologi yang tergabung dalam *Perkumpulan Sarjana Arkeologi Kuburan* (Saarkub), makam tersebut terletak di tengah pepohonan yang lebat dan agak tersembunyi; di sekitar makam juga ditemukan tujuh sumur yang dulu dianggap bertuah, karena bisa memberi kesaktian bagi orang yang menjalani ritual mandi di sumur tersebut; dan menurut cerita masyarakat pada waktu-waktu tertentu di komplek makam tersebut terkadang mengeluarkan cahaya terang.⁵¹

50 Wawancara dengan Julak Rahman (keturunan Datu Aling, penjaga Komplek Makam Datu Aling, Simpang Kumbayau RT 2 Desa Lawahan Cempaka Tambarangan), 10 April 2017.

51 Wawancara dengan Mansyur (keturunan Datu Aling) dan Acil Warung, 10 April 2017.



Foto 4. Makam Datu Aling di Lawahan Rantau yang dianggap keramat.



Foto 5. Salah satu dari tujuh sumur tua peninggalan Datu Aling di Lawahan Rantau.

Berikutnya, kebangkitan dan perlawanan para pedagang dalam melawan Belanda di masa Perang Banjar ditunjukkan oleh pedagang-pedagang Banjar atau Pedagang Bakumpai yang berasal dari Marabahan. Tersebutlah nama-nama seperti H. Matarif, H. Matamin, dan Kyai Masdipati Jaya yang merupakan pedagang besar dari suku Dayak Bakumpai. Sebagai pedagang besar, mereka memiliki jaringan dagang bahkan sampai ke Singapura. Hasil hutan dari kampung sepanjang daerah aliran Sungai Barito mereka bawa dengan kapal besar (*jung*) untuk diperdagangkan ke Pulau Jawa. Sebelum Belanda mengambil alih perdagangan Banjarmasin, para pedagang Bakumpai adalah para pedagang sukses yang memiliki akses luas untuk membawa barang dagangan secara bebas, ke mana mereka suka. Kemudian balik lagi ke Banjarmasin dengan membawa barang dagangan untuk diperdagangkan kembali di Banjarmasin tanpa harus melalui prosedur, izin, dan membayar pajak yang tinggi. Tetapi setelah perdagangan Banjarmasin diambil alih dan dikuasai Belanda, maka yang terjadi dalam sistem perdagangan adalah hal yang sebaliknya. Karena dengan sistem monopoli dagang yang diterapkan oleh Belanda, para pedagang Bakumpai tidak bebas lagi untuk menjalankan usaha perdagangan mereka.

Sebelum intervensi Belanda, kelompok Pedagang Bakumpai adalah salah satu kelompok pedagang sukses yang memiliki banyak kapal dagang. Sampai pada pertengahan abad ke-19 perdagangan Banjarmasin masih didominasi oleh pedagang-pedagang pribumi, sedangkan pedagang yang non-pribumi masih belum terlalu berarti. Para pedagang Banjar menguasai pelayaran tradisional ke seluruh pelosok Nusantara dengan kapal-kapal dagang jenis *pinis* dan *bark*, bukan hanya ke Jawa, Makassar, atau Singapura, tetapi bahkan sampai ke India. Arus perdagangan ini mulai berubah menjelang akhir abad 19, ketika dominasi Belanda atas Tanah Banjar semakin kuat, Belanda kemudian mengoperasikan KPM yang saban satu minggu sekali melakukan pelayaran antara Banjarmasin-Surabaya. Pedagang-pedagang asing (Cina dan Belanda) mulai membuka usaha dagangnya secara intensif di Banjarmasin dengan memperkembangan barang perdagangan ekspor dan import, monopoli dagang diterapkan, pajak perdagangan semakin tinggi, serta pedagang dan perdagangan harus memiliki izin. Akibatnya, pelayaran tradisional pedagang Banjar memasuki abad ke-20 mulai surut dan redup, semakin terdesak, dan (akhirnya) berangsur-angsur habis, seiring dengan penghapusan Kesultanan Banjar dan penguasaan Belanda atas perdagangan dan Tanah Banjar secara keseluruhan. Karena penjajahan Belanda, tipe tradisional pedagang interinsuler yang dilakukan oleh pedagang Banjar atau pun pedagang Bakumpai harus berakhir.⁵² Karena penjajahan Belanda, maka pedagang Banjar pun mengalami keterasingan dari jaringan dan perdagangan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka semula.⁵³

Melihat kondisi yang demikian, maka kelompok Pedagang Bakumpai pun bangkit untuk melakukan perlawanan di bawah komando Kesultanan Banjar. Banyak di antara mereka yang kemudian bergerak di perairan Sungai Barito dan melakukan perampokan atas kapal-kapal dagang Belanda yang lewat, mereka

52 M. Idwar Saleh, *Sejarah daerah Kalimantan Selatan*, h.52-53.

53 Taufik Abdullah, "Kata Pengantar", h.iv.

juga ikut melakukan penyelundupan barang, mencegat kapal dagang yang mau masuk Banjarmasin, dan memotori masyarakat untuk terus melakukan gerakan perlawanan. Kelak kemudian, oleh masyarakat Bakumpai para pedagang ini kemudian dikenal sebagai “Pahlawan Kesultanan Banjar”.⁵⁴



Foto 6. Komplek Makam Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan.



Foto 7. Cungkup Makam Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan.



Foto 8. Kawasan Kuburan Tokoh Pahlawan Kesultanan Banjar di Marabahan.

⁵⁴ Wawancara dengan Mauliddin (penjaga Komplek Makam Pahlawan Kesultanan Banjar, Jl. Panglima Wangkang RT 10 Marabahan), 15 Mei 2017.

Berikut, bangkitnya perlawanan rakyat di bawah pimpinan Tumenggung Jalil bersama dengan Penghulu Abdul Gani dan Haji Abdullah pada tahun 1858 dan bersambung sampai kepada gerakan Penghulu Rasyid di Kelua merupakan klimaks dari berbagai penindasan, pungutan pajak, beban dan kondisi yang dihadapi oleh penduduk Banua Lima tersebut menyebabkan. Gerakan yang mereka lakukan ini mengawali munculnya berbagai gerakan perlawanan secara menyeluruh masyarakat Banjar se Banua Lima terhadap kolonialisme Belanda.⁵⁵

Pajak atau pungutan atau wajib kerja yang dibebankan pada penduduk pribumi terdapat beraneka ragam bentuknya. Para petani di Alabio dan Negara harus membayar sewa tanah kepada sultan sebesar 26 golden dan satu gantang beras kepada sekretaris sultan setiap tahun. Seluruh penduduk pribumi harus membayar sepersepuluh dari hasil panen mereka sebagai zakat. Zakat ini, masing-masing adalah untuk sultan, penghulu-penghulu, penjaga-penjaga masjid, kepala-kepala rakyat, dan orang-orang miskin. Mereka juga dibebani oleh pajak kepala atau menggantinya dengan kerja wajib. Kemudian, duapuluh desa dikenakan talian apabila mereka membawa hasil-hasil produksi mereka ke luar desa mereka untuk diperdagangkan. Sedangkan pajak intan ditentukan pada jumlah keratnya yang diperoleh pada waktu penambangan. Apabila penambang intan mendapat sebanyak tiga kerat, maka dia akan dikenakan pajak oleh sultan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.⁵⁶

Untuk masyarakat yang berasal dari Alabio, Sungai Banar, dan Kelua, setiap tahun harus mengirimkan sebanyak 200 orang yang akan menjadi pasukan pengawal sultan, mereka bergilir bertugas sebagai pengawal setiap 2 bulan sekali sebanyak 40 orang. Sementara, penduduk Amandit harus mengirimkan 40 orang dalam setiap bulan kepada sultan untuk menjadi pemelihara

55 Husni Abar, *Panembahan Muda Aling Datu Muning*, h.62.

56 *Ibid.*, h.59.

dan perawat kuda-kuda sultan. Apabila mereka menolak, maka mereka harus membayar uang pengganti sebesar 7 gulden.⁵⁷

Semua penduduk yang terkena wajib pajak kebanyakan adalah penduduk yang berasal dan tinggal di daerah Banua Lima yang meliputi Negara, Alabio, Amuntai, Kelua, dan Sungai Banar. Kebetulan, daerah Banua Lima ini dipimpin oleh seorang yang suka bertindak sewenang-wenang dan menerapkan hukuman mati pada penduduk di bawah kekuasaannya apabila mereka melanggar atau tidak mematuhi apa yang diperintihkannya, yakni Adipati Danu Redjo. Di samping itu, dia juga suka merebut secara paksa tanah-tanah milik penduduk pribumi, menetapkan denda-denda yang berat dan tidak adil, serta menaikkan besaran pajak yang harus dibayar oleh para petani dua kali lipat dari apa yang sudah ditentukan.⁵⁸

Jelas, apabila pecahnya perlawanan rakyat di daerah terhadap Belanda melalui berbagai gerakan, seperti halnya Gerakan Banua Lima yang dipelopori oleh Tumenggung Jalil (Amuntai) dan Penghulu Rasyid (Kelua-Tabalong), terus bersambung kepada gerakan-gerakan yang lain, menjadi bukti kuat keikutsertaan para pedagang di dalamnya dengan berbagai peran yang mereka mainkan. Maksudnya, dalam hal tertentu, mereka tidak hanya sebagai motor penggerak yang memicu munculnya perlawanan, pemimpin pergerakan, tetapi secara luas mereka telah memainkan banyak peran, sehingga perlawanan rakyat banjar terhadap kolonialisme Belanda berjalan secara berterusan dan memakan waktu yang cukup lama. Selain meleburkan diri dalam berbagai gerakan perlawanan yang muncul, para pedagang juga melakukan *sabotase* terhadap perdagangan Belanda, melakukan perampasan terhadap kapal dagang Belanda, menyediakan perbekalan untuk kelancaran perlawanan, dan lain-lain.

Peran penting mereka dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tersebut terus berlanjut ketika Banjarmasin

⁵⁷ Ibid., h.60.

⁵⁸ Ibid., h.60.

memasuki periode kebangkitan nasionalisme dalam rangka mencapai kemerdekaan melalui berbagai perkumpulan atau organisasi pergerakan. Para pedagang meleburkan diri dan di antaranya berperan aktif dengan memelopori pendirian organisasi keagamaan, gerakan nasionalisme, atau kelompok persatuan, mendirikan lembaga pendidikan, dan sebagainya.

Para pedagang sangat berperan dalam menyebarkan gagasan-gagasan organisasi pergerakan di masanya, sehingga organisasi yang sebelumnya hanya ada di Banjarmasin, berkembang dengan cepat ke daerah lainnya. Mereka adalah pedagang yang karena tuntutan pekerjaannya, sudah tentu seringkali hilir-mudik keberbagai daerah, terutama Banjarmasin ke Hulu Sungai. Mereka membeli karet basah, kelapa, dan ikan kering atau apa saja yang bisa dijadikan barang dagangan. Untuk menghemat modalnya, mereka pun membawa barang dagangan pokok, seperti gula putih, garam, bawang, dan asam Jawa. Di lain pihak, sebagai pedagang kain, mereka turut pula memperjualbelikan kain batik, kain polos, kain katun, dan sebagainya.⁵⁹

Di antara para pedagang yang menjadi pelopor pergerakan yang muncul di masa ini adalah H. Matarip (H. Muhammad Arip), seorang pedagang dari Bakumpai (Marabahan). H. Matarip adalah seorang pedagang besar yang aktif pergi-pulang tujuan Surabaya-Banjarmasin dan dikenal sebagai pembawa organisasi Sarekat Islam (SI) ke Kalimantan Selatan. sebab, ketika berada di Surabaya, H. Matarip aktif dan turut serta dalam organisasi pergerakan ini dengan menjabat sebagai Komisaris Sarekat Islam di Surabaya. Atas saran pendiri Sarekat Islam, HOS. Cokroaminoto kepadanya agar mendirikan cabang SI di Banjarmasin, maka H. Matarip bersama rekan-rekannya, seperti Sosrokardono, kemudian mendirikan SI Cabang Banjarmasin dan beberapa kota lainnya di Kalimantan Selatan.⁶⁰

59 *Ibid.*, h.95.

60 Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, h.94-95.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah di Alabio pada tahun 1925 juga dipelopori oleh para pedagang, di antaranya adalah H. Usman Amin, yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah dan kontribusi dari organisasi ini terhadap kemajuan masyarakat. Sehingga, ketika pulang ke Alabio, H. Usman Amin kemudian mengusulkan kepada H. Jaferi, seorang tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah. Bermula dari Alabio inilah, kemudian cabang-cabang Muhammadiyah di daerah-daerah yang lain di Kalimantan Selatan juga dibentuk, seperti di Barabai tahun 1931, di Martapura tahun 1932, dan lain-lain.⁶¹

61 *Ibid.*, h.95.

BAB V

PERANG BANJAR DAN GERAKAN PERLAWANAN

A. Latar Belakang

Perang Banjar adalah perang yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Banjar ketika menghadapi kolonialisme Belanda. Perang ini terjadi pada tahun 1859-1905. Menurut Gazali Usman, Perang Banjar yang pertama kali meletus pada 1859 adalah perang yang dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan wilayah dari campur tangan penjajah Belanda yang telah menodai tradisi, merusak norma-norma agama, dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Perang Banjar bukanlah perang feodalis, tetapi perang yang dilakukan untuk membela kepentingan rakyat dan melepaskan mereka dari sikap kesewenang-wenangan Belanda yang ingin menguasai mereka, perang untuk membela keutuhan bernegara dan berbangsa, serta perang dalam rangka membela agama dari para penjajah yang telah menginjak-injak dan melecehkan.¹ Mayur menegaskan bahwa Perang Banjar adalah perang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menjunjung agama dari segala macam penjajahan ataupun intervensi dari pihak asing.²

Lalu, bagaimana permulaan dan apa yang menjadi sebab-musabab pecahnya Perang Banjar? Secara ringkas, dalam berbagai

1 A. Gazali Usman, "Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional P. Antasari", h.4.

2 Gusti Mayur, *Perang Banjar*, h.5.

sumber dijelaskan bahwa Perang Banjar diawali dengan terjadinya penyerangan pasukan Banjar yang berasal dari pelbagai daerah di bawah pimpinan P. Antasari terhadap benteng batubara Belanda *Oranje Nassau* di Pengaron (Kabupaten Banjar) pada 28 April 1859. Penyerangan terhadap benteng Belanda ini menandai dimulainya peperangan terhadap Kolonial Belanda oleh masyarakat Banjar dengan diikuti oleh berbagai rentetan peristiwa yang lainnya. Penyerangan ini juga telah menumbuhkan semangat berjuang dan perlawanan rakyat terhadap Belanda untuk mengembalikan agama dan adat serta *maruah* dan kedaulatan di seluruh wilayah Kesultanan Banjarmasin.

Menurut Saleh, pecahnya Perang Banjar tidak hanya ditandai oleh serangan pasukan Banua Ampat di bawah pimpinan P. Antasari terhadap Pengaron, tetapi juga serangan rakyat Banjar terhadap sejumlah pusat-pusat kekuatan Belanda lainnya, seperti serangan yang terjadi di kawasan tambang batubara Kalangan, Banyu Irang, dan Bangkal (Kabupaten Banjar), penyerangan yang terjadi di daerah Marabahan (Kabupaten Barito Kuala), penyerangan terhadap daerah tambang batubara Hermina di Sungai Durian (Kabupaten Tanah Bumbu), tambang batubara di Gunung Jabok, penaklukan Benteng Tabanio (Kabupaten Tanah Laut), peperangan di Pulau Petak, Pulau Telo dan sekitarnya (Kabupaten Kuala Kapuas), penyerangan terhadap kantor pemerintahan Belanda di Martapura dengan seluruh kekuatan rakyat Banua Ampat dan Banua Lima, dan lain-lain. Sampai pada akhir tahun 1859 dan tahun-tahun sesudahnya, peperangan ini berkisar pada tiga daerah utama, yakni daerah Banua lima dan daerah di sebelah utaranya yang dipimpin oleh Tumenggung Jalil (bergelar Kiyai Adipati Anom Dinding Raja); daerah sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman dan Penghulu H. Bujasin; dan daerah Barito, Kapuas, Katingan sekitarnya dipimpin oleh P. Antasari dan Tumenggung Suropati.³

3 M. Idwar Saleh, *Lukisan Perang Banjar 1859-1865*, h.11.

Dalam perkembangannya kemudian, penyerangan dan pertempuran terjadi secara serentak diberbagai wilayah yang menjadi basis kekuatan Belanda, tidak hanya di Martapura dan sekitarnya, tetapi juga di Hulu Sungai (Banua Ampat dan Banua Lima), sampai Tabalong, Tanah Laut sampai Pagatan, terlebih-lebih di sepanjang daerah aliran Sungai Barito dan Kapuas. Dampak dari berbagai penyerangan tersebut membuat hampir seluruh kekuatan Belanda pada saat itu lumpuh dan tambang batubara yang merupakan usaha penting Belanda terhenti beroperasi. Sehingga, Belanda kemudian memaklumkan keadaan darurat perang (*in staat van oorlog en Verzet*) di seluruh wilayah Kesultanan Banjarmasin dan mendatangkan tambahan pasukan serta bantuan kapal perang dari Batavia, seperti kapal perang Arjuna, Celebes, Montrado, Bone, dan Van Oos, untuk menghadapi perlawanan rakyat Banjar.

Adapun latar belakang pecahnya Perang Banjar sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai dan banyak faktor. Setidaknya, dimulai oleh perselisihan intern penguasa Kesultanan Banjar yang dicampurtangani oleh Belanda, seperti yang terjadi pada tahun 1785 mengenai pergantian Sultan Muhammad. Namun, dengan bantuan Belanda yang mendapat kompensasi sebagian wilayah Kesultanan Banjar, Pangeran Nata atau Sultan Tahmidullah II (1785-1808) berhasil naik tahta dan menyingkirkan Pangeran Amir bin Pangeran Muhammad Aliuddin. Perselisihan dan perebutan kekuasaan ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Adam (1825-1857). Lagi-lagi Belanda ikut campur dan membantu Sultan Tamjidullah II (1857-1860) untuk naik tahta, padahal seharusnya yang berhak menggantikan Sultan Adam adalah P. Hidayatullah. Kondisi demikian menyebabkan ketidakpuasan berbagai kalangan, baik terhadap pengangkatan Sultan Tamjidullah II, maupun terhadap Belanda sendiri yang terlalu ikut campur, terlebih dengan dihapuskannya secara sepihak Kesultanan Banjar oleh Belanda pada 11 Juni 1860.⁴

4 A. Gazali Usman, "Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional P. Antasari", h.4.

Menurut Yusliani Noor (2001), Perang Banjar meletus ketika *Benteng Oranje Nassau* (Pengaron) diserang oleh pasukan P. Antasari pada tahun 1856. Pemicu perang ini karena Belanda telah dianggap mencampuri terlalu jauh urusan intern Kesultanan Banjar, yakni mengenai pergantian Sultan Banjar pasca wafatnya Sultan Adam. Belanda lebih memilih P. Tamjid bin P. Muda Abdurrahman dari istri selir keturunan Cina sebagai pengganti Sultan Adam, sedangkan wasiat Sultan Adam sendiri yang semestinya menggantikannya adalah P. Hidayatullah sebagai Putra Mahkota dan keturunan dari P. Abdurrahman dengan istrinya yang bernama Ratu Siti. Namun Belanda tidak mau tahu dan tetap melantik P. Tamjid sebagai sultan boneka serta memindahkan pusat Kesultanan Banjar ke daerah Sungai Mesa Banjarmasin sampai akhirnya kemudian secara sepihak menyatakan pembubaran Kesultanan Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 1860.⁵

Aspek lain yang juga menjadi sebab pecahnya Perang Banjar dan dianggap sebagai penyebab kelanjutan dari perseteruan rakyat Banjar dengan Belanda, bahkan merupakan faktor awal pemicu kedatangan Belanda adalah faktor perdagangan. Faktor ini kemudian berkembang menjadi sikap berkuasa dan monopoli Belanda terhadap arus dan jalur perdagangan diseluruh wilayah Kesultanan Banjar. Monopoli perdagangan ini diikuti dengan penguasaan Belanda atas wilayah tertentu di Tanah Banjar sebagai hasil konpensasi dan strategi licik mereka dalam mengikutcampuri urusan intern di Kesultanan Banjar. Melalui perusahaan dagangnya VOC, Belanda telah melakukan monopoli perdagangan; lada, rotan, damar, dan hasil-hasil tambang, seperti emas dan intan. Akibat monopoli perdagangan Belanda mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Tidak hanya antara pedagang Belanda dengan pedagang Banjar, tetapi juga dengan pedagang-pedagang dari kawasan lain, bahkan dengan pedagang asing, seperti pedagang dari Inggris, Cina, Arab, dan India. Dominasi Belanda terhadap perdagangan telah menghambat laju dan dinamisasi

5 Yusliani Noor, *Sejarah Perjuangan Umat Islam Kalimantan Selatan*.

perdagangan Banjar ke berbagai kawasan dengan kelompok pedagang dari luar, berbanding sebelum penguasaan Belanda. Terlihat, apabila tujuan semula Belanda datang ke Banjarmasin untuk berdagang dan bersaing secara bebas dengan pedagang Banjar dan pedagang dari berbagai kawasan lain hanyalah kedok untuk Belanda melakukan kolonisasi Tanah Banjar.

Secara akumulasi pecahnya Perang Banjar disebabkan oleh banyak faktor, misalnya penyebab pecahnya Perang Banjar bisa dilihat dari dua aspek; faktor dari luar, yakni perkembangan dunia pada saat itu, yakni abad ke-19 yang disebut sebagai abad kolonialisme dan imperialisme modern, dan faktor dari dalam, yakni terjadinya perpecahan dan perebutan kekuasaan dalam Kesultanan Banjar.⁶

Faktor dari luar adalah perkembangan dunia yang terjadi pada saat itu, seiring dengan revolusi industri di Inggris dan Perancis dengan ditemukannya mesin uap, kapal api, dan berdirinya pabrik-pabrik di negara Eropa dengan menggunakan mesin uap yang bahan bakarnya adalah batubara. Batubara kemudian menjadi komoditas dan primadona baru yang sangat diperlukan untuk menggerakkan berbagai mesin industri. Batubara juga menjadi bahan bakar untuk kapal-kapal yang berlayar, sehingga mahal harganya. Sementara, kapal-kapal Belanda, baik kapal dagang maupun kapal perang yang memerlukan batubara untuk bahan bakar mesin uapnya, menganggap terlalu mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan batubara dari negara Eropa lain. Sehingga, batubara yang sangat besar potensinya di Tanah Banjar dan telah ditambang oleh rakyat secara tradisional menjadi incaran Belanda. Tambang Batubara *Oranje Nassau* di Pengaron adalah tambang batubara pertama yang didirikan oleh Belanda pada 1849. Tambang batubara ini menjadi simbol penguasaan dan dimulainya kolonisasi Belanda di Tanah Banjar.

Setelah penguasaan wilayah tambang batubara di Pengaron, secara licik, Belanda juga merencanakan untuk terus merebut

6 M. Idwar Saleh, *Lukisan Perang Banjar 1859-1865*, h.2.

dan menguasai wilayah-wilayah Tanah Banjar yang memiliki deposit (cadangan) batubara, terutama Martapura-Pengaron dan Kotabaru. Dalam menjalankan rencananya ini, Belanda telah menggariskan beberapa kebijakan terhadap wilayah Banjar. Itu sebab, dengan harapan mendapat tanah konsesi dan kontrak perjanjian baru, Belanda mengatur strategi agar konflik politik di Kesultanan Banjar terus berkejolak; Belanda membantu pihak Kesultanan Banjar yang pro dengan mereka, mau mengikat perjanjian, memenuhi kewajibannya (kontrak perjanjian) yang telah disepakati, serta mengizinkan dan tidak menghambat produksi tambang batubara Belanda. Agar bebas menjalankan misinya, maka di akhir pemerintahan Sultan Adam, Belanda pun mengangkat P. Tamjid sebagai Sultan Banjar yang pro Belanda sampai akhirnya mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar secara sepihak pada 11 Juni 1860.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Saleh, disimpulkan bahwa faktor yang dianggap sebagai penyebab pecahnya Perang Banjar ini ada dua, yakni:

1. Faktor Ekonomi, Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah, dan hal itu sudah dimulai oleh Belanda secara bertahap sejak abad ke-17. Sampai kemudian pada abad ke-19, Belanda bermaksud menguasai Tanah Banjar secara menyeluruh untuk melaksanakan *Pax Netherlandica*. Terlebih ketika Tanah Banjar diketahui memiliki banyak tambang batubara; di Pangaronan, Tanah Laut, Kalangan, dan Sungai Durian;
2. Faktor Politik, Belanda banyak ikut campur bahkan mendominasi urusan tahta Kesultanan Banjar, sehingga menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Terlebih pada saat menentukan pengganti Sultan Adam, Belanda melawan tradisi atau *tutus* kesultanan dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar yang

sebenarnya tidak berhak atas tahta. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan Mangkubumi.⁷

Adapun yang menjadi penyebab umumnya adalah bahwa rakyat memang tidak senang dengan kehadiran Belanda dan penguasaan Belanda di Tanah Banjar, terlebih dalam hal monopoli perdagangan dan penguasaan pertambangan; Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan; dan Belanda bermaksud menguasai Tanah Banjar karena di daerah ini banyak ditemukan pertambangan dan cadangan batubara. Sedangkan yang menjadi penyebab khusus sekaligus menandai terjadinya konstelasi politik dan perpecahan di kalangan Kesultanan Banjar adalah karena pengangkatan Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, bahkan Belanda kemudian menganggap Pangeran Tamjidullah yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan, sebagai Sultan Banjar. Kelanjutan dari konstelasi politik dan perpecahan ini diteruskan oleh Belanda dengan menghapuskan Kesultanan Banjar pada 1860.

Konflik yang terus berkepanjangan akibat campur tangan Belanda yang terus-menerus dalam kesultanan, pemaksaan monopoli perdagangan, konsesi-konsesi pertambangan yang sepihak, serta kuatnya misi kaum Nasrani (*zending*) yang masuk ke Tanah Banjar dengan dukungan tentara Hindia Belanda, kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit, pembatasan-pembatasan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan perdagangan, dan lain-lain, menjadi latar belakang gambaran yang terjadi sebelum pecahnya Perang Banjar.

Perang Banjar juga dilatarbelakangi oleh konstelasi serta situasi politik yang tidak stabil di Kesultanan Banjar ketika itu. Ketidakstabilan politik di dalam Kesultanan Banjar dimulai ketika terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan di kalangan dan semakin runcing ketika Belanda masuk dan ikut campur di

7 M. Suriansyah Ideham dkk, *Sejarah Banjar*, h.188-190.

dalamnya. Puncak perpecahan dan intervensi Belanda terhadap Kesultanan Banjar terjadi, pasca meninggalnya Sultan Adam (1825-1857 M) dan diteruskan oleh Sultan Abdurrahman yang juga meninggal secara mendadak pada 1857. Praktis, sejak meninggalnya Sultan Muda Abdurrahman ini timbullah benih-benih pertentangan antara keluarga bangsawan dan merupakan salah satu faktor yang mempercepat hancurnya Kesultanan Banjar.

Secara intern di kalangan bangsawan Banjar, setidaknya ada tiga golongan yang berebut kekuasaan dalam Kesultanan Banjar pasca meninggalnya Sultan Adam dan Sultan Abdurrahman, yakni:

1. Pangeran Tamjidillah, Putera Sultan Muda Abdurrahman dengan Nyai Besar Aminah (seorang Cina yang berasal dari daerah Pacinan Banjarmasin). Prilaku dan tindak-tanduk dari P. Tamjid tidak disenangi para ulama dan bangsawan, karena P. Tamjid senang bergaul dengan Belanda dan ikut bermabuk-mabukkan. Namun, dalam birokrasi pemerintahan P. Tamjid sangat dikenal di kalangan orang-orang Belanda dan cukup disenangi. P. Tamjid dikenal karena dia terbiasa membantu Pangeran Mangkubumi Nata untuk berurusan dengan Residen Belanda;
2. Pangeran Hidayatullah, Putera Sultan Muda Abdurrahman dari ibu seorang kalangan bangsawan bernama Ratu Siti, puteri dari Pangeran Mangkubumi. Dia seorang yang taat beribadat, berakhlak terpuji, disenangi kalangan luas masyarakat Banjar, bahkan disenangi pula oleh para ulama;
3. Pangeran Prabu Anom, Putera Sultan Adam adik dari Sultan Muda Abdurrahman. Ibunya adalah Ratu Komala Sari yang sangat besar pengaruhnya di kalangan Dewan Mahkota dan terhadap Sultan Adam. Ibunya sangat berambisi untuk menjadikan Pangeran Prabu Anom menjadi putera mahkota. Sayangnya, Prabu Anom dikenal

sebagai seorang yang bertindak sewenang-wenang dan tindakannya sering tidak berpihak kepada rakyat, malah menyakiti hati masyarakat.

Guna mengisi kekosongan jabatan Sultan Banjar, Ratu Komala Sari pernah mengajukan puteranya, Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi untuk mendampingi Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar, tetapi ditolak oleh Belanda dan Belanda malah menunjuk Pangeran Tamjid sebagai Sultan Banjar. Penolakan Belanda untuk pengangkatan Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi dan Pangeran Tamjid sebagai Sultan Banjar mendapat kritis yang keras dari Ratu Komala Sari. Karenanya, Ratu Komala Sari pun mengemukakan beberapa argumentasi sebagaimana yang ditulis Van Rees dalam *De Bandjermasinche Krijg* sebagai berikut:

“Menurut adat, yakni menurut norma-norma hukum yang umum di mana-mana pengganti raja berdasarkan garis keturunan yang lurus, tidak ada orang lain yang berhak dan dapat menjadi pengganti raja selain Hidayat. Tamjidillah walaupun anak yang lebih tua dari Hidayat, tetapi ia adalah darah campuran tidak “tutus” yang tidak akan mungkin memangku jabatan sebagai sultan selama masih ada turunan yang berhak menurut undang-undang. Selain dari hak turun-temurun yang tidak dapat diganggu-gugat, tampaknya Hidayat mendapat anugerah untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi itu dari sifatnya yang wajar. Selain dengan kesetiaan taat bertaqwa menjalankan ibadah agama, Hidayat adalah pecinta tanah air (patriot) yang bernyala-nyala, suka memberikan pertolongan, dan seorang budiman, sehingga dihormati oleh tiap-tiap orang juga oleh Sultan Adam.”⁸

Situasi semakin bertambah buruk sehingga menyulitkan pemerintah Belanda sendiri, akhirnya Belanda merubah sikapnya dengan mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Seterusnya, bulan April 1859 adalah bulan yang

8 Gusti Mayur, *Perang Banjar*, h.10.

paling panas suhu politiknya dalam seluruh wilayah Kesultanan Banjar akibat pertentangan yang terjadi.

Sementara, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari telah menyusun kesatuan kekuatan rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda secara menyeluruh, baik gerakan rakyat yang ada di Banua Lima, Tanah Laut, maupun Kapuas dan Tanah Dusun (Sungai Barito). Semula, Pangeran Hidayatullah melarang gerakan rakyat untuk mengadakan penyerbuan secara langsung pada bulan April terhadap markas Belanda sesuai dengan yang telah direncanakan, mengingat pada waktu itu kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan dinilai Pangeran Hidayatullah masih belum sebanding dengan kekuatan Belanda, sehingga perlu diimbangi dengan taktik perang menyeluruh. Namun, pada pertengahan bulan April 1859, Sultan Kuning dari Muning (Rantau) sebagai wakil dari Panembahan Datu Aling mengutus empat orang untuk menghadap Pangeran Hidayatullah dan meminta izin untuk memulai penyerangan di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Menyadari bahwa, gerakan rakyat sudah tidak terbendung lagi dan perang memang harus segera dilakukan, maka akhirnya Pangeran Hidayat pun merestui, sehingga kemudian rakyat bergerak dan menyerang benteng batubara *Oranje Nessau* di Pengaron (Martapura) sebagai tempat paling penting bagi Belanda.



Foto 9. Pintu masuk bekas bangunan benteng batubara Oranje Nessau di Pengaron.



Foto 10. Dinding bekas bangunan benteng batubara Oranje Nessau di Pengaron.

Penyerangan terhadap benteng batubara *Oranje Nessau* di Pengaron di bawah pimpinan Pangeran Antasari menjadi penanda pecahnya Perang Banjar. Karena pertempuran melawan penjajahan Belanda tidak berhenti sampai di situ saja, namun terus berlanjut dengan berbagai gerakan perlawanan dan peristiwa-peristiwa penting sebagai aksi perlawanan terhadap Belanda di seluruh wilayah Tanah Banjar. Perlawanan tidak hanya terjadi di kawasan Banua Lima, tetapi juga mencakup Tanah Laut, Bati-Bati, Tabanio, Sungai Durian, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan juga Kapuas hingga ke daerah sepanjang aliran Sungai Barito (Tanah Dusun, Muara Teweh, Puruk Cahu, dan seterusnya). Seperti gerakan perlawanan Datu Aling di Muning Rantau, gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Tumenggung Antaluddin (1861), gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Panglima Wangkang (1870), perlawanan dan peristiwa *Amuk Hantarukung* di Kandangan oleh Bukhari dan Santar (1899), perlawanan Penghulu Rasyid di Kelua-Tabalong, kesatuan gerak di bawah pimpinan Demang Leman (Martapura-Pengaron), di bawah pimpinan H. Bujasin (Tanah Laut), sampai perlawanan terhadap Belanda dianggap berakhir seiring dengan meninggalnya Sultan Muhammad Seman, berakhirnya Pegustian dan Temenggung, dan ditaklukkannya benteng pejuang Banjar di Menawing-Barito.⁹

B. Konstelasi Politik

Kesultanan Banjarmasin sangat kaya dengan hasil-hasil alam. Hasil-hasilnya yang utama ialah lada, kayu, rotan, damar, madu dan juga intan. Tentu saja hasil-hasil ini menarik perhatian pedagang-pedagang Indonesia dari pulau-pulau lain. Lebih-lebih lagi letak Banjarmasin yang sangat strategis dalam jalur perdagangan. Kesultanan Banjarmasin berada di tengah-tengah pelayaran antara Sumatera di Barat, Jawa di Selatan, serta Sulawesi dan Maluku di Timur. Oleh sebab itu pelayaran dan perdagangannya menjadi

9 M. Idwar Saleh, *Lukisan Perang Banjar 1859-1868*, h.2-3.

ramai. Kerajaannya menjadi besar, rakyatnya makmur dan hidup dalam damai. Selain perahu-perahu pedagang Indonesia, kapal-kapal dagang asing juga sudah ada yang singgah di pelabuhan Banjarmasin sebelum terjadi kolonialisme Belanda. Bangsa-bangsa itu misalnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan terutama sekali Belanda. Sejak abad ke-17, Kesultanan Banjar sudah mempunyai hubungan dagang yang erat dengan berbagai kawasan.

Lada yang menjadi produk andalan dan maskot perdagangan Banjarmasin ternyata sangat menguntungkan. Oleh karena itu Belanda ingin memonopoli perdagangan lada untuk memenuhi permintaan dan pangsa pasar Eropa. Monopoli lada artinya hanya Belanda saja yang boleh berdagang lada, sedangkan bangsa-bangsa asing, apalagi pedagang Indonesia dari daerah yang lainnya dilarang untuk menjual-beli lada. Guna merealisasikan keinginannya tersebut, Belanda melakukan berbagai cara yang licik, bahkan dengan menggunakan kekuatan senjata. Sampai kemudian, satu persatu Sultan Banjar terpaksa atau dipaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dagang yang bersifat monopoli yang telah disodorkan Belanda dan akhirnya Belanda pun berhasil memegang kendali dan memonopoli perdagangan di Banjarmasin, bahkan diteruskan dengan melakukan penjajahan.

Pada masa permulaan di bawah perjanjian atau kontrak dagang dengan VOC, Kesultanan Banjar sampai abad ke-18 masih merupakan kerajaan yang berdaulat. Kesultanan Banjar sampai saat itu masih bisa bertahan dan tidak mendapatkan campur tangan yang inetns dari VOC. Padahal, campurtangan Belanda sendiri sudah menggurita untuk penguasaan Jawa ketika terjadi konflik di Kesultanan Mataram. Barulah pada pertengahan abad ke-19, kekuasaan Belanda mendominasi, seiring dengan perpecahan dan perebutan tahta dalam Kesultanan Banjarmasin.

Perpecahan dan perebutan ini diawali ketika Sultan ke-15 Mohammad Aminullah wafat. Sultan Aminullah wafat dengan meninggalkan tiga orang putera, namun karena semuanya masih terlalu muda, maka kepemimpinan sultan dimandatkan sementara kepada Pangeran Nata Alam saudara Sultan Aminullah. Dalam

perkembangannya, Pangeran Nata Alam merasa pantas dan berkeinginan untuk menjadi Sultan secara definitif, maka satu persatu pewaris kerajaan yang sah disingkirkan. Namun salah satu dari ketiga anak Sultan Aminullah, yakni Pangeran Amir berhasil lolos dan berencana melakukan perlawanan. Pangeran Nata Alam yang sudah mengangkat dirinya sebagai sultan lalu meminta bantuan Belanda untuk membantu mengatasi perlawanan Pangeran Amir yang mendapat bantuan dari pasukan Bugis Pasir. Pada 1875 dengan 3000 orang laskar Bugis, Pangeran Amir melakukan penyerangan ke Martapura, namun berhasil dikalahkan oleh Belanda. Pasukan Belanda yaang dipimpin oleh Kapten Christoffel Hoffman berhasil menghalau dan menangkap Pangeran Amir yang kemudian dibuang ke Ceylon. Bantuan yang diberikan oleh Belanda bukan tanpa pamrih, tetapi Sultan Nata Alam harus menandatangani kesepakatan yang telah dibuat sebagai bayaran atas bantuan yang telah diberikan Belanda.

Perjanjian ini merupakan awal pengaruh dan dominasi Kolonial Belanda dalam mencampuri urusan internal Kesultanan pada masa pemerintahan sultan yang berikut dan menjadikan Kesultanan Banjar di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Walaupun di masa kekuasaan Sultan Nata Alam, Kesultanan Banjar masih eksis dan bisa bertahan, karena kepandaian politik dari sultan, namun pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Saidillah dan Sultan Adam, Kesultanan Banjar sebenarnya sudah semakin lemah dan terus digerogoti oleh Belanda. Puncaknya adalah pasca berakhirnya kepemimpinan Sultan Adam dan gonjang-ganjing perpecahan pun tidak terhindarkan lagi. Lemahnya kekuasaan Sultan Banjar dapat dilihat pada masa pemerintahan Sultan Adam. Sultan Adam tidak dapat menghadapi tekanan-tekanan Belanda, salah satunya ketika Belanda dengan paksa meminta dibukanya tambang batubara. Selain itu konflik dari perebutan tahta kerajaan juga terlihat ketika ia kehilangan putera mahkota Sultan Muda Abdurahman yang sudah ditetapkan sebagai penggantinya.

Kematian putera mahkota ini membuat terjadinya perebutan tahta antara keturunannya setelah ia meninggal. Ada tiga

pihak yang merasa dirinya paling berhak menjadi Sultan yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Prabu Anom. Masing-masing pihak merasa memiliki pendukung untuk menjadikan dirinya sebagai Sultan Banjar. Namun karena disukai oleh Belanda, maka Pangeran Tamjid-lah yang kemudian ditunjuk sebagai Putera Mahkota. Pada 1857 Sultan Adam wafat, ia meninggalkan kerajaannya dalam keadaan kacau dan sesudah dua hari, oleh Belanda kemudian Pangeran Tamjidillah dinobatkan sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi atau wakilnya.

Di bawah kepemimpinan Pangeran Tamjid rakyat yang sudah hidup dalam kesusahan sangat tidak puas. Hal ini karena Pangeran Tamjid hanya mengurus dan mengutamakan kepentingan Belanda dan kepentingan diri sendiri. Selain itu konflik antar Pangeran Tamjid dan Pangeran Hidayatullah juga semakin jelas terlihat. Perselisihan antara keduanya membuat terjadinya kerusuhan-kerusuhan di beberapa wilayah kerajaan. Pangeran Tamjid menuduh bahwa kerusuhan-kerusuhan tersebut didalangi oleh Pangeran Hidayatullah. Padahal, kemarahan rakyat muncul karena ketidakberesan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dan kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin susah. Rakyat kemudian membentuk gerak-gerakan untuk memberi tekanan kepada Belanda dan Pangeran Tamjid. Di mana pada saat itu setidaknya ada empat gerakan protes dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, yaitu gerakan Banua Lima dipimpin oleh Tumenggung Jalil; gerakan Muning dipimpin oleh Panembahan Datu Aling; gerakan Tanah Laut, Martapura, dan Pengaron dipimpin oleh Demang Lehman; dan Gerakan Kapuas-Kahayan serta Sungai Barito yang dipimpin oleh Tumenggung Surapati.

Sayangnya, gerakan rakyat ini masih terpisah-pisah dan belum ada pimpinan yang bisa menyatukan. Pada saat situasi yang demikian, muncul Pangeran Antasari yang menyadari bahwa gerakan perlawanan rakyat tersebut belum terorganisir. Maka, sebagai *tutus* dari Kesultanan Banjar, Pangeran Antasari pun melakukan pendekatan untuk menyatukan kekuatan rakyat

yang terpisah-pisah tersebut. Akhirnya, Pangeran Antasari berhasil mengorganisir dan menyatukan keempat gerakan rakyat serta menyakinkan para pemimpinnya untuk bersatu melawan Belanda dan Sultan Tamjidillah sebagai antek dari penjajah. Dalam memimpin gerakan rakyat ini Pangeran Antasari selain memperjuangkan merembut kembali Kesultanan Banjar, dia juga berupaya untuk mematahkan dominasi Belanda di dalam kesultanan, serta kolonialisme Belanda yang telah menyengsarakan kehidupan rakyat banyak. Karena itulah, maka pada akhirnya gerakan dan perjuangan Pangeran Antasari pun mendapat simpatik dan dukungan dari kaum ulama yang menyadari kewajiban mereka untuk membela kebenaran dan berjuang *fi sabilillah* melawan Belanda.

C. Gerak Perlawanan

Di bawah pimpinan Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda semakin meluas dan semangat yang berkobar terus menggelora. Pangeran Antasari telah berhasil menyatukan gerakan perlawanan rakyat dan menghimpun pasukan sebanyak 3.000 orang untuk menyerang Belanda, terutama benteng batubara *Orangje Nessau* di Pengaron. Serangan itu pada tanggal 28 April 1859. Di samping itu, kawan-kawan seperjuangan Pangeran Antasari juga telah mengadakan penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang dijumpai. Pada saat Pangeran Antasari mengepung benteng Belanda di Pengaron, Kiai Demang Leman dengan pasukannya telah pula bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda di Pengaron. Bersama-sama dengan Haji Nasrun pada tanggal 30 Juni 1859, Kiai Demang Leman menyerbu pos Belanda yang berada di Martapura. Dalam bulan Agustus 1859 bersama Haji Bujasin dan Kiai Langlang, Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio.

Pada tanggal 27 September 1859 pertempuran terjadi juga di benteng Gunung Lawak yang dipertahankan oleh Kiai Demang Leman dan kawan-kawan. Dalam pertempuran ini kekuatan

pasukan Kiai Demang Leman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan musuh sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Karena rakyat berkali-kali melakukan penyerangan gerilya, Belanda setelah beberapa waktu lamanya menduduki benteng tersebut, kemudian merusak dan meninggalkannya. Sewaktu meninggalkan benteng, pasukan Belanda mendapat serangan dari pasukan Kiai Demang Leman yang masih aktif melakukan perang gerilya di daerah sekitarnya.

Sementara itu, Tumenggung Surapati menyanggupi permintaan Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari sebagai taktik mengalahkan Belanda. Setelah mengadakan perundingan di atas kapal *Onrust* pada bulan Desember 1859, Tumenggung Surapati dengan anak buahnya berbalik menyerang tentara Belanda yang berada di atas kapal tersebut, kemudian merebut senjata dan menenggelamkannya. Benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang mendapat serangan dari Belanda dalam bulan Februari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Tumenggung Surapati meninggalkan benteng tersebut.

Tumenggung Jalil yang mengadakan perlawanan di daerah Amuntai dan Negara mendapat serangan dari pasukan Belanda dengan bantuan Adipati Danureja, yang sejak semula setia kepada Belanda. Atas jasanya turut mengalahkan Tumenggung Jalil, Danureja dijadikan dan diangkat sebagai kepala daerah Benua Lima. Tampaklah dalam peperangan ini Belanda menggunakan pajabat kerajaan yang memihak kepadanya untuk menindas perlawanan rakyat.

Sebagaimana telah disinggung, Pangeran Hidayat condong kepada rakyat. Karena sikap ini, ia kemudian diturunkan dari kedudukannya sebagai mangkubumi oleh Belanda. Desakan Belanda melalui suratnya bertanggal 7 Maret 1860 yang berisi permintaan supaya ia menyerah dalam waktu 12 hari, mendapat jawaban tegas dari Pangeran Hidayat bahwa ia tidak akan menyerah. Dengan demikian, ia dianggap benar-benar telah memberontak terhadap Belanda.

Kekosongan jabatan sultan dan mangkubumi dalam Kesultanan Banjar, mengakibatkan Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Karena tindakan pemerintah Hindia Belanda itu, mengakibatkan kemarahan rakyat dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat, sehingga di samping perlawanan yang sedang berlangsung, di daerah-daerah timbul pula perlawanan baru, seperti daerah Hulu Sungai (Banua Lima), Tanah Laut, Barito, dan Kapuas Kahayan. Tempat-tempat seperti Tambarangan, Muning, Amawang, Gadung dan Barabai dijadikan pusat-pusat perlawanan untuk daerah Hulu Sungai, sedangkan daerah Tanah laut pusat perlawanan terdapat, antara lain di Riam Kiwa, Riam Kanan, dan Tabanio. Sedangkan di Kapuas di daerah Pulau Telo dan Pulau Petak. Sementara di Barito adalah di Muara Teweh dan Puruk Cahu.

Dengan meluasnya perlawanan rakyat ini pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin semakin mengalami kesulitan. Perluasan pengaruh perlawanan di kalangan rakyat dibatasi. Kepala-kepala daerah dan para ulama diberi peringatan agar mereka menunjukkan sikap setia kepada pemerintah Belanda dan agar mereka mengecam kaum pejuang. Peringatan tersebut dikemukakan dengan disertai ancaman yang berat bagi yang tidak mengindahkannya.

Kepala-kepala daerah dan para ulama menjadi cemas karena adanya pengumuman tersebut. Namun, kebanyakan diantara mereka tidak mengindahkan ancaman tersebut. Mereka melarikan diri dan bergabung dengan para pejuang. Sementara itu, Pangeran Hidayat melakukan perlawanan dari daerah satu ke daerah lainnya bersama orang-orang yang setia kepadanya. Pada tanggal 16 Juni 1860 Pangeran Hidayat bertempur selama satu minggu di Ambawang, kemudian terpaksa mundur karena persenjataan Belanda ternyata lebih kuat. Pasukan Hidayat ternyata sampai di Wang Bangkal. Tidak lama di sini pasukan Hidayat diserang pasukan Belanda pada tanggal 2 Juli 1860. Dalam pertempuran ini pun pasukan Pangeran Hidayat terdesak dan terpaksa mundur lagi.

Selama dalam pengunduran ini, pasukannya selalu mengadakan gangguan-gangguan atau serangan kecil terhadap pasukan Belanda berupa penyergapan secara gerilya. Mereka bertahan di tempat itu dan baru pada tanggal 10 Juli 1860 pasukan Pangeran Hidayat pindah ke tempat lain setelah mendapat pukulan berat dari pasukan Belanda.

Sementara di daerah lain, pasukan Pangeran Antasari masih tetap melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Pada permulaan bulan Agustus 1860 pasukan Antasari berada di Ringkau Katan, dan pada 9 Agustus terjadi kontak senjata dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda berkekuatan 225 orang hukuman yang dipersenjatai, serta 10 orang penembak meriam. Dalam pertempuran itu pasukan Antasari dapat membunuh dan melukai beberapa orang tentara Belanda, namun mengalami kekalahan, kemudian Pangeran Antasari bersama pasukannya mengundurkan diri dari Ringkau Katan. Kekalahan Antasari ini terutama karena datangnya bala bantuan Belanda yang bergerak dari Amuntai melalui Awang menuju Ringkau Katan. Di Tamiyang Layang kemudian didirikan pos penjagaan Belanda yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merembesnya kembali pasukan Antasari ke Ringkau Katan.

Gerakan cepat pasukan Pangeran Hidayat dari satu daerah ke daerah lain cukup menyulitkan Belanda. Pasukan Hidayat yang berada Gunung Mandela dapat diketahui. Belanda mendatangkan pasukan sebanyak 140 orang dari Pantai Ambawang bersenjata senapan berbayonet. Akan tetapi, pasukan Belanda yang bermaksud menangkap Pangeran Hidayat tidak berhasil menjumpainya, karena pasukan Hidayat sudah meninggalkan Gunung Mandela menuju Haroman. Pasukan Hidayat dikejar oleh dua kelompok pasukan lain pada tanggal 20 Juli. Akan tetapi, pasukan Hidayat tidak juga dijumpainya. Kecepatan gerak pasukan Hidayat membuat Belanda kesal. Pangeran Hidayat diancam akan tetap dianggap sebagai pemberontak dan akan ditindas jika tidak mau menyerah secepatnya.

Akhirnya terjadi penangkapan atas diri Pangeran Hidayat dan kemudian dengan sejumlah kecil keluarga dan pengikutnya, Pangeran Hidayat diasingkan ke Cianjur Jawa Barat pada tanggal 5 Februari 1862. Peristiwa ini semakin menambah kemarahan rakyat Banjar dan menambah semangat juang mereka untuk melawan Belanda. Sementara itu, Pangeran Antasari makin giat melakukan perlawanan, lebih-lebih setelah mendengar kabar tentang pengasingan Pangeran Hidayat, saudara sepupunya, ke Jawa Barat. Kemahirannya dalam bertempur cukup memberi kepercayaan kepada para pengikut atas kepemimpinannya, misalnya ketika ia mempertahankan benteng Tundakan pada tanggal 24 September 1861 bersama kawan-kawan seperjuangannya, yaitu Pangeran Miradipa dan Tumenggung Mancanegara. Demikian pula waktu ia bersama Gusti Umar dan Tumenggung Surapati bertempur mempertahankan benteng di Gunung Tongka di Barito pada tanggal 8 November 1861. Karena kepercayaan ini, pada tanggal 14 Maret 1862 rakyat mengangkat Antasari sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar *Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin*. Sudah barang tentu gelar tersebut sangat besar pengaruhnya bagi kepemimpinan Pangeran Antasari. Ia masih terus memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhir hayatnya pada tanggal 11 Oktober 1862 di Bayan Begok Muara Teweh.

Setelah Pangeran Antasari meninggal, perlawanan rakyat masih terus berlangsung dipimpin oleh teman-teman seperjuangan dan putra-putra Pangeran Antasari. Kiai Demang Leman juga terus mengadakan perlawanan secara gerilya di sekitar Martapura. Pangeran Aminullah memusatkan operasinya di perbatasan Pasir, sedangkan Pangeran Prabu Anom bergerilya di daerah Amandit. Demikian pula sekitar Khayahan Atas tetap dikuasai oleh pasukan Banjar yang terus bergerilya melawan Belanda.

Belanda menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat terletak pada pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu, para pemimpin itu selalu dicari untuk ditangkap ataupun dibunuh. Hal ini dapat dilihat, misalnya, usaha untuk menangkap Kiai

Demang Leman. Atas bantuan kepala pelarian orang-orang Jawa, Kiai Demang Leman dan kawan-kawan seperjuangan seperti Tumenggung Aria Pati, dapat ditemui Pangeran Syarif Hamid yang dijadikan alat oleh Belanda. Pangeran Syarif Hamid melakukan pekerjaan ini karena Belanda menjanjikan akan mengangkat dirinya sebagai raja di Batu jika ia dapat menangkap Kiai Demang Leman. Kiai Demang Leman akhirnya dapat ditangkap dan pada Februari 1864 dibawa ke Martapura untuk menjalani hukuman gantung. Dengan tertangkap dan meninggalnya Kiai Demang Leman, pihak pejuang kehilangan seorang pemimpin yang berani.

Perang Banjar terus berlangsung, putra-putra Pangeran Antasari, antara lain Pangeran Muhammad Seman (Gusti Matseman) tetap melanjutkan perjuangan ayahnya. Demikian pula beberapa pejuang lain tetap melanjutkan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Haji Bujasin untuk wilayah Tanah Laut dan sekitarnya, seperti Bati-Bati, Pelaihari, Satui, dan Tabonio. H. Bujasin banyak berjasa dalam perjuangan melawan Belanda. Dia menjadi kawan seperjuangan dan bekerjasama dengan Pangeran Antasari serta Kiai Demang Leman, bahu-membahu mengatur strategi dan pertempuran melawan Belanda, walaupun pada akhirnya H. Bujasin juga mengalami hal yang sama dengan pejuang banjar yang lain. Pada tanggal 26 Januari 1866, ketika berusaha menyelamatkan diri dari Tanah Laut ke Tanah Dusun, ia ditembak mati oleh Pembakal Buang yang hendak mendapatkan hadiah dan menjadi alat pemerintah Belanda.

Mayat H. Bujasin kemudian ditemukan dan dibawa oleh Pangeran Suria Nata, Bupati Martapura ke Banjarmasin untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kemudian jasad yang telah kaku itu dikebumikan didekat bangunan Masjid Jami Banjarmasin yang lama, yakni Masjid Jami yang dulunya berlokasi di Jalan Panglima Batur RT 6 Kelurahan Surgi Mufti dan sekarang telah berubah menjadi bangunan Langgar Sinar Masjid, pada 27 Januari 1866 (sedangkan Masjid Jami yang sekarang terletak di Jalan Masjid Jami No. 1 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin).



Foto 11. Makam H. Bujasin di Banjarmasin.

Penerus perlawanan dari generasi Pangeran Antasari berikutnya antara lain adalah Gusti Matseman, Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, dan Penghulu Rasyid. Mereka mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di perbatasan daerah antara Amuntai, Kelua, dan Rantau. Meskipun perlawanan rakyat yang timbul diberbagai daerah itu tidak sekuat perlawanan-perlawanan pada masa Pangeran Antasari, perlawanan mereka cukup merepotkan dan menghambat kemajuan Belanda dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Pemerintah Hindia Belanda mengira bahwa dengan menyerahnya putra-putra Pangeran Antasari di daerah Dusun Atas Puruk Cahu, maka perlawanan rakyat dapat ditenangkan, tetapi pada kenyataannya gerakan perlawanan rakyat yang dimotori dari daerah sekitar Dusun Atas tetap berkobar dan terus berlangsung.

Pada tanggal 25 September 1864 Tumenggung Surapati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh dua orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh didirikan pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir. Tumenggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865, tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865 satu pasukan Belanda bergerak sampai di Kuala Baru untuk

memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan.

Pasukan Surapati yang berada di Benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi pasukan Surapati menderita kekalahan sehingga mengundurkan diri.

Di daerah Marabahan muncul pula pimpinan perjuangan yang mampu menggerakkan perlawanan masyarakat Banjar terhadap Belanda, yakni Panglima Wangkang. Pengaruh perjuangan dan gerakan perlawanan Panglima Wangkang cukup besar. Daerah gerakannya meliputi Marabahan dan Banjarmasin. Di Marabahan ia pernah berkolaborasi dengan Tumenggung Surapati untuk menyerang ibukota Banjarmasin. Pada tanggal 25 November 1870 ia bersama pengikutnya sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota, tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, Panglima Wangkang menarik kembali pasukannya keluar kota dan melanjutkan perjuangan secara bergerilya. Namun, Panglima Wangkang dan anak buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi ke Sungai Durrakhman. Tidak berapa lama di situ, pada akhir Desember 1870 datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri atas 150 orang serdadu dan 8 orang opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapat tambahan pasukan bantuan yang di datangkan dari Surabaya dan pasukan orang Dayak di bawah pimpinan Suto Ono. Sebelum tiba di Durrakhman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahana Panglima Wangkang semula di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng Panglima Wangkang di Durrakhman didekati pasukan pemerintah Belanda. Akhirnya terjadilah pertempuran, dan dalam pertempuran ini Panglima Wangkang pun gugur sebagai pahlawan bangsa. Jasadnya kemudian ditemukan dan dikuburkan di komplek pemakaman di Marabahan (Kampung Bakumpai atau Kelurahan Marabahan Kota).

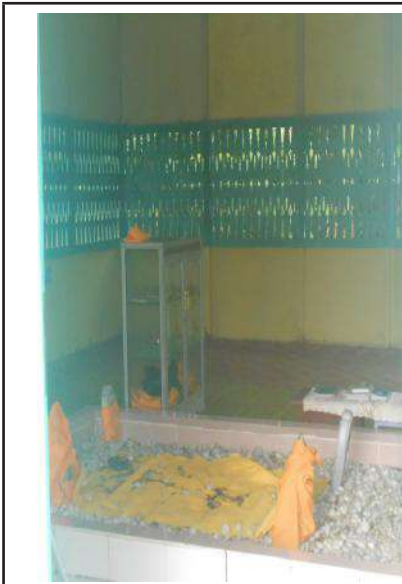


Foto 12. Makam Panglima Wangkang di Marabahan.



Foto 13. Komplek Bangunan-Cungkup makam Panglima Wangkang di Marabahan.

Gusti Matseman pada bulan Agustus 1883 memimpin pasukannya di daerah Dusun Hulu. Ia dengan pasukannya kemudian bergerak ke Telok Mayang dan berkali-kali mengadakan serangan terhadap pos Belanda di Muara Teweh. Sementara itu, Pangeran Perbatasari, menantu Gusti Matseman, mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Pahu, daerah Kutai. Kekalahan yang dideritanya menyebabkan ia tertangkap pada tahun 1885. Demikian pula perlawanan Tumenggung Gamar di Lok Tunggul tidak berhasil sehingga ia dengan pasukannya terpaksa mengundurkan diri ke Tanah Bumbu. Di tempat ini pertempuran terjadi lagi. Sampai akhirnya Tumenggung Gamar gugur dalam salah satu pertempuran tahun 1886. Gusti Matseman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Khayalan Hulu.

Gusti Matseman berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Taweh. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya di Khayalan dengan menambah pasukan baru, dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Dalam bulan

Desember 1886, pasukan Gusti Matseman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu, benteng pejuang di Taweh makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan tambahan makanan yang diangkut melalui hutan. Namun, basis pertahanan Matseman ini terancam bahaya, sebab di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan di sekitar benteng Matseman semakin kritis. Pada suatu ketika benteng diserang pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu pasukan Gusti Matseman terdesak sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian dibakar. Gusti Matseman masih terus melakukan perlawanan walaupun teman-teman seperjuangannya, yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrakhman menyerah pada pemerintah Belanda. Perlawanannya baru berhenti setelah ia gugur tahun 1905.

Dalam Perang Banjar, perlawanan rakyat juga muncul se-Banua Lima. Di Amuntai, Sungai Banar, Alabio dan Babirik terdapat benteng-benteng dan pos-pos yang menjadi basis gerakan perlawanan rakyat Banjar. Benteng besar didirikan di hulu mesjid Amuntai. Kota Amuntai jatuh ke tangan Belanda setelah dipertahankan dengan gigih oleh para pejuang.

Di Desa Kumbayau yang kemudian diubah namanya menjadi Tambay Mekkah Muning (Kampung Lawahan Kecamatan Tambarangan) yang merupakan basis perjuangan Datu Aling dengan pasukannya, dengan tiba-tiba mendapat serangan Belanda. Namun, Belanda menyerang sampai empat kali barulah berhasil mengalahkan pasukan Datu Aling. Dalam pertempuran ini, Kampung Tambay Mekkah dibakar habis oleh Belanda termasuk rumah yang didiami oleh Panembahan Aling dan anaknya yang bernama Saranti. Keduanya mati terbakar, tetapi Sultan Kuning hanya luka parah dan dapat menyelamatkan diri, dan baru tertangkap oleh Belanda pada tahun 1863.

Di daerah Kandangan, perlawanan rakyat diteruskan oleh Tumenggung Antaluddin yang berjuang mati-matian dalam

peristiwa pertempuran yang terjadi di benteng Gunung Madang (Ideham, 2003:178-180). Di mana, pertempuran dan serangan Belanda terhadap benteng Gunung Madang ini terjadi sebanyak lima kali sebelum kemudian jatuh ke tangan Belanda, yakni pertempuran pada tanggal 3, 4, 13, 18, dan 22 September 1860.



Foto 14. Pintu masuk bagian depan Benteng Gunung Madang di Kandangan.

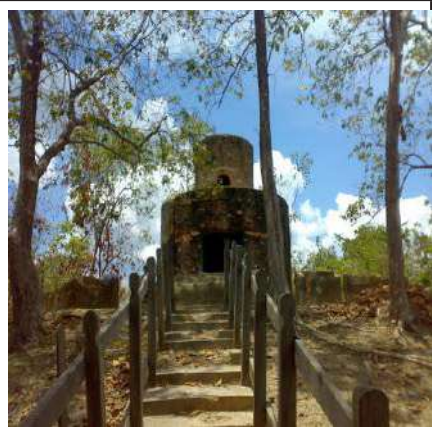


Foto 15. Anak tangga menuju Benteng Gunung Madang di Kandangan.

Pada tanggal 3 September 1860 pertempuran di benteng Gunung Madang ditandai dengan serangan pasukan Belanda. Karena melalui mata-matanya, Belanda mendapatkan informasi bahwa pelarian Pangeran Hidayatullah telah sampai di benteng Gunung Madang yang merupakan basis perlawanan rakyat Kandangan di bawah pimpinan Tumenggung Antaluddin. Dalam penyerangan ini, serdadu Belanda menyusuri Kampung Karang Jawa dan Ambarai dan langsung menuju Gunung Madang. Ketika mendekati bukit, tiba-tiba pasukan Tumenggung Antaluddin terlebih dahulu melakukan serangan, akibatnya beberapa serdadu Belanda tewas. Serangan gencar terus dilakukan, sehingga tentara Belanda mundur kembali ke benteng Amawang.

Pada keesokan harinya tanggal 4 September 1860 berdasarkan laporan pasukan pertama yang gagal menaklukkan benteng Gunung Madang, kembali Belanda mengirim pasukan infantri

dari batalyon ke-13 untuk mengadakan serangan yang kedua. Pasukan Belanda ini dilengkapi dengan mortir dan berpuluh-puluh orang perantain untuk membawa perlengkapan perang dan dijadikannya umpan dalam pertempuran. Pasukan Belanda melemparkan 3 biji granat tetapi tidak berbunyi, dan disambut dengan tembakan dari dalam benteng Gunung Madang. Di dalam benteng Gunung Madang terdapat pula beberapa orang perantain yang lari memihak pasukan Pangeran Hidayatullah ketika terjadi pertempuran di Pantai Hambawang yang terjadi sebelumnya. Ketika Letnan de Brauw dan Sersan de Vries menaiki kaki Gunung Madang, dia hanya diikuti serdadu bangsa Eropah sedangkan serdadu bangsa bumiputera membangkang tidak ikut bertempur. Ketika itu, Letnan de Brauw kena tembak di pahanya, dan 9 orang serdadu Eropah terkapar kena tembak dari arah dalam benteng. Setelah Letnan de Brauw kena tembak, serdadu Belanda mundur dan kembali ke benteng di Amawang.

Serangan ketiga direncanakan untuk dilakukan kembali oleh Belanda pada tanggal 13 September 1860 setelah mendapat pasukan tambahan dan bantuan dari Banjarmasin dan Amuntai. Karena itu, pada tanggal 13 September ini kembali Belanda menyerang benteng Gunung Madang. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Koch dengan perlengkapan meriam dan mortir. Sedangkan pejuang Banjar di benteng Gunung Madang; Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin mempersiapkan menunggu serangan Belanda sedangkan Pangeran Hidayatullah mengatur strategi untuk menghadapinya. Pertempuran ini terjadi dalam jarak dekat, tetapi Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin dengan gagah berani menghadapinya. Ketika bunyi senapan dan meriam bergema, tiba-tiba roda meriamnya hancur kena tembakan. Kapten Koch mempertimbangkan untuk mundur kembali ke benteng Amawang. Kegagalan serangan Kapten Koch ini tersebar sampai ke Banjarmasin, sehingga G.M. Verspyck memerintahkan Mayor Schuak menyiapkan pasukan infantri dari batalyon ke 13 yang terdiri dari 91 opsir bangsa Eropah untuk menaklukan benteng Gunung Madang.

Serangan berikutnya dilakukan oleh pasukan Belanda pada tanggal 18 September 1860 di bawah pimpinan Mayor Schuak dan dibantu Kapten Koch. Pasukan Belanda kali ini membawa sebuah howitser, sebuah meriam berat dan mortir. Pertempuran terjadi menjelang pukul 11.00 siang, ditandai dengan tembakan dari Demang Lehman. Mayor Schuak yang berani mendekati benteng dengan pasukannya, kena tembak oleh anak buah Tumenggung Antaluddin. Selanjutnya Kapten Koch memerintahkan memajukan meriam, namun tembakan pasukan pejuang Banjar dengan jitu mengenai serdadu pembawa meriam itu. Setelah pasukan meriam gagal, dilanjutkan dengan pasukan infantri. Kapten Koch yang memimpin pasukan infantri maju, namun kemudian kena tembak di dadanya dan jatuh tersungkur. Dengan jatuhnya Kapten Koch tersebut serdadu Belanda menjadi bingung dan kehilangan komando. Akhirnya mereka dengan bergegas menggotong mayat Koch dan berlari meninggalkan medan pertempuran, langsung mengundurkan diri kembali ke benteng Amawang.

Setelah serangan keempat ini gagal, Belanda mempersiapkan kembali untuk penyerangan yang kelima. Sementara, Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin juga mempersiapkan siasat apa yang diambil untuk menghadapi serangan secara besar-besaran dengan cara keluar dan tidak terpusat bertahan dalam benteng saja. Demang Lehman mendapat bantuan dari Kiai Cakra Wati pejuang wanita yang selalu menunggang kuda yang berasal dari daerah Gunung Pamaton (Distrik Riam Kanan). Serangan kelima pasukan Belanda terhadap Gunung Madang terjadi pada tanggal 22 September 1860. Kali ini, Belanda mempersiapkan serangan dengan teliti dan belajar dari kegagalan empat kali penyerangan sebelumnya. Belanda mempersiapkan penyerangan dengan mendirikan bivak-bivak dan perlindungan pasukan penembak meriam dengan sistem pengepungan benteng Gunung Madang. Pertempuran baru terjadi keesokan harinya dengan tembakan meriam dan lemparan granat. Pertempuran berlangsung sejak dari siang hingga malam hari, ketika malam hari lapangan pertempuran yang agak gelap menguntungkan

pasukan pejuang, sehingga Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin pun mengadakan serangan besar-besaran dengan meriam dan senapan. Serangan yang gencar merepotkan pasukan Belanda dan karena dilakukan pada malam hari yang gelap gulita, mereka pun kehilangan komando. Serangan Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin berhasil membuat kocar-kacir pasukan Belanda. Ketika pasukan Belanda kocar-kacir, diam-diam Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin beserta pasukannya keluar benteng dan menyebar keluar meninggalkan benteng, dan selanjutnya berpecah. Karenanya, ketika Belanda berhasil masuk ke dalam benteng, mereka telah mendapatkan benteng yang kosong tanpa ada pasukan pejuang.

Berikutnya, gerakan perlawanan rakyat di wilayah Kandangan dapat dilihat dari adalah pecahnya peristiwa *Amuk Hantarukung* pada 19 September 1899 yang dipelopori oleh dua orang bersaudara, Bukhari dan Santar. Bukhari adalah seorang pemuda yang berasal dari Desa Hantarukung (sekarang masuk wilayah Kecamatan Simpur berjarak 7 Km dari Kota Kandangan). Dia dilahirkan pada tahun 1850 dan semasa mudanya mengembara ke Puruk Cahu mengikuti pamannya yang bernama Kasim, seorang pedagang dan telah lama menjadi pembantu setia dari Sultan Muhammad Seman. Selama di Puruk Cahu, Bukhari ikut membantu pamannya berdagang. Sehingga dia mendapat pengalaman dan bisa menyaksikan bagaimana kebijakan dagang Belanda melalui berbagai pajak yang harus dibayarkan sangat memberatkan para pedagang dalam berusaha. Kondisi yang demikian kemudian mendorong Bukhari untuk ikut berjuang melawan Belanda dan membantu rakyat dari segala kesusahan dalam berusaha dan membayar pajak. Karena itu, Bukhari kemudian diajak oleh pamannya untuk mengabdikan dan membantu perjuangan Muhammad Seman di Puruk Cahu. Bukhari seorang yang setia mengabdikan dirinya, dia dipercayai orang sebagai *Pemayung Sultan*. Di kalangan pasukan Muhammad Seman, Bukhari juga dikenal sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian dan ilmu kekebalan.

Setelah mendapat tugas untuk menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah Banua Lima, terutama di Kandangan, Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman, maka Bukhari pun segera kembali ke kampung kelahirannya, Hantarukung. Dibantu oleh saudaranya yang bernama Santar, Bukhari menyusun suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Belanda. Kedatangan Bukhari diterima hangat oleh penduduk desa Hantarukung. Dalam menjalankan gerakannya, Bukhari juga mendapat bantuan dari *Pangerak*¹⁰ Yuya, sehingga Bukhari berhasil mengorganisir kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Sebanyak 25 orang penduduk telah menyatakan diri sebagai pengikutnya, dan di bawah pimpinan Bukhari dan Santar mereka siap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Gerakan Bukhari ini bahkan kemudian meluas dan mendapat dukungan dari penduduk Kampung Hamparaya dan Ulin.

Perlawanan mula-mula dilakukan dengan penentangan terhadap kerja rodi menggali parit yang diperintahkan Belanda. Sikap penduduk dan tindakan Pangerak Yuya yang tidak mau menurunkan penduduk untuk menggali parit antara Kandangan-Negara tersebut, kemudian dilaporkan oleh Pambakal Imat kepada Kepala Distrik, karena Kepala Distrik tidak ada di tempat, Pambakal pun melaporkan lagi kepada Controleur Belanda di kota Kandangan.

Penguasa Belanda di Kandangan sangat marah mendengar berita itu dan kemudian pada tanggal 18 September 1899 berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri dari Controleur Adsenarpont Domes dan Adspirant K. Wehonleschen beserta 5 orang Indonesia (opas dan pambakal) yang setia kepada

10 *Pangerak* adalah pembantu dan tangan kanan *pembakal* (kepala kampung) untuk mengepalai wilayah-wilayah kampung. Selain itu, pangerak juga bertugas untuk *maerak* (merodi) orang-orang kampung, mengumpulkan orang-orang, menagih pajak tanah, menagih pajak kepala, dan menagih pajak *erakan* yang harus dibayar sebagai pengganti rodi. M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1978/1979), h.47.

Belanda. Dengan menaiki kereta kuda dan diikuti yang lainnya Controleur Adsenerpont Domes ke Desa Hantarukung menemui Pangerak Yuya. Pangerak Yuya yang telah bekerjasama dengan Bukhari untuk melawan pemerintah Belanda ketika dipanggil oleh Controleur keluar dari rumahnya dengan membawa tombak dan *parang* tanpa sarung. Setelah terjadi tanya-jawab mengenai mengapa penduduk tidak mengerjakan lagi pekerjaan menggali parit Kandangan-Negara, tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Bukhari dan Santar sambil mengucapkan *Shalawat Nabi* dan teriakan *Allahu Akbar* maju menyerang Controleur dan rombongannya dengan senjata tombak, serapang, *parang*, dan lain-lainnya, hingga Controleur Domes dan Adspirant Wehonleshen serta seorang anaknya, terbunuh dalam peristiwa ini. Peristiwa penyerangan pasukan Bukhari ini kemudian terkenal dengan sebutan *Amuk Hantarukung*.

Peristiwa 18 September 1899 dengan terbunuhnya Controleur dan Adspirant oleh pasukan Bukhari segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di Kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Besok harinya, Senin tanggal 19 September 1899 pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan tersebut dipimpin oleh Kiai Jamjam, dengan diperkuat oleh 2 Kompi serdadu Belanda bersenjata lengkap. Penduduk Desa Hantarukung telah menyadari pula peristiwa yang akan terjadi. Karenanya, beratus-ratus penduduk di bawah pimpinan Bukhari, Santar, dan Pangerak Yuya siap dengan senjata mereka di pinggiran hutan dan keliling danau menanti kedatangan pasukan Belanda. Ketika sampai di Desa Hantarukung di suatu persawahan, melihat keadaan sepi, Kapten Belanda melepaskan tembakan peringatan agar penduduk menyerah. Pada waktu itulah Bukhari bersama-sama Haji Matamin dan Landuk tampil dengan senjata terhunus maju menyerbu musuh sambil mengucapkan *Allahu Akbar* berulang-ulang. Pertempuran tidak seimbang, rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun, semangat Bukhari dan rakyat yang menggebu

sempat membuat kerepotan pasukan Belanda. Walaupun pada akhirnya, Bukhari, Haji Matamin, Landuk, dan Pangerak Yuya gugur tertembak pasukan Belanda dalam pertempuran tersebut. Jenazah Bukhari, Landuk dan Matamin dimakamkan di Kampung Parincahan, Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan yang dikenal sekarang dengan sebutan *Makam Tumpang Talu*.

Dampak dari peristiwa *Amuk Hantarukung* terus berlanjut dengan terjadinya pembersihan oleh Belanda terhadap penduduk Desa Hantarukung, Hamparaya, Ulin, Wasah, dan Simpung yang dituduh terlibat dalam gerakan perlawanan. Penangkapan segera dijalankan oleh militer Belanda terhadap 23 orang, yakni Hala, Hair, Bain, Idir, Sahintul, H. Sanadin, Fakih, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, Tasin, Bulat, Sudin, Matasin, Yasin, Usin, Sahinin, Unan, Saal, Lasan dan Atmin. Di antara mereka yang ditangkap ini ada yang meninggal di dalam penjara, yakni Hala, Hair, Bain, dan Idir. Ada yang meninggal di tiang gantungan, yakni Sahintul, H. Sanaddin, Fakih, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, dan Tasin. Ada pula yang dibuang ke luar daerah, yakni Bulat, Sudin, Matasin, Yasin, Sahinin, Unan, Saal, Lasan, Atmin, dan Santar.



Foto 16. Makam Tumpang Talu di Parincahan Kandangan.

Di Tanah Dusun, pasukan Muhammad Seman dengan dibantu oleh Panglima Batur, di akhir-akhir masa Perang Banjar juga berjuang untuk mempertahankan benteng terakhir di Sungai

Manawing. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christofel yang berpengalaman dalam Perang Aceh, dengan sejumlah pasukan *marsose* (yakni, korps bukan militer yang didirikan pemerintah Belanda pada tahun 1890 untuk menangani tugas kepolisian dan jika perlu membantu dalam tugas kemiliteran) yang terkenal ganas dan bengis, menyerbu Banteng Manawing pada Januari 1905. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Sultan Muhammad Seman dan pasukannya tidak mampu bertahan. Sultan tertembak dan dia gugur sebagai pahlawan bangsa. Walau pun gugur, namun Sultan Muhammad Seman benar-benar melaksanakan amanat ayahnya Pangeran Antasari yang tidak kenal kompromi dengan Belanda dengan semboyan *haram manyarah waja sampai ka puting*.

Gugurnya Sultan Muhammad Seman dan jatuhnya pertahanan Manawing, serta tertangkapnya Panglima Batur pada tahun 1905, maka gerak perlawanan rakyat Banjar dapat dipadamkan dan Perang Banjar yang dimulai pada tahun 1859 dinyatakan berakhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aspek Perang Banjar; Perang Banjar; bagi masyarakat Banjar, Perang Banjar atau *De Bandjermasinche Krijg* merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pergerakan masyarakat Kalimantan melawan kolonialisme Belanda. Tidak hanya karena besarnya pengorbanan dalam perang ini, tetapi juga karena rentang waktu dan dampak yang ditimbulkan dari perang ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pun bagi pemerintah Hindia Belanda, Perang Banjar dianggap salah satu perang yang sangat berat, tidak hanya karena wilayah perang yang sangat luas atau medan tempur yang sulit, tetapi juga karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan banyaknya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan. Sedangkan bagi Bangsa Indonesia, Perang Banjar adalah rentetan dari perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dari berbagai kawasan dan wilayah dalam rangkaian perlawanan bersenjata bangsa Indonesia menolak penjajahan dan menjadi satu mata rantai sejarah perang kemerdekaan.

Perang Banjar dipicu oleh beberapa peristiwa besar yang mendahuluinya, di antaranya ialah gerakan perlawanan rakyat se Banua Lima yakni kawasan yang terdiri dari Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, dan Kelua, yang dimotori oleh Tumenggung Jalil (Amuntai) dan Penghulu Rasyid (Kelua-Tabalong). Perlawanan se

Banua Lima ini adalah gerakan pembuka dan perlawanan besar-besaran terhadap hegemoni Belanda di Tanah Banjar. Karena, Gerakan Banua Lima yang pada bulan Agustus 1858 kemudian disusul oleh Gerakan Datu Aling di Muning pada Maret 1859, dan terus meluas menjadi pecahnya Perang Banjar yang dipelopori oleh Pangeran Antasari pada April 1859 dengan ditandai oleh penyerangan terhadap benteng batubara Orangje Nessau di Pengaron.

Perang Banjar adalah titik kulminasi dari akumulasi rentetan sebab perlawanan terhadap Belanda, yang bisa dilihat dari dua aspek, pedagang dan perdagangan. Aspek pedagang dapat dilihat perlawanan yang dilakukan dan perlawanan ini sudah dimulai oleh kelompok pedagang Banjar. Apabila pada periode awal bentuk perlawanan yang mereka lakukan misalnya, munculnya gerakan penolakan dan penentangan para pedagang Banjar untuk berhubungan dagang dengan Belanda; tidak mau berhubungan dagang dengan Belanda; menentang monopoli dan menerapkan sistem perdagangan bebas dan terbuka; membuat jalur perdagangan baru; menolak membayar pajak perdagangan kepada Belanda; menolak prosedur perizinan dagang Belanda; melakukan penyelundupan barang, dan lain-lain. Maka, pada periode Perang Banjar, kelompok pedagang muncul dan memerankan perannya sebagai motor penggerak perlawanan, kemunculan sejumlah tokoh berlatar belakang pedagang, pemasok keperluan perlawanan (makanan), pencari dan penyebar informasi, memperluas pandangan dan wawasan masyarakat, dan lain-lain.

Aspek perdagangan; pemicu munculnya perlawanan adalah berkaitan dengan perdagangan. Rentetan peristiwa terkait perdagangan ini dimulai ketika Belanda dengan sikapnya yang tamak dan arogan merampok barang muatan kapal dagang pedagang Banjar; Sultan Banjar memerintahkan pembunuhan dan perampasan terhadap ekspedisi kapal dagang Belanda, penyerangan dan penghancuran Kota Banjarmasin, peristiwa pembunuhan terhadap orang Belanda, perampokan terhadap kapal dagang Belanda di perairan Sungai barito, dan lain-lain.

Perdagangan yang menjadi alasan pertama kedatangan Belanda ke Banjarmasin berubah menjadi kolonialisme; perdagangan yang menjadi urat nadi kehidupan Banjarmasin berubah menjadi arena perjuangan; dan pedagang yang semula adalah pelaku utama perkembangan ekonomi melalui usaha dagang mereka, berubah menjadi motor penggerak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pedagang adalah pemicu gerakan perlawanan dan perdagangan adalah sebab awal munculnya konflik dan perlawanan.

Aspek Perlawanan; Perlawanan pedagang Banjar terhadap monopoli dagang Belanda yang tidak hanya membatasi komoditas perdagangan, jalur perdagangan, pelaku perdagangan, barang dan kapal dagang yang masuk dalam rute perdagangan, harga barang yang diperdagangkan, ataupun penentuan pajak barang dagangan, tampak dari berbagai hal yang telah mereka lakukan, seperti menolak melakukan hubungan dagang dan bertransaksi dengan Belanda, membuat rute baru perdagangan, memasok dan mendistribusikan secara langsung barang dagangan, mencari dan mendapatkan barang dagangan secara langsung ke perdalaman atau sentral-sentral produksi, menjual secara langsung barang dagangan kepada pedagang asing yang lain (pedagang Cina), ataupun membuka dan berhubungan dagang dengan pedagang Inggris untuk menjadikan saingan dagang Belanda, adalah bagian dari strategi dagang dalam rangka perlawanan terhadap monopoli dagang Belanda. Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh pedagang Banjar yang lain ketika mereka menolak meminta perizinan dagang dari Belanda, melakukan penyelundupan barang dagangan, menolak membayar pajak barang dagang, menghancurkan perkebunan lada untuk pengurangan pasokan, dan lain-lain, maka usaha-usaha tersebut sebenarnya merupakan bentuk perlawanan dari para pedagang lokal yang anti terhadap monopoli Belanda dalam perdagangan, karena sistem monopoli sangat bertentangan dengan tradisi dagang orang Banjar yang menganut sistem dagang terbuka. Klimaks dari perlawanan para

pedagang ini kemudian adalah terjadinya Perang Banjar yang akhirnya melibatkan seluruh komponen masyarakat.

B. Rekomendasi

Sebagai salah satu periode penting dari sejarah kehidupan masyarakat Banjar, Perang Banjar telah menyisakan tinggalan-tinggalan berharga, berupa makam para pejuang, benteng pertahanan, markas gerakan, situs bekas daerah peperangan, termasuk cerita kepahlawanan dan perjuangan, dan lain-lain. Agar tinggalan-tinggalan tersebut tidak hilang dan terlupakan, serta dapat diwariskan nilai sejarah dan perjuangan yang tercakup di dalamnya, maka diperlukan restorasi dan pemeliharaan, sekaligus penelitian dan penulisan.

Sejarah yang terkait dengan Perang Banjar adalah materi penting yang harus diketahui oleh generasi sekarang, karena itu perlu upaya yang terus-menerus dalam rangka mewariskannya perlu dilakukan, baik melalui mata pelajaran muatan lokal di sekolah, museum perjuangan, pembinaan wawasan kebangsaan, maupun hal-hal lain yang dipandang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Husni. (2002). *Panembahan Muda Aling Datu Muning: Sebuah Studi Kasus Tentang Kekuasaan dalam Masyarakat Banjar*. Rantau: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- Abdullah, Taufik. (2001). "Kata Pengantar", dalam *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdurrahman, Dudung. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahyat, Ita Syamtasiyah. (2012). *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19: Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Alfisyah, "Etika Dagang Urang Banjar", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.14-23.
- Artha, Artum. (1995), "Pangeran Antasari: Gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu'minin", *Makalah*, Forum Informasi Ilmiah Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin Memperingati Wafatnya P. Antasari pada tanggal 11 Oktober 1995.
- Bondan, A. Hasan. (1953). *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Percetakan Karya.

- Gottschalk, L. (1985). *Understanding History*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ideham, M. Suriansyah. (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Indriyanto, "Peran Pelabuhan dalam Menciptakan Peluang Pariwisata: Kajian Historis Ekonomis", *Makalah pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 28 April 2005.
- Iqbal, M. (2008), "Oportunisitas Saudagar Banjar: Peranan Haji Isa dan Pangeran Syarif Husin Dalam Perang Banjar", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.24-38.
- Jahmin, J. (1995). "Banjarmasin: Kota Pelabuhan di Jalan Sutera", *Laporan Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartodirdjo, Sartono. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kasdi, Aminuddin. (2000). *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Press.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lapian, B. Adrian. (2008). *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mayur, Gusti. 1979. *Perang Banjar*. Banjarmasin: CV. Rapi.
- Noor, Yusliani. (2001), "Sejarah Perjuangan Umat Islam Kalimantan Selatan dari Pasca Kesultanan Banjar hingga Zaman Reformasi Indonesia Tahun 1998", *Makalah*, Seminar Sejarah tanggal 10 Oktober 2001 di Banjarmasin, Pusat Pengkajian Islam Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari Banjarmasin.

- . (2015). *Islamisasi Banjarmasin Abad ke-15 sampai ke-19*. Jakarta: Ombak.
- Norpikriadi. (2005). *Tumenggung Jalil: Studi Kasus Tentang Politik Pada Masyarakat Tradisional Banjar*. Amuntai: Pemerintah Kabupaten HSU.
- Nuralang, Andi. 2004. "Sungai sebagai Jalur Utama Aktivitas Perekonomian Masyarakat di Kalimantan Selatan", dalam Gunadi Kasnowihardjo, Wasita, Andi Nuralang (ed.). (2004). *Sungai dan Kehidupan Masyarakat di Kalimantan*. Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Komda Kalimantan.
- Poelinggomang, Edward L. (2016). *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ras, J.J. (1968). *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*. Leiden-Belanda: The Hague-Martinus Nijhoff.
- Saleh, M. Idwar. (1958). *Sedjarah Bandjarmasin*. Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru.
- . (1977/1978). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- . (1982). *Lukisan Perang Banjar 1859-1865*. Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan.
- . (1986). *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Akhir Abad-19*, Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan.
- . (1993). *Pangeran Antasari*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- "Saudagar Banjar: Tinjauan Historis dan Sosiologis" Catatan Hasil Diskusi Palidangan Budaya, *Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.69-73.

- Seman, Syamsiar. (2003). *Pangeran Antasari dan Meletusnya Perang Banjar*. Banjarmasin: Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Kalimantan Selatan.
- Sjamsuddin, Helius. (2001). *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . (2002). *Islam dan Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah Pada Abad 19 dan Awal Abad 20*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Borneo.
- . (2011). "Kesultanan Banjar dalam Perspektif Sejarah", *Makalah Seminar*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 16 April 2011.
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Subiyakto, Bambang. (2007), "Perdagangan Borneo Tenggara Tempo Doeloe", *Kandil*, Edisi 15 Tahun V, November-Desember 2007, LK3 Banjarmasin, h.59-76.
- Subiyakto, Bambang. (2008), "Dinamika Kehidupan di Tanah Banjar Pada Paroh Kedua Abad XIX", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 16 Tahun VI, Februari-April 2008, LK3 Banjarmasin, h.3-10.
- Sulandjari, "Politik dan Perdagangan Lada di Kesultanan Banjarmasin 1747-1787", *Tesis*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 1991.
- Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin, Pemerintah VOC, Inggris, dan Hindia 1635-1860*, Arsip Nasional, Jakarta, 1965.
- Tjandrasasmita, Uka. (2000). *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*. Kudus: Menara Kudus.
- . (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Usman, A. Gazali. (1994). *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan, dan Agama Islam*. Banjarmasin: University Lambung Mangkurat Press.
- . (1995), "Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional P. Antasari", *Makalah*, Forum Informasi Ilmiah Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin Memperingati Wafatnya P. Antasari pada tanggal 11 Oktober 1995.
- Wajidi. (2007). *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wicaksono, Ibnu. (2010). "Kesultanan Banjarmasin dalam Lintas Perdagangan Nusantara Pada Abad XVIII", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

